

Kata Pengantar

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga telah tersusun "Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2019". Buku ini disusun dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Profil Perkembangan Kependudukan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Undang- Undang ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Administrasi kependudukan diarahkan untuk memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang akan mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain bertujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. Selain itu juga bertujuan untuk menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kami berharap buku ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan sangat disadari bahwa buku ini masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna penyempurnaan buku ini , dan kami ucapakan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan demi kelancaran penyusunan buku ini.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman

JAZIM SUMIRAT, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19631128 198903 1 006

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sumber Data	3
1.5	Pengertian Umum	4
1.5.1	Kependudukan	4
1.5.2	Tenaga Kerja	6
1.5.3	Sosial	7
BAB II	GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN	20
2.1	Letak Geografis	20
2.2	Pembagian Wilayah dan Pemerintahan	20
2.3	Karakteristik Wilayah	21
BAB III	PROFIL KUANTITAS PENDUDUK KABUPATEN SLEMAN	25
3.1	Komposisi Penduduk menurut Karakteristik Demografi	26
3.1.1	Jumlah Penduduk	27
3.1.2	Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	28
3.1.3	Umur Median (<i>Median Age</i>)	31
3.1.4	Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>)	35
3.1.5	Piramida Penduduk	38
3.1.5.1	Piramida Penduduk Kecamatan Gamping	40
3.1.5.2	Piramida Penduduk Kecamatan Godean	41
3.1.5.3	Piramida Penduduk Kecamatan Moyudan	42
3.1.5.4	Piramida Penduduk Kecamatan Minggir	43
3.1.5.5	Piramida Penduduk Kecamatan Seyegan	44
3.1.5.6	Piramida Penduduk Kecamatan Mlati	45
3.1.5.7	Piramida Penduduk Kecamatan Depok	47
3.1.5.8	Piramida Penduduk Kecamatan Berbah	48
3.1.5.9	Piramida Penduduk Kecamatan Prambanan	49
3.1.5.10	Piramida Penduduk Kecamatan Kalasan	50
3.1.5.11	Piramida Penduduk Kecamatan Ngemplak	51
3.1.5.12	Piramida Penduduk Kecamatan Ngaglik	52
3.1.5.13	Piramida Penduduk Kecamatan Sleman	53
3.1.5.14	Piramida Penduduk Kecamatan Tempel	54
3.1.5.15	Piramida Penduduk Kecamatan Turi	55
3.1.5.16	Piramida Penduduk Kecamatan Pakem	56
3.1.5.17	Piramida Penduduk Kecamatan Cangkringan	57

3.1.6	Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	58
3.1.7	Rasio Kepadatan Penduduk	60
3.2	Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	62
3.2.1	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	62
3.2.2	Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	65
3.2.3	Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin	68
3.3	Keluarga	73
3.3.1	Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga	73
3.3.2	Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga (SHDK)	74
3.3.3	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur	75
3.3.4	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin	76
3.3.5	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin	78
3.3.6	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan	79
3.3.7	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Bekerja	80
BAB IV KUALITAS PENDUDUK		83
4.1	Kesehatan	84
4.1.1	Angka Kematian Bayi	85
4.1.2	Angka Kematian Anak dan Balita	89
4.1.3	Angka Kematian Ibu	92
4.1.3	Keluarga Berencana	96
4.1.4	Pernikahan, Talak, Rujuk	101
4.2	Ketenagakerjaan	108

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administratif Kabupaten Sleman	21
Tabel 2.2	Nama dan Luas Desa, Karakteristik Wilayah dan Arah Pengembangan Perumahan di Kabupaten Sleman	23
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	28
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	31
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kecamatan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	33
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Lansia (>65 Tahun) Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2019	34
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	37
Tabel 3.6	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Sleman Menurut Kecamatan Tahun 2019	59
Tabel 3.7	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2019	61
Tabel 3.9	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	63
Tabel 3.10	Jumlah Penduduk Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	65
Tabel 3.11	Jumlah Penduduk Menurut Agamat/Kepercayaan yang Dianut Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	67
Tabel 3.12	Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin Berdasarkan Kecamatan Menurut Data SIAK Tahun 2019	70
Tabel 3.13	Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2019	72
Tabel 3.14	Jumlah Penduduk, Jumlah Kepala Keluarga, dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Tahun 2019	74
Tabel 3.15	Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Tahun 2019	75
Tabel 3.16	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur Tahun 2019	76
Tabel 3.17	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2019	77
Tabel 3.18	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Kawin dan Kecamatan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	79
Tabel 3.19	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2019	80
Tabel 3.20	Jumlah Keluarga Berdasarkan Status Bekerja dan Kecamatan Tahun 2019	82
Tabel 4.1	Distribusi Angka Kematian Bayi menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2019	86
Tabel 4.2	Distribusi Kematian Neonatal menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2019	87

Tabel 4.3	Distribusi Kematian Post Neonatal Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2019	88
Tabel 4.4	Distribusi Angka Kematian Anak Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2019	90
Tabel 4.5	Distribusi Angka Kematian Balita Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2019	91
Tabel 4.6	Distribusi Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2019	93
Tabel 4.7	Distribusi Parameter Kelahiran di Kabupaten Sleman Tahun 2019	95
Tabel 4.8	Parameter Keluarga Berencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2019	97
Tabel 4.9	Distribusi Pernikahan, Wali Nikah, Cerai, Rujuk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2019	103
Tabel 4.10	Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2019	106
Tabel 4.11	Distribusi Ketenagakerjaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2019	108
Tabel 4.12	Distribusi Dokumen Kependudukan Menurut Kecamatan	115

Daftar Gambar

Gambar 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	29
Gambar 3.2	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2019	38
Gambar 3.3	Piramida Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2019	39
Gambar 3.4	Piramida Penduduk Kecamatan Gamping Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	41
Gambar 3.5	Piramida Penduduk Kecamatan Godean Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	42
Gambar 3.6	Piramida Penduduk Kecamatan Moyudan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	43
Gambar 3.7	Piramida Penduduk Kecamatan Minggir Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	44
Gambar 3.8	Piramida Penduduk Kecamatan Seyegan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	45
Gambar 3.9	Piramida Penduduk Kecamatan Mlati Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	46
Gambar 3.10	Piramida Penduduk Kecamatan Depok Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	47
Gambar 3.11	Piramida Penduduk Kecamatan Berbah Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	48
Gambar 3.12	Piramida Penduduk Kecamatan Prambanan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	49
Gambar 3.13	Piramida Penduduk Kecamatan Kalasan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	50
Gambar 3.14	Piramida Penduduk Kecamatan Ngemplak Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	51
Gambar 3.15	Piramida Penduduk Kecamatan Ngaglik Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	52
Gambar 3.16	Piramida Penduduk Kecamatan Sleman Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	53
Gambar 3.17	Piramida Penduduk Kecamatan Tempel Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	54
Gambar 3.18	Piramida Penduduk Kecamatan Turi Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	55
Gambar 3.19	Piramida Penduduk Kecamatan Pakem Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	56
Gambar 3.20	Piramida Penduduk Kecamatan Cangkringan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	57
Gambar 3.21	Persentase Penduduk Sleman Menurut Agama/Kepercayaan yang Dianut Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	68
Gambar 3.22	Persentase Penduduk Sleman Menurut Status Perkawinan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019	69
Gambar 3.23	Persentase Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja Tahun 2019	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena disamping sebagai pelaksana pembangunan, penduduk juga merupakan sasaran akhir dari perencanaan pembangunan seperti kesejahteraan penduduk, kesehatan penduduk, keamanan penduduk, dan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya pembangunan yang ideal. Jumlah penduduk Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan Data Sensus Penduduk Indonesia 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.556.363 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49%. Penambahan jumlah penduduk yang besar mempunyai implikasi yang sangat luas terhadap program pembangunan. Penduduk yang besar dengan kualitas sumberdaya manusia yang relatif kurang memadai sangat berpotensi memberikan beban dalam pembangunan, yang tercermin melalui beratnya beban pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan berbagai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja, dan lingkungan hidup.

Menurut Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, demi terwujudnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas, dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Tujuan tersebut diharapkan dapat menciptakan penduduk menjadi sumberdaya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Dalam upaya merealisasikan hal tersebut di atas, diperlukan penyajian data dan informasi perkembangan kependudukan yang komprehensif. Data dan informasi perkembangan kependudukan menjadi sangat penting dan strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan, baik di bidang politik, pembangunan kesehatan, pendidikan maupun bidang pertanian. Bagi dunia usaha, data kependudukan diperlukan dalam menentukan perencanaan strategis bisnis, seperti: target pasar dan jumlah produksi. Data dan informasi kependudukan ini, juga dapat menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan berwawasan kependudukan.

Guna menunjang pemenuhan kebutuhan informasi kependudukan dalam merencanakan kebijakan sektor maupun program sektoral terkait dalam upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan penduduk, maka disusunlah Profil Perkembangan Kependudukan. Dengan profil perkembangan kependudukan ini, akan diketahui jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki, menurut umur, jenis kelamin, persebaran, laju pertumbuhannya, maupun karakteristik lainnya.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan profil perkembangan kependudukan adalah:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- c. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- i. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010/Nomor 162/Menkes/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan adalah:

- a. Menyediakan informasi perkembangan kependudukan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.
- b. Mengetahui jumlah sumberdaya manusia yang ada, menurut umur, jenis kelamin maupun karakteristik yang lainnya.
- c. Mengetahui keadaan dan persebaran penduduk dari waktu ke waktu, agar penyebarannya serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

1.4 Sumber Data

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini berbasis data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilengkapi dengan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, Dinas Kesehatan, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, serta instansi-instansi terkait.

1.5 Pengertian Umum

Pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan:

1.5.1 Kependudukan

- a. **Penduduk** adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- b. **Data kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- c. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)** adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
- d. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
- e. **Perkembangan kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
- f. **Profil perkembangan kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
- g. **Persebaran penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan.
- h. **Penyebaran penduduk** adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- i. **Umur median (median age)** adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median.
- j. **Rasio jenis kelamin (sex ratio)** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.

- k. **Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan** (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15–64 tahun).
- l. **Rasio kepadatan penduduk** (*density ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu.
- m. **Laju pertumbuhan penduduk** adalah rata-rata tahunan laju perubahan jumlah penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu.
- n. **Migrasi penduduk** adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administratif lainnya, dengan tujuan untuk menetap.
- o. **Piramida penduduk** adalah grafik berbentuk piramida yang merupakan gambaran secara visual dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.
- p. **Rata-rata usia kawin pertama** (*singulate mean age at marriage*) adalah perkiraan rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin).
- q. **Keluarga** adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.
- r. **Keluarga inti** (*nuclear family*) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.
- s. **Keluarga luas** (*extended family*) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak (baik yang sudah kawin atau belum), cucu, orangtua, mertua maupun kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.
- t. **Jumlah kelahiran** adalah banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu.

- u. **Angka kelahiran menurut umur** (*ASFR= age specific fertility rate*) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1.000 perempuan usia produktif (15–49 tahun) menurut kelompok umur yang sama.
 - v. **Angka Kelahiran Umum** (*General Fertility Rate/GFR*), adalah angka yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir dari setiap 1.000 wanita pada usia reproduksi atau melahirkan yaitu pada kelompok usia 15-49 tahun.
 - w. **Angka Kelahiran Kasar** (*Crude Birth Rate/CFR*), adalah angka kelahiran yang menunjukkan jumlah kelahiran perseribu penduduk dalam suatu periode.
 - x. **Rasio anak dan perempuan** (*CWR= child women ratio*) adalah rasio antara jumlah anak di bawah lima tahun di suatu tempat pada suatu waktu, dengan penduduk perempuan usia 15-49 tahun.
 - y. **Tingkat Kematian Kasar** (*Crude Death Rate/CDR*), adalah angka yang menunjukkan rata-rata kematian perseribu penduduk dalam satu tahun.
 - z. **Tingkat Kematian Menurut Umur** (*Age Specific Death Rate/ASDR*), adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu perseribu penduduk dalam kelompok yang sama.
- aa. Tingkat Kematian Bayi** (*Infant Mortality Rate/IMR*), adalah angka yang menunjukkan banyaknya bayi yang meninggal dari setiap 1.000 bayi yang lahir hidup.

1.5.2 Tenaga Kerja

Pengertian umum ketenagakerjaan:

- a. **Penduduk** adalah penduduk yang berdomisili atau menetap di wilayah tersebut.
- b. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih.
- c. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih yang sudah bekerja dan yang belum bekerja tetapi punya keinginan bekerja (masih menganggur).
- d. **Penganggur terbuka** adalah penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang tidak bekerja tetapi punya keinginan bekerja/sedang mencari pekerjaan atau disebut **penganggur murni**.

Pada definisi ini benar-benar tidak bekerja, tidak membantu orang lain termasuk orang tua dalam pekerjaannya meskipun tidak dibayar.

- e. **Bekerja** adalah penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang bekerja untuk memperoleh pendapatan, atau membantu memperoleh pendapatan.

Bekerja diatas 35 Jam/ Minggu

Penduduk yang bekerja bekerja jika dijumlahkan 35 jam atau lebih dalam satu minggu

Bekerja kurang 35 Jam/ Minggu

Penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Contoh: pekerja serabutan, bekerja di sawah hanya beberapa jam sehari, sopir pengganti, pekerja yang bekerja hanya jika ada pesanan, pekerjaan yang belum menentu waktunya tetapi jika dijumlahkan dalam 1 minggu kurang dari 35 jam seminggu atau disebut Setengah Penganggur

- f. **Sekolah** adalah penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang masih sekolah, sedangkan anak sekolah tetapi usianya di bawah 15 tahun tidak termasuk definisi ini, tetapi masuk definisi anak.
- g. **Mengurus RT** adalah penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang mengurus rumah tangga, karena sesuatu alasan misalnya pendapatan sudah cukup, mengurus anak dan alasan lain sehingga tidak ingin bekerja atau mencari pekerjaan lagi.
- h. **Penerima pendapatan dan lainnya** adalah penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang tidak bekerja karena alasan telah menerima pendapatan dari pensiun, simpanan/sewa atas milik dan karena alasan usia tua, pensiun, cacat dan alasan lainnya.

i. **Anak**

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

1.5.3 Sosial

Duapuluh enam jenis PMKS dengan batasan pengertian dan kriteria antara lain adalah sebagai berikut ini.

a. **Anak Balita Terlantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang diterlantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksplorasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

1. Yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orang tuanya pada orang lain, di tempat umum, rumah sakit, dan sebagainya
2. Tidak pernah/tidak cukup diberi ASI dan/atau susu tambahan/pengganti
3. Makan makanan pokok tidak mencukupi
4. Anak dititipkan atau ditinggal sendiri yang menimbulkan keterlantaran
5. Apabila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern (dibawa ke Puskesmas, dan lain-lain)
6. Mengalami eksplorasi

b. **Anak Terlantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria:

1. Berasal dari keluarga fakir miskin
2. Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga)
3. Diterlantarkan oleh orang tua/keluarga, atau
4. Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga
5. Anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP
6. Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari
7. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai
8. Bila sakit tidak diobati
9. Yatim, piatu atau yatim piatu
10. Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin
11. Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja

- c. **Anak berhadapan dengan hukum** adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria:

1. Anak diindikasikan (terlaporkan di kepolisian) melakukan pelanggaran hukum
2. Anak yang mengikuti proses peradilan
3. Anak yang berstatus diversi (pengalihan hak asuh anak kepada pihak lain atas keputusan pengadilan)
4. Anak yang telah menjalani masa hukuman pidana atau sedang mengikuti pembinaan dalam bimbingan kemasyarakatan lapas
5. Anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum
6. Anak yang menjadi korban sengketa hukum akibat perceraian orang tua: perdata
7. Anak yang karena suatu sebab menjadi saksi tindak pidana

- d. **Anak Jalanan** adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria:

1. Anak yang rentan bekerja di jalanan karena suatu sebab
2. Anak yang melakukan aktivitas di jalanan
3. Anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan
4. Jangka waktu di jalanan lebih dari 6 jam per hari dan dihitung untuk 1 (satu) bulan yang lalu

- e. **Anak dengan Kedisabilitasan** (ADK) adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-

fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

1. Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu, wicara
2. Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
3. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
4. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari

f. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban eksplorasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Kriteria:

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak korban perdagangan
3. Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental
4. Anak korban eksplorasi
5. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta
7. Anak yang terinfeksi HIV/AIDS

g. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria:

1. Tidak ada keluarga yang mengurusnya
2. Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya

3. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari
4. Menderita minimal 1 jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya
5. Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin

Untuk Lanjut Usia Terlantar terbagi menjadi 2 kriteria yaitu:

LUT Potensial : lanjut usia terlantar yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa

LUT Tidak Potensial : lanjut usia terlantar yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain

h. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

1. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktivitas sehari-hari
2. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari
3. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai
4. Penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara
5. Penyandang disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
6. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda

i. Tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18–59 tahun

2. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran (bordil), dan tempat terselubung (warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek)

j. **Gelandangan** adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18–59 tahun, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar
2. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya
3. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas, dan lain-lain

k. **Pengemis** adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18–59 tahun
2. Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya
3. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu
4. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk pada umumnya

l. **Pemulung** adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaur-ulang barang-barang bekas.

Kriteria:

Tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mengais langsung dan mendaur-ulang barang bekas, dan lain-lain

m. Kelompok minoritas adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.

Kriteria:

1. Tidak dominan dengan ciri khas, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk
2. Mempunyai perilaku menyimpang

n. Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18–59 tahun
2. Telah selesai atau segera keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana
3. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat
4. Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap
5. Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

o. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18–59 tahun
2. Telah terinfeksi HIV/AIDS

p. Korban penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan)
2. Pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras, yang dilakukan sekali, lebih sekali atau dalam taraf coba-coba
3. Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang
4. Tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya

q. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Kriteria:

1. Mengalami tindak kekerasan
2. Mengalami eksplorasi seksual
3. Mengalami penelantaran
4. Mengalami pengusiran (deportasi)
5. Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu

r. Korban tindak kekerasan adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksplorasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria:

Individu, kelompok maupun kesatuan masyarakat yang mengalami:

- tindak kekerasan
- penelantaran
- eksplorasi
- diskriminasi
- bentuk-bentuk tindak kekerasan lainnya

berakibat terganggunya fungsi sosial.

s. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksplorasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.

Kriteria:

1. Calon pekerja migran
2. Pekerja migran internal
3. Pekerja migran lintas negara
4. Eks pekerja migran

yang mengalami masalah sosial dalam bentuk:

- tindak kekerasan
- eksplorasi
- penelantaran
- pengusiran (deportasi)
- ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu

t. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kriteria:

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

1. Korban jiwa
2. Kerusakan lingkungan
3. Kerugian harta benda, dan
4. Dampak psikologis

u. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria:

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

1. Korban jiwa manusia
2. Kerusakan lingkungan
3. Kerugian harta benda, dan
4. Dampak psikologis

v. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria:

1. Perempuan berusia 18-59 tahun
2. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan
3. Menjadi pencari nafkah utama keluarga
4. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak
(cek istilah BPS)

w. Fakir miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber

matapencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Kriteria:

1. Penghasilan rendah atau berada di bawah garis sangat miskin yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS per wilayah provinsi dan kabupaten/kota
2. Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial)
3. Keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang per tahun)
4. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga sakit
5. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya
6. Tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis sangat miskin
7. Tinggal di rumah yang tidak layak huni
8. Sulit memperoleh air yang bersih

x. **Keluarga bermasalah sosial psikologis** adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar

Kriteria:

1. Suami atau istri sering tanpa saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi
2. Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga
3. Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi
4. Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi

y. **Keluarga Berumah Tidak Layak Huni** adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Kriteria:

1. Kondisi rumah:

- luas lantai perkapita < 4 m² (perkotaan) dan < 10 m² (perdesaan)
- sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas
- tidak mempunyai akses MCK
- bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu/ rumbia
- tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara
- tidak memiliki pembagian ruangan
- lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap
- letak rumah tidak teratur dan berdempetan
- kondisi rusak

2. Kondisi lingkungan:

- lingkungan kumuh dan becek
- saluran pembuangan air tidak memenuhi standar
- jalan setapak tidak teratur

3. Kondisi keluarga:

- kebanyakan keluarga miskin (di bawah garis kemiskinan)
- kesadaran untuk ikut serta memiliki dan memelihara lingkungan pada umumnya rendah (ikut bersih kampung, ikut kerja bakti, membuat sampah sembarangan di sungai)

z. **Komunitas Adat Terpencil** adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

Kriteria:

1. Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen

2. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan
3. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau
4. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem
5. Peralatan dan teknologinya sederhana
6. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumberdaya alam setempat relatif tinggi
7. Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

2.1 Letak Geografis

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Sleman 574,82 Km² atau 18% dari luas wilayah DIY, terbentang di antara 110°33'00" dan 110°13'00" Bujur Timur, serta 7°34'51" dan 7°47'03" Lintang Selatan. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Magelang, serta di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.

2.2 Pembagian Wilayah dan Pemerintahan

Secara administratif, terbagi atas 17 kecamatan, 86 desa, dan 1.212 pedukuhan. Selengkapnya dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administratif Kabupaten Sleman

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Desa	Jumlah Pedukuhan
1.	Gamping	2,925	5	59
2.	Godean	2,684	7	77
3.	Moyudan	2,762	4	65
4.	Minggir	2,727	5	68
5.	Seyegan	2,663	5	67
6.	Mlati	2,852	5	74
7.	Depok	3,555	3	58
8.	Berbah	2,299	4	58
9.	Prambanan	4,135	6	68
10.	Kalasan	3,584	4	80
11.	Ngemplak	3,571	5	82
12.	Ngaglik	3,852	6	87
13.	Sleman	3,132	5	83
14.	Tempel	3,249	8	110
15.	Turi	4,309	4	42
16.	Pakem	4,384	5	61
17.	Cangkringan	4,799	5	73
KABUPATEN SLEMAN		57,482	86	1.212

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, 2014

2.3 Karakteristik Wilayah

Wilayah Kabupaten Sleman memiliki ketinggian antara 100 meter hingga 2.500 meter di atas permukaan laut. Bagian selatan relatif datar dengan peruntukan utama sebagai lahan pertanian, industri, dan permukiman, sedangkan bagian utara merupakan lereng Gunung Merapi yang memiliki banyak potensi sumber air. Di lereng selatan Gunung Merapi terdapat dua buah bukit, yaitu Bukit Turgo dan Bukit Plawangan yang merupakan bagian dari kawasan wisata Kaliurang. Beberapa sungai yang mengalir melalui Kabupaten Sleman menuju Pantai Selatan antara lain Sungai Progo, Krasak, Sempor, Kuning, Boyong, Winongo, Gendol dan Opak.

Berdasarkan karakteristik sumberdaya, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi empat kawasan, yaitu:

1. Kawasan Lereng Gunung Merapi, di mulai dari jalan yang menghubungkan Kota Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan (*rightbelt*) sampai dengan puncak

Gunung Merapi. Wilayah ini kaya sumberdaya air dan potensi ekowisata yang berorientasi pada aktivitas Gunung Merapi dan ekosistemnya.

2. Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, Kalasan, Berbah. Wilayah ini kaya akan tempat peninggalan purbakala (candi) sebagai pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih.
3. Kawasan Tengah yaitu wilayah aglomerasi Perkotaan Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini cepat berkembang, merupakan pusat pendidikan, industri, perdagangan, dan jasa.
4. Kawasan Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan, dan Moyudan, merupakan daerah pertanian lahan basah dan penghasilan bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu, dan gerabah.

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu dari kota Yogyakarta dan dapat dibedakan menjadi:

1. Wilayah aglomerasi Perkotaan Yogyakarta, yang meliputi Kecamatan Depok, Gamping, serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik, Ngemplak, Kalasan, Berbah, Sleman, dan Mlati.
2. Wilayah sub-urban, meliputi kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik, yang terletak cukup jauh dari Kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.
3. Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (*buffer zone*) meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan, yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

Karakteristik wilayah dan arah pengembangan wilayah di Kabupaten Sleman, khususnya pengembangan perumahan, dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Nama dan Luas Desa, Karakteristik Wilayah dan Arah Pengembangan Perumahan di Kabupaten Sleman

No.	Kecamatan (Luas)	Desa	Luas Wilayah (km ²)	Karakteristik Wilayah/Kawasan	Arah Pengembangan Perumahan
1.	GAMPING (2.925 km ²)	1. Balecatur 2. <i>Ambarkeitawang</i> 3. Banyuraden 4. Nogotirto 5. Trihanggo	9,86 6,28 4,00 3,49 5,62	Perkotaan Perkotaan (Ibukota Kecamatan) Perkotaan Perkotaan Perkotaan	Perumahan Perumahan Perumahan Perumahan Perumahan
2.	GODEAN (2.684 km ²)	1. Sidorejo 2. Sidoluhur 3. Sidomulyo 4. <i>Sidoagung</i> 5. Sidokarto 6. Sidoarum 7. Sidomoyo	5,44 5,19 2,50 3,32 3,64 3,73 3,02	Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan Perkotaan Perdesaan	Perumahan
3.	MOYUDAN (2.762 km ²)	1. Sumberrahayu 2. Sumbersari 3. <i>Sumberagung</i> 4. Sumberarum	6,31 5,46 8,20 7,65	Perdesaan Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan	
4.	MINGGIR (2.727 km ²)	1. Sendangmulyo 2. Sendangarum 3. Sendangrejo 4. <i>Sendangsari</i> 5. Sendangagung	6,70 3,45 5,98 4,58 6,56	Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan	
5.	SEYEGAN (2.663 km ²)	1. Margoluwih 2. Margodadi 3. <i>Margomulyo</i> 3. Margoagung 5. Margokaton	5,00 6,11 5,19 5,18 5,15	Perdesaan Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan Perdesaan	
6.	MLATI (2.852 km ²)	1. Tirtoadi 2. Sumberadi 3. <i>Tlogoadi</i> 4. Sendangadi 5. Sinduadi	4,97 6,00 4,82 5,36 7,37	Perkotaan Perkotaan Perkotaan (Ibukota Kecamatan) Perkotaan Perkotaan	Perumahan Perumahan Perumahan Perumahan Perumahan
7.	DEPOK (3.555 km ²)	1. <i>Caturtunggal</i> 2. Maguwoharjo 3. Condongcatur	11,04 15,01 9,50	Perkotaan Perkotaan Perkotaan	Perumahan Perumahan Perumahan
8.	BERBAH (2.299 km ²)	1. Sendangtirto 2. <i>Tegaltirto</i> 3. Jogotirto 4. Kalitirto	5,22 5,73 5,84 6,20	Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan Perkotaan	Perumahan
9.	PRAMBANAN (4.135 km ²)	1. Sumberharjo 2. Wukirharjo 3. Gayamharjo 4. Sambirejo 5. Madurejo 6. <i>Bokoharjo</i>	9,17 4,75 6,55 8,39 7,09 5,40	Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan)	

No.	Kecamatan (Luas)	Desa	Luas Wilayah (km ²)	Karakteristik Wilayah/Kawasan	Arah Pengembangan Perumahan
10.	KALASAN (3.584 km ²)	1. Purwomartani 2. <i>Tirtomartani</i> 3. Tamanmartani 4. Selomartani	12,05 7,54 7,30 8,95	Perkotaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan Perdesaan	Perumahan
11.	NGEMPLAK (3.571 km ²)	1. Wedomartani 2. Umbulmartani 3. <i>Widodomartani</i> 4. Bimomartani 5. Sindumartani	12,44 6,15 6,02 4,44 6,66	Perkotaan Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan Perdesaan	Perumahan
12.	NGAGLIK (3.825 km ²)	1. Sariharjo 2. Sinduharjo 3. Minomartani 4. Sukoharjo 5. <i>Sardonoharjo</i> 6. Donoharjo	6,89 6,09 1,53 8,03 9,38 6,60	Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan	Perumahan Perumahan
13.	SLEMAN (3.132 km ²)	1. <i>Caturharjo</i> 2. Triharjo 3. Tridadi 4. Pandowoharjo 5. Trimulyo	7,44 5,78 5,04 7,27 5,79	Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan Perkotaan (Ibukota Kabupaten) Perdesaan Perdesaan	Perumahan
14.	TEMPEL (3.249 km ²)	1. Banyurejo 2. Tambakrejo 3. Sumberrejo 4. Pondokrejo 5. Mororejo 6. Margorejo 7. <i>Lumbungrejo</i> 8. Merdikorejo	4,82 3,26 2,92 3,27 3,37 5,39 3,33 6,13	Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan	
15.	TURI (4.309 km ²)	1. Bangunkerto 2. <i>Donokerto</i> 3. Girikerto 4. Wonokerto	7,03 7,41 13,07 15,58	Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan Perdesaan	
16.	PAKEM (4.384 km ²)	1. Purwobinangun 2. Candibinangun 3. Harjobinangun 4. <i>Pakembinangun</i> 5. Hargobinangun	13,48 6,36 5,52 4,18 14,30	Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan	
17.	CANGKRINGAN (4.799 km ²)	1. Wukirsari 2. <i>Argomulyo</i> 3. Glagaharjo 4. Kepuharjo 5. Umbulharjo	14,56 8,47 7,95 8,75 8,26	Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan Perdesaan Perdesaan	

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007 tentang Pengembangan Perumahan

BAB III

PROFIL KUANTITAS PENDUDUK

KABUPATEN SLEMAN

Penduduk merupakan subyek dan obyek seluruh permasalahan kehidupan sosial ekonomi dan budaya suatu masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengetahui jumlah dan komposisi penduduk, terdapat 4 (empat) masalah pokok yang berhubungan dengan penduduk, yaitu kualitas dan kuantitas, struktur dan komposisi, persebaran penduduk, dan pertumbuhan penduduk. Keempat masalah tersebut berjalan melalui suatu mekanisme alamiah yang jika tidak dilakukan antisipasi bisa semakin parah. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk karena kelahiran yang tinggi atau migrasi masuk yang tidak terkendali, dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi atau dampak di masyarakat. Adanya permukiman kumuh dan pengangguran, terutama di perkotaan, bisa menjadi contoh dari dampak yang ditimbulkan.

Keadaan penduduk yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan tingkat kualitas rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi pembangunan nasional. Isu tentang kependudukan sangat kompleks dan lintas sektoral sehingga diperlukan adanya upaya penyerasian kebijakan kependudukan. Untuk mendukung lahirnya kebijakan kependudukan yang komprehensif dibutuhkan data dan informasi kependudukan yang baik.

Data merupakan deretan informasi tentang kondisi suatu aspek. Dalam kegiatan pembangunan kualitas dan kelengkapan data menjadi faktor penting sebagai dasar dalam melakukan evaluasi maupun perencanaan pembangunan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan berwawasan kependudukan, maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan pada data dan informasi kependudukan.

Data dan informasi perkembangan kependudukan menjadi sangat penting dan strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan, baik di bidang politik, pembangunan kesehatan, pendidikan maupun bidang pertanian. Bagi dunia usaha, data kependudukan diperlukan dalam menentukan perencanaan strategis bisnis, seperti target pasar dan jumlah produksi. Data dan informasi kependudukan ini, juga dapat menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan berwawasan kependudukan.

3.1 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin. Distribusi penduduk menurut umur tertentu dikelompokkan menurut umur satu tahunan atau umur tunggal (*single age*) dan lima tahunan, namun dapat juga dikelompokkan menurut distribusi umur tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Selain pengelompokan berdasarkan distribusi umur penduduk, terdapat juga pengelompokan penduduk berdasarkan struktur umur penduduk yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar (mengikuti ketetapan WHO), yaitu penduduk usia muda (0–14 tahun), penduduk usia produktif (15–59 tahun), dan penduduk usia lanjut (60 tahun ke atas). Struktur penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk di suatu wilayah termasuk kelompok umur muda atau tua.

Parameter yang menunjukkan komposisi penduduk menurut karakteristik demografi adalah:

- Umur median (*median age*)
- Rasio jenis kelamin (*sex ratio*)
- Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*)

3.1.1 Jumlah Penduduk

Kabupaten Sleman menjadi salah satu wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki daya tarik bagi para pendatang. Salah satu potensi tersebut disebabkan oleh adanya perguruan tinggi ternama, seperti UGM, UNY, dan UIN Sunan Kalijaga; empat perguruan tinggi negeri kedinasan (STPN, AAU, MMTC, dan STTN-BATAN), serta 46 perguruan tinggi swasta, seperti UII, USD, UPN dan UAJ. Berdasarkan data SIAK Tahun 2019 seperti dalam Tabel 3.1, jumlah penduduk Kabupaten Sleman sebanyak 1.075.575 jiwa, yang terdiri atas laki-laki sebesar 532.880 jiwa atau 49,54 persen dan perempuan sebesar 542.695 jiwa atau 50,46 persen.

Berdasarkan jumlah penduduk menurut wilayah di Kabupaten Sleman pada tahun 2019, diketahui jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Depok yang mencapai 122.305 jiwa (11,37 persen), terbesar kedua adalah Kecamatan Ngaglik sebanyak 96.996 Jiwa (9,02 persen), serta terbesar ketiga adalah Kecamatan Gamping sebanyak 93.549 jiwa (8,70 persen) dan Kecamatan Mlati sebesar 92.083 jiwa (8,56 persen). Sementara itu, wilayah dengan jumlah penduduk paling rendah adalah Kecamatan Cangkringan dengan jumlah penduduk mencapai 31.309 jiwa (2,91 persen).

Kondisi jumlah penduduk menurut wilayah dapat memberikan gambaran tingkat kemajuan suatu wilayah. Suatu daerah yang memiliki daya tarik, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pendidikan, menjadi tujuan bagi para penduduk untuk migrasi ke wilayah tersebut, baik penduduk dari kabupaten lain maupun luar provinsi. Empat kecamatan dengan penduduk terpadat di Sleman tersebut (Depok, Ngaglik, Sleman, dan Mlati) merupakan wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta sehingga tumbuh pesat menjadi pusat pertumbuhan, baik pendidikan, industri, perdagangan, maupun jasa. Kemudian Kecamatan Cangkringan yang memiliki jumlah penduduk terkecil merupakan wilayah yang mempunyai fungsi khusus atau wilayah penyangga (*buffer zone*) bersama dengan Kecamatan Tempel, Turi, dan Pakem yang berada di lereng Gunung Merapi.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					
		Laki-Laki	Persen	Perempuan	Persen	Jumlah	Persen
1.	Gamping	46.560	8,74	46.989	8,66	93.549	8,70
2.	Godean	34.820	6,53	35.129	6,47	69.949	6,50
3.	Moyudan	16.671	3,13	17.005	3,13	33.676	3,13
4.	Minggir	15.849	2,97	16.736	3,08	32.585	3,03
5.	Seyegan	25.223	4,73	25.742	4,74	50.965	4,74
6.	Mlati	45.838	8,60	46.245	8,52	92.083	8,56
7.	Depok	60.480	11,35	61.825	11,39	122.305	11,37
8.	Berbah	27.094	5,08	27.695	5,10	54.789	5,09
9.	Prambanan	26.648	5,00	27.300	5,03	53.948	5,02
10.	Kalasan	40.827	7,66	41.440	7,64	82.267	7,65
11.	Ngemplak	30.926	5,80	31.511	5,81	62.437	5,80
12.	Ngaglik	48.059	9,02	48.937	9,02	96.996	9,02
13.	Sleman	34.419	6,46	35.091	6,47	69.510	6,46
14.	Tempel	26.957	5,06	27.388	5,05	54.345	5,05
15.	Turi	18.604	3,49	18.670	3,44	37.274	3,47
16.	Pakem	18.480	3,47	19.108	3,52	37.588	3,49
17.	Cangkringan	15.425	2,89	15.884	2,93	31.309	2,91
KABUPATEN SLEMAN		532.880	100	542.695	100	1.075.575	100

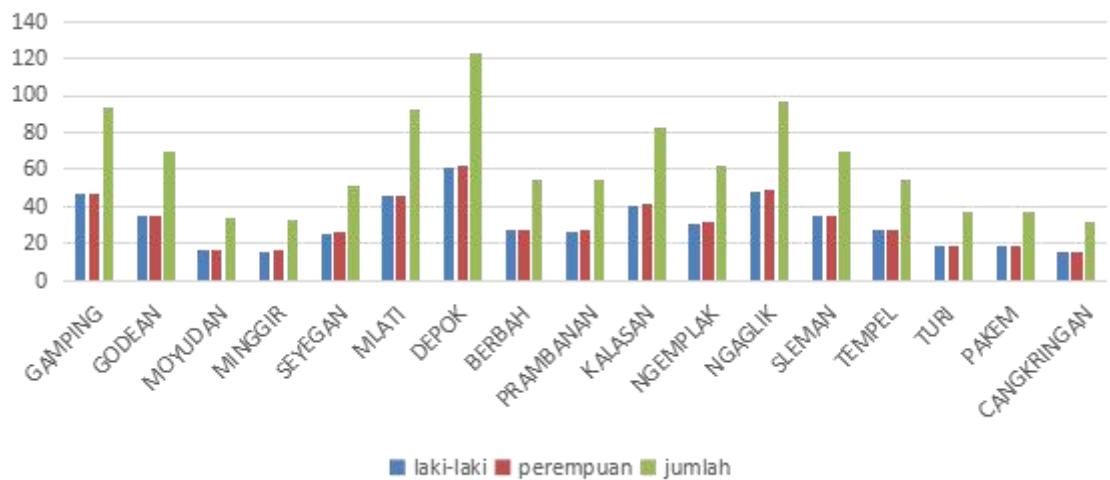
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.2 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk secara paralel berkaitan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan individu, keseimbangan dengan lingkungan, dan kekayaan spiritual. Secara realistik hal itu sulit dicapai oleh suatu masyarakat, tanpa menghubungkannya dengan ketiga aspek tadi. Ketiga aspek tersebut mempunyai hubungan sebab akibat dengan pola perubahan penduduk di suatu wilayah. Sekalipun pemerintah mampu mengatasi tingginya tingkat fertilitas, apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumberdaya alam dan manusia, maka jumlah penduduk yang diinginkan dan memenuhi ketiga aspek tersebut semakin sulit untuk dicapai.

Jumlah penduduk yang besar dapat membawa keuntungan dan masalah yang rumit bagi suatu daerah. Keuntungan yang dapat diambil adalah apabila penduduk yang banyak tersebut mempunyai kualitas yang baik, sehingga dapat diandalkan menjadi pelaku pembangunan. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar akan menjadi masalah, kalau penduduk tersebut mempunyai kualitas yang rendah dan penyebaran yang tidak merata sehingga menjadi beban pembangunan. Selain jumlah penduduk, komposisi penduduk memegang peranan yang sangat penting dalam upaya untuk menciptakan stabilitas kehidupan dalam masyarakat suatu wilayah. Ukuran yang digunakan dalam komposisi penduduk antara lain struktur umur, rasio atau angka ketergantungan, dan rasio jenis kelamin. Ukuran-ukuran tersebut sering digunakan sebagai alat evaluasi kebijakan program pembangunan, terutama di bidang kependudukan. Komposisi penduduk juga mencerminkan tingkat kemajuan suatu bangsa atau wilayah. Sebagai contoh, suatu negara atau wilayah dikatakan maju bila struktur umur penduduknya sebagian besar pada usia produktif (15-64 tahun), atau bentuk piramida penduduknya cenderung pada kelompok umur 15-19 tahun sampai kelompok umur 60-64 tahun.

**Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019**



Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

Komposisi penduduk juga mencerminkan tingkat kemajuan suatu wilayah. Sebagai contoh, suatu wilayah dikatakan maju bila struktur umur penduduknya

sebagian besar berada pada usia produktif (15-64 tahun) atau bentuk piramida penduduknya cenderung pada kelompok umur 15-19 tahun sampai kelompok umur 60 - 64 tahun. Di Kabupaten Sleman berdasarkan Data SIAK 2019 diketahui jumlah penduduk dalam kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) sebanyak 739.533 jiwa (68,76 persen), penduduk usia muda (usia 0-14 tahun) sebanyak 229.218 jiwa (21,3 persen), dan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) sebanyak 106.824 jiwa (9,93 persen).

Distribusi umur penduduk pada kenyataannya sering memberikan gambaran tentang riwayat mortalitas dan fertilitas serta rata-rata usia penduduk suatu wilayah. Di samping itu, juga merefleksikan beban ketergantungan sekelompok usia tertentu terhadap kelompok lainnya, dalam hal ini beban tanggungan usia muda atau anak-anak (usia 0-14 tahun), dan beban tanggungan tua atau usia lanjut (usia 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Informasi tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin penting diketahui, terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Selain itu, jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai dengan kelompok umur penduduk.

Pada Tabel 3.2 di bawah ini, data SIAK 2019 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Sleman untuk semua jenis kelamin terbanyak adalah pada kelompok umur 35-39 tahun, yaitu sebesar 87.009 jiwa atau 8,09 persen. Jumlah terbanyak kedua adalah kelompok umur 40-44 tahun sebesar 85.355 jiwa atau 7,94 persen, dan ketiga terbanyak adalah kelompok umur 45-49 tahun sebanyak 80.093 jiwa atau 7,45 persen.

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2019**

No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk					
		Laki-Laki	Persen	Perempuan	Persen	Jumlah	Persen
1.	0 – 4	34.578	6.49	32.630	6.01	67.208	6.25
2.	5 – 9	41.026	7.70	39.042	7.19	80.068	7.44
3.	10 – 14	42.100	7.90	39.842	7.34	81.942	7.62
4.	15 – 19	37.309	7.00	35.769	6.59	73.078	6.79
5.	20 – 24	38.099	7.15	36.491	6.72	74.590	6.93
6.	25 – 29	37.046	6.95	36.929	6.80	73.975	6.88
7.	30 – 34	35.966	6.75	37.319	6.88	73.285	6.81
8.	35 – 39	43.302	8.13	43.707	8.05	87.009	8.09
9.	40 – 44	42.337	7.94	43.018	7.93	85.355	7.94
10.	45 – 49	39.701	7.45	40.392	7.44	80.093	7.45
11.	50 – 54	37.311	7.00	39.329	7.25	76.640	7.13
12.	55 – 59	29.529	5.54	32.785	6.04	62.314	5.79
13.	60 – 64	25.537	4.79	27.657	5.10	53.194	4.95
14.	65 – 69	18.183	3.41	19.236	3.54	37.419	3.48
15.	70 – 74	11.184	2.10	14.025	2.58	25.209	2.34
16.	75 - 79	9.749	1.83	11.203	2.06	20.952	1.95
17.	> 80	9.923	1.86	13.321	2.45	23.244	2.16
KABUPATEN SLEMAN		532.880	100	542.695	100		100

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.3 Umur Median (*Median Age*)

Umur median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemasatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Berdasarkan umur median ini, penduduk di suatu daerah dapat dikategorikan:

- Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun
- Penduduk *intermediate*, jika umur median antara 20-30 tahun
- Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun

Umur median penduduk Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 3.3 yang didasarkan pada data SIAK 2019. Data memperlihatkan bahwa umur median penduduk tercatat 35 tahun, yang berarti bahwa setengah dari penduduk Kabupaten Sleman berusia di bawah 35 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 35 tahun. Umur median ini terletak di antara 30–40 tahun sehingga penduduk Kabupaten Sleman dikategorikan sebagai penduduk tua. Pada masa mendatang isu tentang penduduk lanjut usia akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Sleman karena secara absolut maupun relatif jumlahnya akan semakin meningkat. Jika tidak diantisipasi dari saat ini dengan melahirkan kebijakan kependudukan, utamanya dalam hal penanganan terhadap penduduk lanjut usia, yang akan menjadi masalah di kemudian hari.

Terkait dengan penduduk usia lanjut di Kabupaten Sleman, jumlahnya saat ini cukup besar dan menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data SIAK 2019, proporsi jumlah penduduk lansia di Kabupaten Sleman mencapai 9,93 persen atau sebanyak 106.824 jiwa. Menurut wilayah, diketahui jumlah lansia paling banyak ada di Kecamatan Depok yang mencapai 11.087 jiwa atau 11,50 persen dari total penduduk lansia. Berikutnya adalah Kecamatan Ngaglik dengan jumlah lansia mencapai 8.510 jiwa atau 8,82 persen dan Kecamatan Kalasan sebanyak 7.346 jiwa atau 7,62 persen. Wilayah dengan jumlah lansia paling rendah adalah Kecamatan Cangkringan yang tercatat sebanyak 3.400 jiwa atau 3,53 persen dari total lansia.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019

No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)			Kumulatif (fx)	Persen Kumulatif
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1.	0 - 4	34.578	32.630	67.208	67.208	6,25
2.	05-09	41.026	39.042	80.068	147.276	1,69
3.	10-14	42.100	39.842	81.942	229.218	2,31
4.	15 - 19	37.309	35.769	73.078	302.296	2,11
5.	20 - 24	38.099	36.491	74.59	376.886	3,04
6.	25 - 29	37.046	36.929	73.975	450.861	4,92
7.	30 - 34	35.966	37.319	73.285	524.146	4,73
8.	35 - 39	43.302	43.707	87.009	611.155	5,82
9.	40 - 44	42.337	43.018	85.355	696.510	6,76
10.	45 - 49	39.701	40.392	80.093	776.603	7,20
11.	50 - 54	37.311	39.329	76.64	853.243	7,33
12.	55 - 59	29.529	32.785	62.314	915.557	8,12
13.	60 - 64	25.537	27.657	53.194	968.751	9,07
14.	65 - 69	18.183	19.236	37.419	1,006.170	9,55
15.	70 - 74	11.184	14.025	25.209	1,031.379	9,89
16.	75 - 79	9.749	11.203	20.952	1,052.331	9,84
17.	≥ 80	9.923	13.321	23.244	1,075.575	100
KABUPATEN SLEMAN		532.880	542.695	1,075.575		

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Lansia (Usia ≥ 65 Tahun) Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Kelompok Umur Penduduk Lansia														
		65 - 69			70 - 74			75 - 79			> 80 tahun			Jumlah		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Gamping	1.584	1.616	3.200	852	1.018	853	696	817	1,513	807	981	1,788	2,357	1,801	4,157
2	Godean	1.309	1.363	2.672	775	913	1,688	757	772	1,529	783	974	1,757	2,316	2,660	4,977
3	Moyudan	703	882	1585	547	643	1,190	482	559	1,041	503	655	1,158	2,235	2,739	4,974
4	Minggir	687	776	1463	511	703	1,214	482	573	1,055	496	688	1,184	2,176	2,740	4,916
5	Seyegan	892	952	1844	593	727	1,320	551	624	1,175	581	735	1,316	2,617	3,038	5,655
6	Mlati	1.488	1.51	2.998	878	1.04	879	684	849	1,533	732	984	1,716	2,295	1,836	4,131
7	Depok	2,105	2,136	4241	1,271	1,399	2,670	1,024	1,068	2,092	989	1,095	2,084	5,389	5,698	11,087
8	Berbah	838	895	1733	480	625	1,105	418	477	895	367	602	969	2,103	2,599	4,702
9	Prambanan	933	952	1885	606	783	1,389	523	598	1,121	544	801	1,345	2,606	3,134	5,740
10	Kalasan	1,261	1,281	2542	810	1,000	1,810	677	731	1,408	657	929	1,586	3,405	3,941	7,346
11	Ngemplak	1,045	1,085	2130	609	780	1,389	530	667	1,197	646	907	1,553	2,830	3,439	6,269
12	Ngaglik	1516	1593	3109	921	1166	2087	780	858	1638	718	958	1676	3935	4575	8510
13	Sleman	1,156	1,230	2386	696	898	1,594	620	655	1,275	537	741	1,278	3,009	3,524	6,533
14	Tempel	1,024	988	2012	647	787	1,434	568	614	1,182	511	745	1,256	2,750	3,134	5,884
15	Turi	632	669	1301	403	513	916	393	426	819	399	515	914	1,827	2,123	3,950
16	Pakem	614	679	1293	406	610	1,016	374	517	891	436	579	1,015	1,830	2,385	4,215
17	Cangkringan	533	629	1162	334	420	754	296	398	694	358	432	790	1,521	1,879	3,400
KABUPATEN SLEMAN		13,943	14,751	28,695	11,339	11,969	23,308	9,855	11,203	21,058	10,064	13,321	23,385	45,201	51,245	96,446

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.4 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Salah satu aspek dari komposisi penduduk adalah perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang biasanya disebut dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*). *Sex ratio* adalah angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Rasio jenis kelamin dengan angka lebih besar dari 100 berarti di daerah tersebut lebih banyak penduduk laki-laki, begitu pula sebaliknya, jika rasio jenis kelaminnya kurang dari 100 berarti penduduk perempuannya lebih banyak.

Hubungan antara seks rasio dengan perbandingan jumlah laki-laki terhadap jumlah perempuan dalam masyarakat dan partisipasi angkatan kerja perempuan telah diinterpretasikan sebagai akibat dari kurangnya prospek untuk menikah bagi perempuan ketika mitra potensial kurang tersedia. Hipotesa tentang seks rasio (Guttentag & Secord, 1983; Heer & Grossnard-Shechtman, 1981) dan teori pencarian perkawinan (*marital search theory*) (Oppenheimer, 1988) memprediksi bahwa ketersediaan pasangan berpengaruh besar dalam perjalanan untuk masuk ke jenjang perkawinan. Biasanya, ketersediaan pasangan diukur dengan rasio jenis kelamin. Semakin rendah rasio jenis kelamin (jumlah laki-laki untuk setiap 100 perempuan), semakin besar pula kemungkinan wanita pergi bekerja untuk memperoleh upah.

Bowen dan Finegan (1969) mengemukakan hipotesa *marriage squeeze hypothesis*, yaitu “wanita akan sangat berharga sebagai isteri dan ibu dan diperlakukan lebih baik pada kondisi rasio seks tinggi”. Namun, semakin banyak bukti yang menjelaskan, bahwa perempuan (termasuk ibu dan isteri) akan dihargai dan kesempatan hidupnya akan lebih baik bila mereka aktif secara ekonomi di luar rumah tangga. Kondisi ini adalah apa yang disebut “hipotesa partisipasi angkatan kerja,” (*labor force participation hypothesis*) yang memandang partisipasi angkatan kerja perempuan sebagai salah satu variabel yang menentukan rasio jenis kelamin. Bertentangan dengan hipotesa sebelumnya, pendekatan ini diawali dengan partisipasi angkatan kerja perempuan sebagai salah satu penyebab variasi harga hidup perempuan dan laki-laki, yaitu seks rasio. Dalam pandangan ini, orang yang menerima porsi yang lebih besar atas sumberdaya diharapkan untuk menjadi

tulang punggung ekonomi keluarga. Orang tua cenderung menghargai anak-anak mereka yang diharapkan menjadi produktif pada saat dewasa dan mengambil alih perusahaan keluarga atau memperoleh pendapatan bagi keluarga

Para pengusung pendekatan *Marriage Squeeze Hypothesis* menyatakan bahwa ketika probabilitas seorang perempuan untuk menemukan seorang suami berkurang atau menurun, maka kebutuhan untuk mandiri menjadi meningkat. Lebih jauh, mereka menegaskan bahwa kondisi perempuan dalam kondisi ini akan memiliki posisi yang lebih rendah dalam hubungannya dengan laki-laki, karena laki-laki tidak akan kesulitan mencari mitra lain. Kondisi perempuan yang seperti ini memberikan dorongan bagi perempuan untuk merencanakan karier, mencari pekerjaan dan manjadikannya seorang feminis. Sebaliknya, jika terdapat lebih banyak laki-laki daripada perempuan, probabilitas laki-laki dalam mencari pasangan mengalami penurunan. Perempuan jika lebih dihargai sebagai isteri dan ibu, mereka akan hanya mempunyai sedikit motivasi untuk bekerja di luar rumah dan juga tingginya rasio seks ini (jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan) akan menyebabkan lebih sedikit kesempatan dalam pasar tenaga kerja bagi perempuan.

Ada beberapa teori yang mendukung *Marriage Squeeze Hypothesis*, yaitu teori-teori tentang bagaimana ketersediaan pasangan berpengaruh terhadap perkawinan, antara lain seperti yang telah disebutkan di atas tentang hipotesa rasio jenis kelamin (*sex ratio hypothesis*) dan teori pencarian perkawinan (*the marital search theory*). Teori *marital search* hanya mempertimbangkan bagaimana ketidakseimbangan dalam rasio seks memaksa perkawinan. Teori ini memprediksi bahwa semakin tinggi rasio seks, semakin tinggi kemungkinan perempuan untuk menikah, dan kemungkinan laki-laki untuk menikah yang lebih rendah. Sebaliknya *sex ratio hypothesis*, berpendapat bahwa bagaimana ketidakseimbangan rasio jenis kelamin, berkaitan dengan ketidaksetaraan gender, mempengaruhi perkawinan. Teori ini mengasumsikan bahwa jumlah dari gender yang lebih sedikit, baik laki-laki maupun perempuan memiliki posisi tawar yang menguntungkan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan karena mereka memiliki pasangan potensial (Guttentag & Secord, 1983; Heer & Grossbard-Shechtman, 1981). Informasi rasio jenis kelamin dinilai penting karena akan berguna untuk

pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

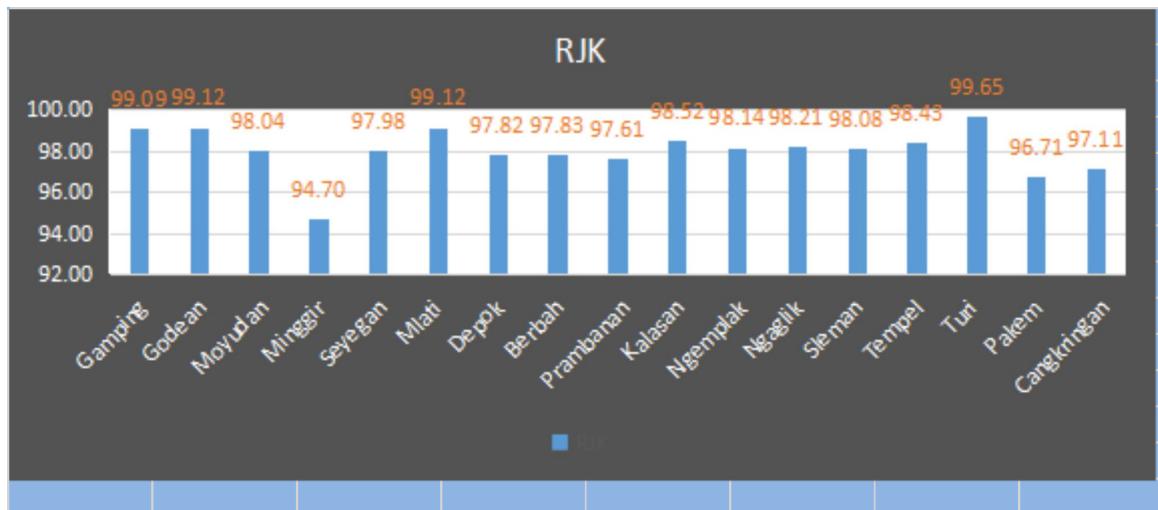
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019

No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin (RJK)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	0 - 4	34.578	32.630	67.208	1,06
2.	5-Jan	41.026	39.042	80.068	1,05
3.	Oct-14	42.100	39.842	81.942	1,06
4.	15 - 19	37.309	35.769	73.078	1,04
5.	20 - 24	38.099	36.491	74.59	1,04
6.	25 - 29	37.046	36.929	73.975	1,00
7.	30 - 34	35.966	37.319	73.285	0,96
8.	35 - 39	43.302	43.707	87.009	0,99
9.	40 - 44	42.337	43.018	85.355	0,98
10.	45 - 49	39.701	40.392	80.093	0,98
11.	50 - 54	37.311	39.329	76.64	0,95
12.	55 - 59	29.529	32.785	62.314	0,90
13.	60 - 64	25.537	27.657	53.194	0,92
14.	65 - 69	18.183	19.236	37.419	0,95
15.	70- 74	11.184	14.025	25.209	0,80
16.	75 - 79	9.749	11.203	20.952	0,87
17.	<u>>80</u>	9.923	13.321	23.244	0,74
KABUPATEN SLEMAN		532.880	542.695	1075.575	0,98

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

Dari Tabel 3.5 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Sleman berdasarkan data SIAK tahun 2019 secara total diketahui sejumlah 1.075.575 jiwa, dengan perincian jumlah penduduk laki-laki mencapai 532.880 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 542.695 jiwa. Angka *sex ratio* diketahui 98 persen yang berarti disetiap 100 orang penduduk perempuan akan terdapat 98 orang penduduk laki-laki. Kondisi ini berlangsung sejak tahun 2018.

Jika diamati menurut kelompok umur diketahui antara 0-29 tahun memiliki angka rasio jenis kelamin diatas 100, sedangkan kelompok umur 30 tahun keatas nilainya dibawah 100. Nilai terendah ada pada kelompok umur diatas 80 tahun, semakin ke atas kelompok umur nya angkanya semakin naik kecuali pada kisaran umur 65-69 tahun angkanya 95 sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok umur 60-64 dengan angka 92.



Gambar 3.2 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2019

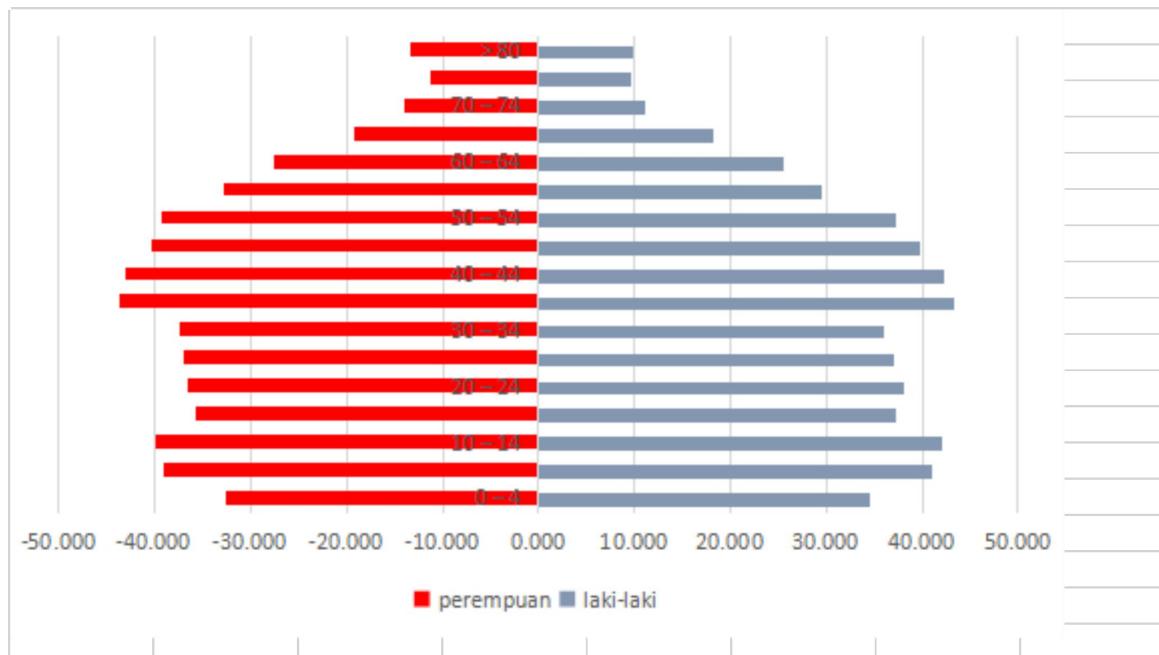
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

Jika dilihat rasio jenis kelamin berdasarkan wilayah (kecamatan) seperti terlihat pada Gambar 3.2 dapat diketahui bahwa kecamatan dengan rasio jenis kelamin paling tinggi pada tahun 2019 adalah Kecamatan Turi yakni mencapai 99,65 persen. Berikutnya adalah Kecamatan Mlati dan Godean yang mencapai 99,12 persen. Sementara wilayah dengan rasio jenis kelamin paling rendah adalah Kecamatan Minggir mencapai 94,70 persen. Pada tahun ini semua kecamatan mempunyai angka dibawah 100 untuk rasio jenis kelamin, sama seperti tahun 2018.

3.1.5 Piramida Penduduk

Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk biasanya digunakan untuk menggambarkan tingkat kemajuan suatu negara atau wilayah.

Dengan melihat piramida penduduk, dapat diketahui struktur penduduk suatu wilayah apakah termasuk dalam struktur penduduk muda, dewasa, dan tua. Dalam menyusun berbagai macam kebijakan bidang kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi, struktur penduduk tersebut menjadi salah satu dasarnya. Pada suatu negara berkembang misalnya, biasanya bentuk piramida penduduknya berbentuk kerucut. Dimana fertilitas dan mortalitasnya tinggi, sehingga proporsi penduduk usia 0-4 tahun sangat tinggi, kemudian secara kontinyu mengecil pada kelompok umur di atasnya. Sebaliknya yang terjadi pada negara-negara maju yang tingkat kesejahteraan penduduknya lebih baik, memiliki bentuk piramida hampir menyerupai bentuk tabung atau mulai mengecil pada kelompok umur muda sampai 0-4 tahun. Bentuk ini berarti angka fertilitas dan mortalitasnya sangat kecil, sedangkan penduduk usia kerjanya besar. Dengan demikian tingkat kesejahteraan penduduknya sangat baik, karena beban ketergantungan penduduknya sangat kecil.



Gambar 3.3 Piramida Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2019

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

Sebagaimana ditunjukkan oleh bentuk piramida penduduk pada Gambar 3.3, penduduk Kabupaten Sleman 2019 mengalami dinamika relatif cepat, dimana

penduduk dewasa terlihat menggembung yaitu mulai usia 35-39 sampai usia 50-54. Selanjutnya menurun lagi namun menggembung di usia puncak yaitu diatas 80 tahun. Adanya bonus demografi sudah dapat terlihat pada piramida penduduk tahun ini dimana kelompok usia produktif mendominasi struktur umur penduduk di Kabupaten Sleman, yang jumlahnya mencapai 15-64 tahun yang besarnya mencapai 739.533 jiwa (68,76 persen).

Dasar piramida, yaitu usia 0-4 tahun, lebih rendah jumlahnya dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu usia 5-9 tahun, dan ini dapat menjadi petunjuk bahwa Kabupaten Sleman mengalami penurunan fertilitas. Besarnya jumlah penduduk kelompok umur 30-49 tahun dibanding kelompok umur 25-29 tahun, dapat menjadi indikasi bahwa terjadi migrasi masuk ke Kabupaten Sleman yang cukup tinggi. Sementara itu, kelompok umur lansia menunjukkan kecederungan yang semakin meningkat sehingga menciptakan fenomena *ageing population* di Sleman. Proporsi kelompok lansia di Kabupaten Sleman saat ini mencapai 106.824 jiwa atau 9,93 persen.

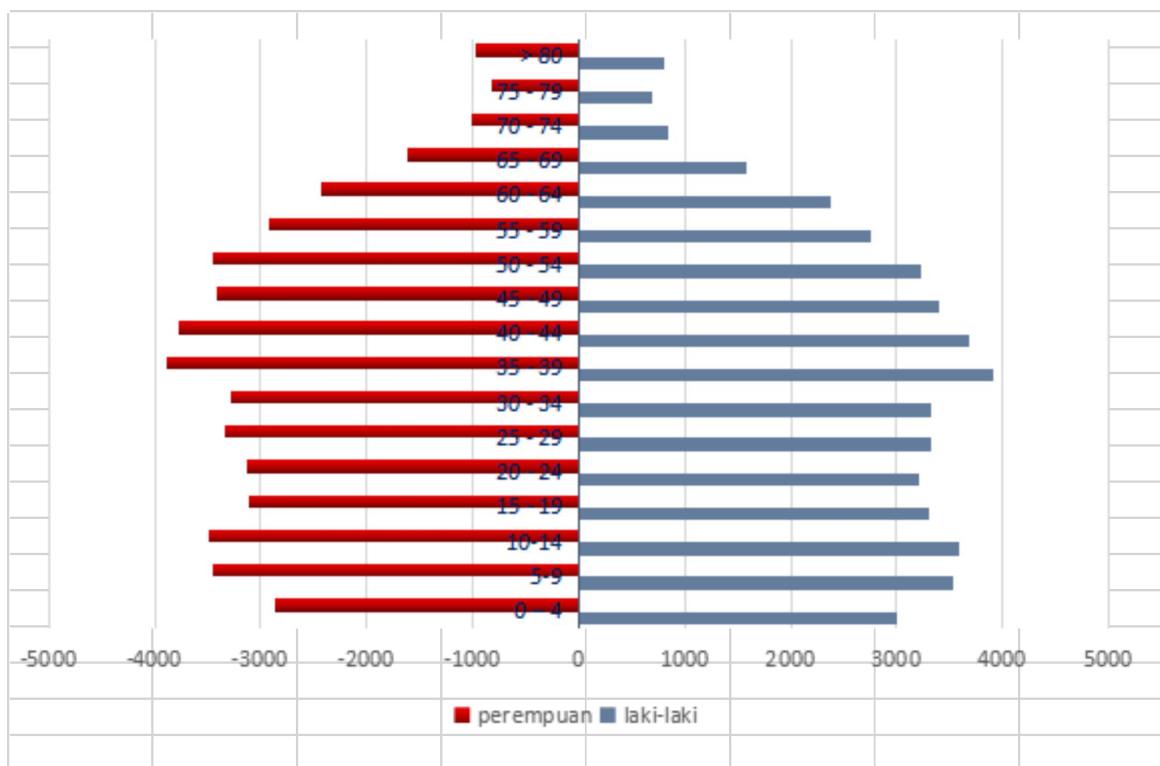
Piramida diatas juga menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sleman didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 35-39 tahun yang mencapai 87.009 jiwa (8,09 persen). Selain itu penduduk di rentang usia 40 – 49 tahun juga mendominasi jumlah penduduk yang ada. Komposisi ini juga menunjukkan bahwa kedepan nanti, penduduk Kabupaten Sleman akan semakin cepat mengarah pada struktur penduduk tua. Sementara jumlah penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 67.208 jiwa atau 6,25 persen yang mengindikasikan terjadinya penurunan tingkat kelahiran di Kabupaten Sleman. Sedangkan jumlah penduduk usia 5-9 tahun jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk umur 0-4 tahun yakni mencapai 80.068 jiwa atau 7,44 persen diperkirakan karena terjadinya penurunan tingkat kematian bayi.

3.1.5.1 Piramida Penduduk Kecamatan Gamping

Penduduk Kecamatan Gamping tahun 2019 mencapai 93.549 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 65.245 jiwa atau 69,74 persen. Sementara jumlah

penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 28.304 jiwa atau 30,26 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Gamping mengalami penurunan.

Piramida Kecamatan Gamping (Gambar 3.4) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Gamping didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 35-39 tahun yang mencapai 7.802 jiwa (8,34 persen). Dibawahnya adalah kelompok umur 40-44 tahun yang mencapai 7.464 (7,98 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Gamping mencapai 8.371 jiwa atau 8,95 persen, lebih rendah daripada angka Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.



Gambar 3.4 Piramida Penduduk Kecamatan Gamping Berdasarkan Tahun 2019

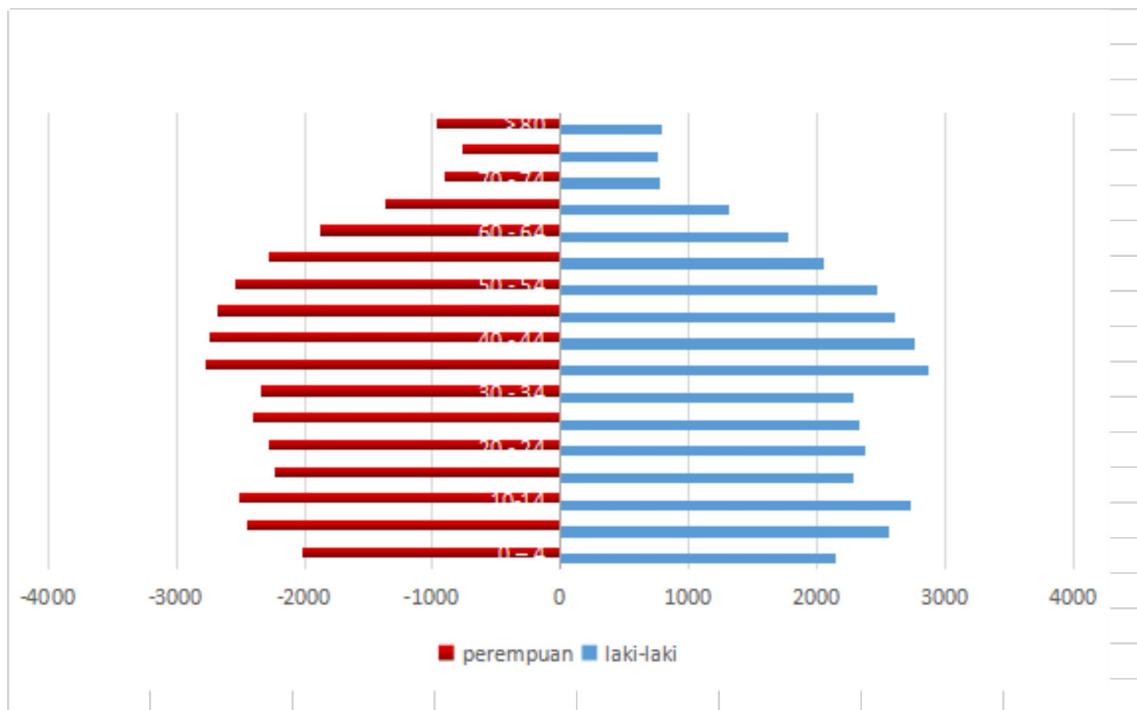
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.5.2 Piramida Penduduk Kecamatan Godean

Penduduk Kecamatan Godean tahun 2019 mencapai 69.949 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 47.916 jiwa atau 68,50 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 22.033 jiwa atau 31,49 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Godean mengalami penurunan.

Piramida Kecamatan Godean (Gambar 3.5) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Godean didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 35-39 tahun yang mencapai 5.634 jiwa (8,05 persen). Selanjutnya adalah kelompok umur 40-44 tahun mencapai 5.485 (7,84 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Godean mencapai 7.646 jiwa atau

10,93 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.



Gambar 3.5 Piramida Penduduk Kecamatan Godean Tahun 2019

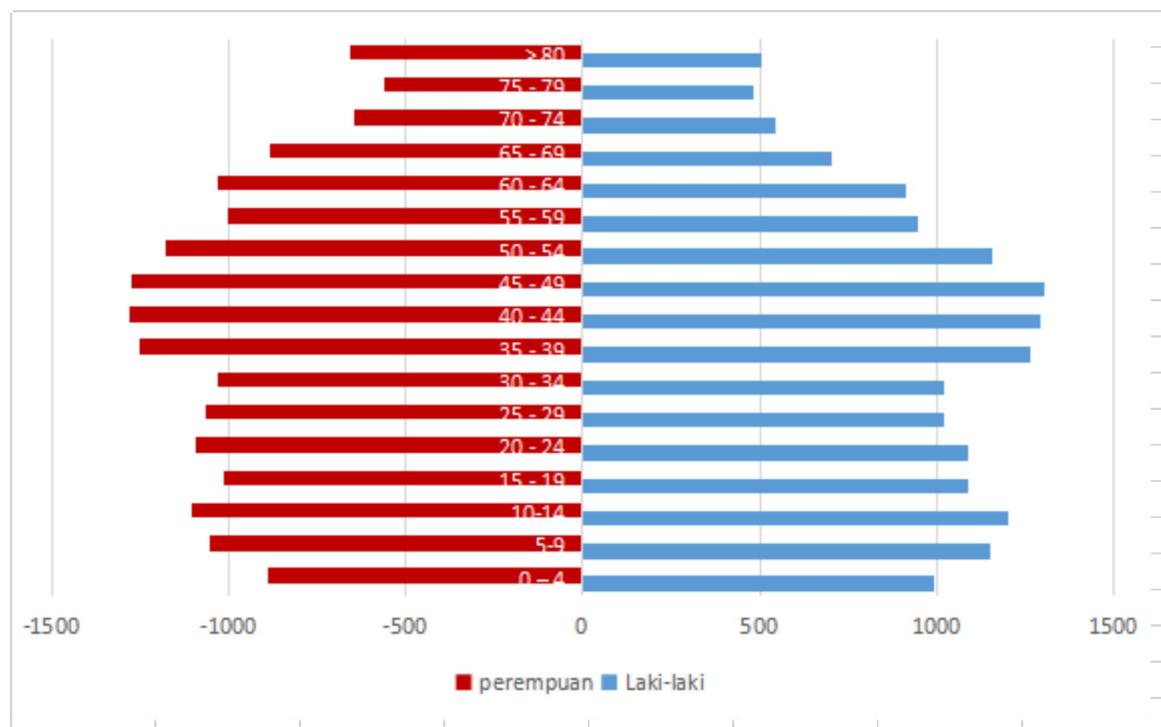
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.5.3 Piramida Penduduk Kecamatan Moyudan

Penduduk Kecamatan Moyudan tahun 2019 mencapai 33.676 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 22.309 jiwa atau 66,25 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 11.367 jiwa atau 33,75 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Moyudan mengalami penurunan.

Piramida Kecamatan Moyudan (Gambar 3.6) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Moyudan didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 45-49 tahun yang mencapai 2.580 jiwa (7,66 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 40-44 tahun sejumlah 2.568 (7,63 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Moyudan mencapai 4.974 jiwa atau

14,77 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.



Gambar 3.6 Piramida Penduduk Kecamatan Moyudan Tahun 2019

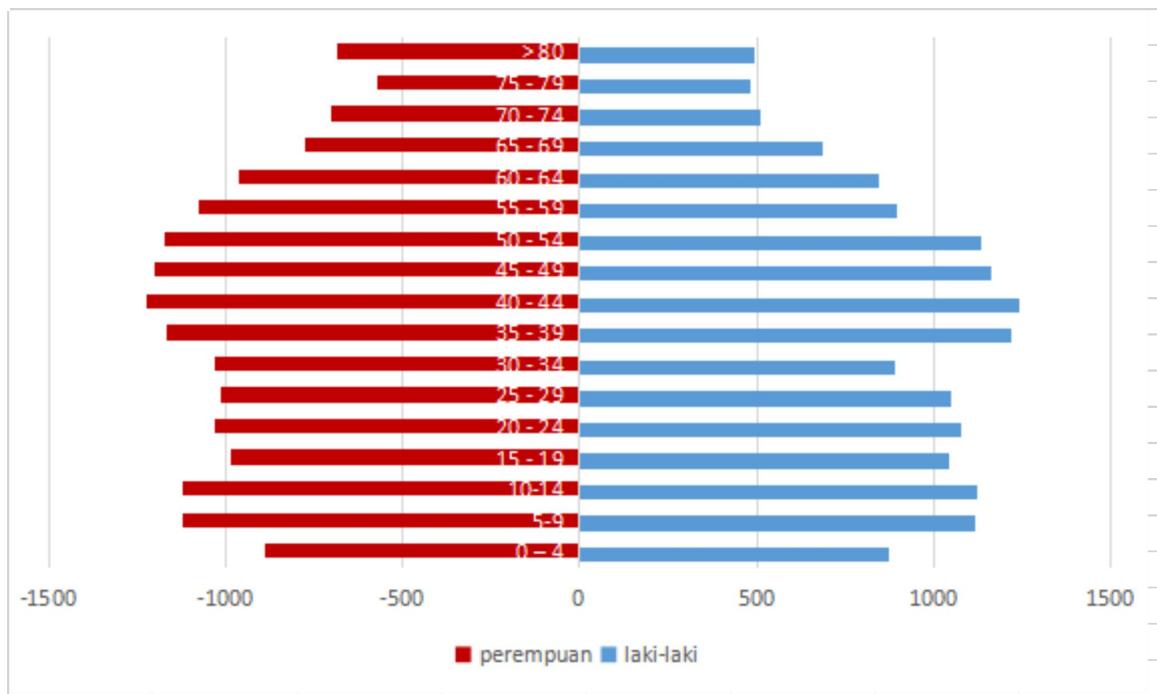
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.5.4 Piramida Penduduk Kecamatan Minggir

Penduduk Kecamatan Minggir tahun 2019 mencapai 32.585 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 21.430 jiwa atau 65,62 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 11.155 jiwa atau 34,23 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Minggir mengalami penurunan.

Piramida Kecamatan Minggir (Gambar 3.7) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Minggir didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 2.465 jiwa (7,56 persen). Selanjutnya adalah kelompok usia 35-39 tahun sejumlah 2.397 (7,33 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Minggir mencapai 4.916 jiwa atau 15,09

persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.



Gambar 3.7 Piramida Penduduk Kecamatan Minggir Tahun 2019

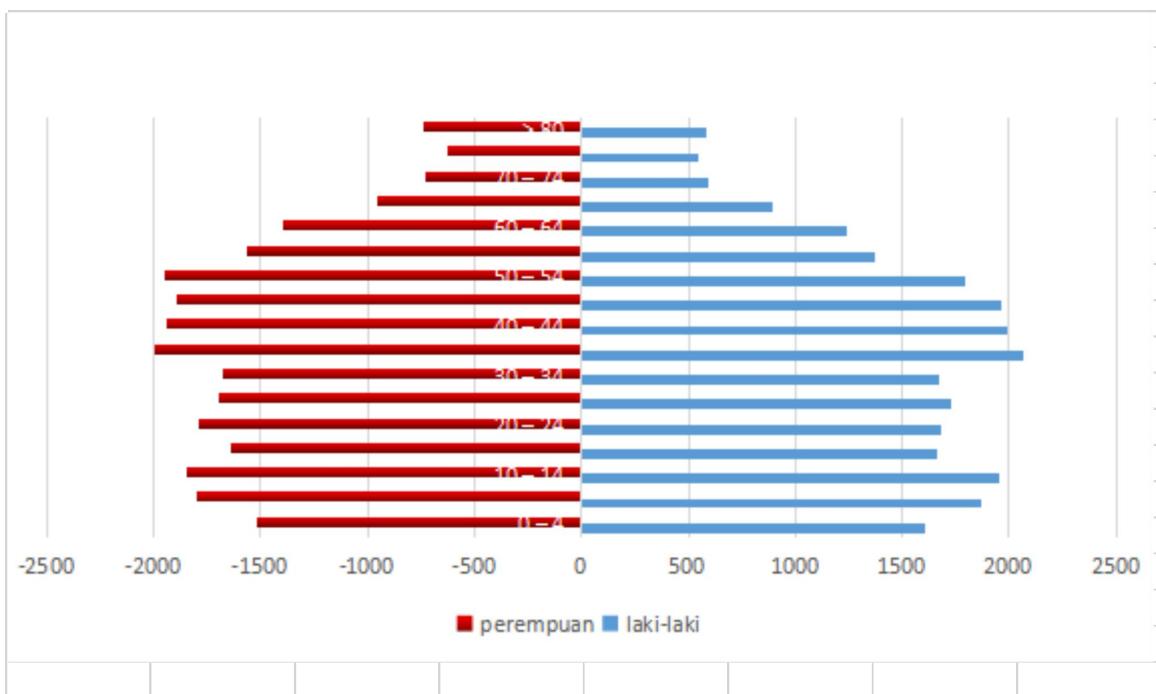
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.5.5 Piramida Penduduk Kecamatan Seyegan

Penduduk Kecamatan Seyegan tahun 2019 mencapai 50.965 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 34.711 jiwa atau 68,11 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 16.254 jiwa atau 31,89 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Seyegan mengalami penurunan.

Piramida Kecamatan Seyegan (Gambar 3.8) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Seyegan didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 35-39 tahun yang mencapai 4.062 jiwa (7,97 persen). Selanjutnya kelompok usia 40-44 sejumlah 3.928 (7,71 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Seyegan mencapai 5.655 jiwa atau 11,09 persen,

lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.



Gambar 3.8 Piramida Penduduk Kecamatan Seyegan Tahun 2019

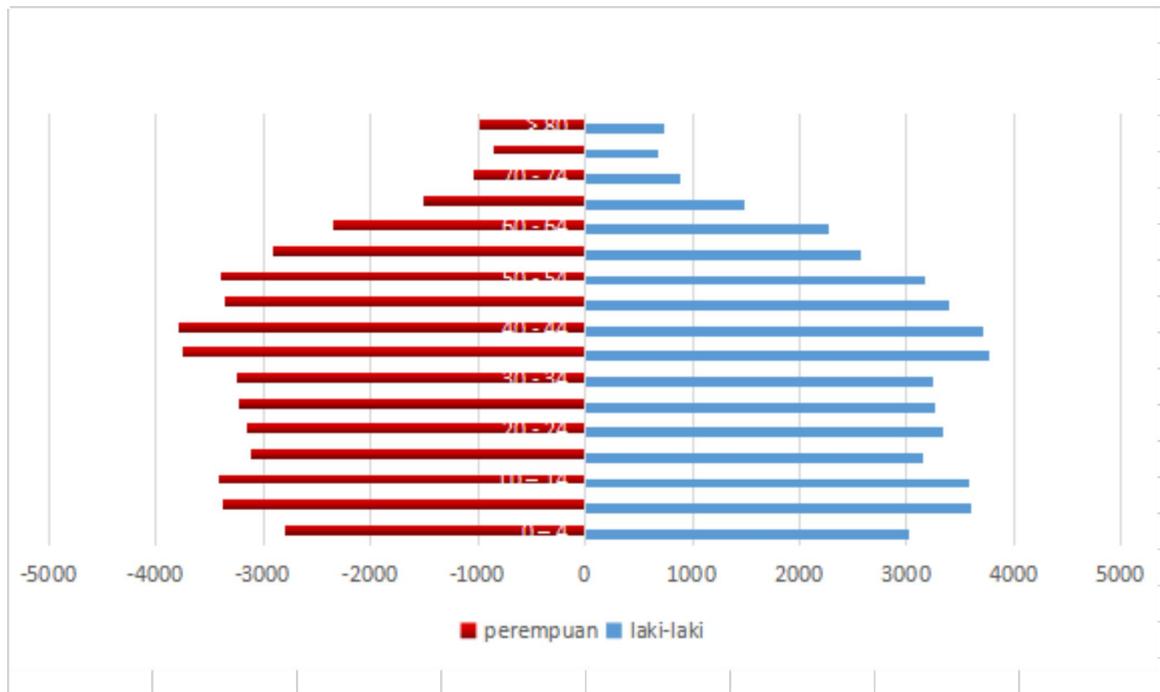
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.5.6 Piramida Penduduk Kecamatan Mlati

Penduduk Kecamatan Mlati tahun 2019 mencapai 92.083 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 64.134 jiwa atau 69,65 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 27.949 jiwa atau 30,35 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Mlati mengalami penurunan.

Piramida Kecamatan Mlati (Gambar 3.9) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Mlati didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 35-39 tahun yang mencapai 7.518 jiwa (8,16 persen). Selanjutnya kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 7.506 jiwa (8,15 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Mlati mencapai 8.165 jiwa atau 8,87

persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.



Gambar 3.9 Piramida Penduduk Kecamatan Mlati Tahun 2019

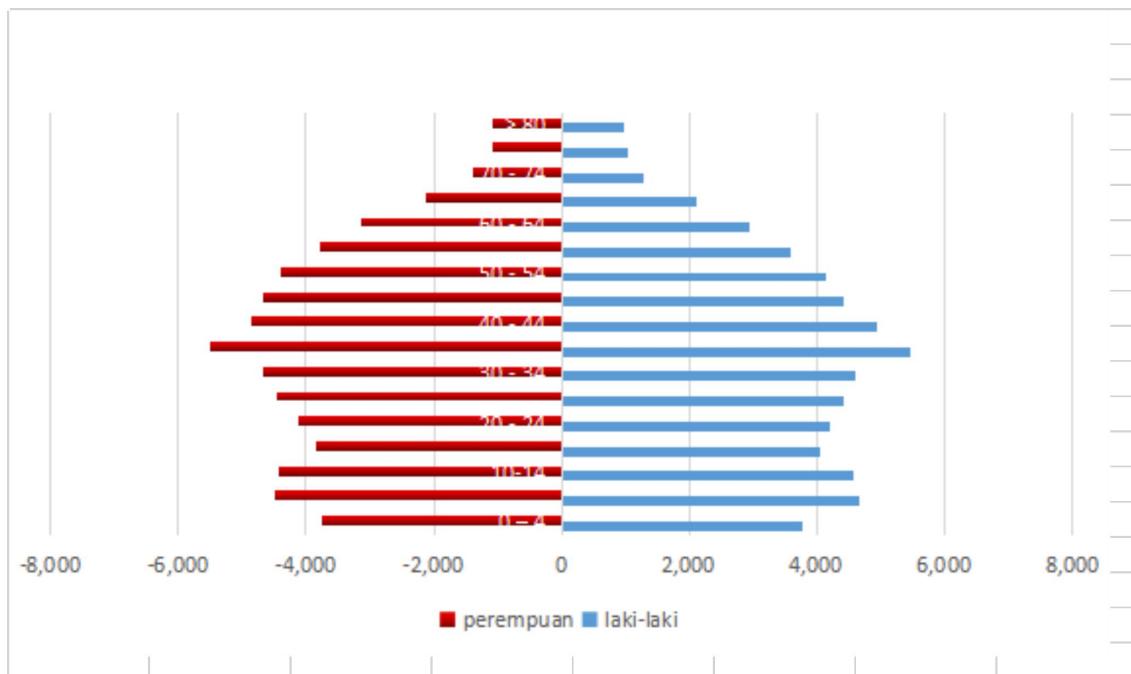
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.5.7 Piramida Penduduk Kecamatan Depok

Penduduk Kecamatan Depok tahun 2019 mencapai 122.937 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 86.188 jiwa atau 70,11 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 36.749 jiwa atau 29,89 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Depok mengalami penurunan.

Piramida Kecamatan Depok (Gambar 3.10) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Depok didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 35-39 tahun yang mencapai 10.969 jiwa (8,92 persen). Selanjutnya penduduk usia 40-44 tahun sejumlah 9.807 jiwa (7,98 persen).

Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Depok mencapai 11.087 jiwa atau 9,02 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.



Gambar 3.10 Piramida Penduduk Kecamatan Depok Tahun 2019

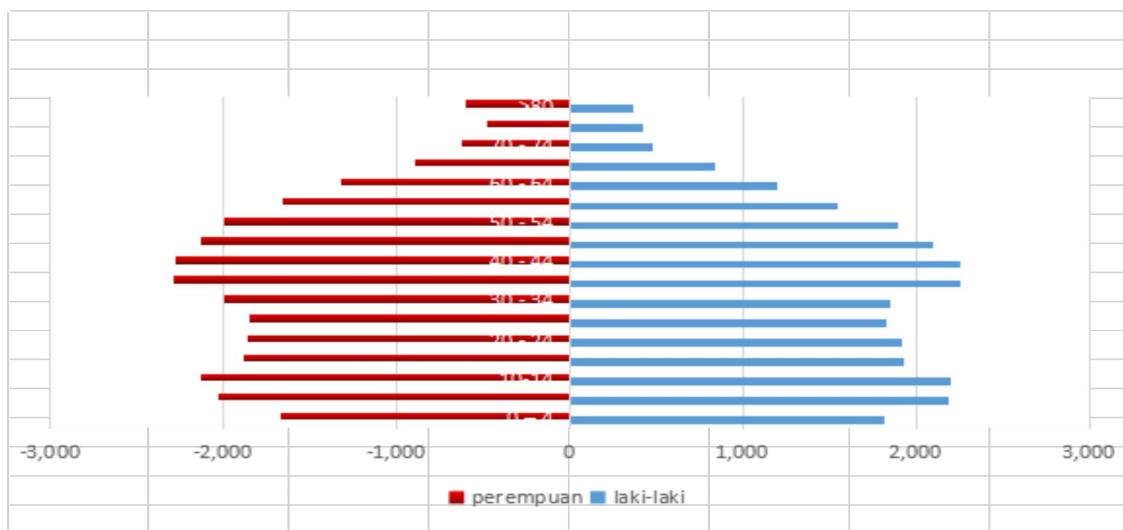
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.5.8 Piramida Penduduk Kecamatan Berbah

Penduduk Kecamatan Berbah tahun 2019 mencapai 54.789 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 38.048 jiwa atau 69,44 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 16.741 jiwa atau 30,56 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Berbah mengalami penurunan.

Piramida Kecamatan Berbah (Gambar 3.11) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Berbah didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 35-39 tahun yang mencapai 4.547 jiwa (8,3 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 40-44 tahun sejumlah 4.534 jiwa (8,28

persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Berbah mencapai 4.702 jiwa atau 8,58 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.



Gambar 3.11 Piramida Penduduk Kecamatan Berbah Tahun 2019

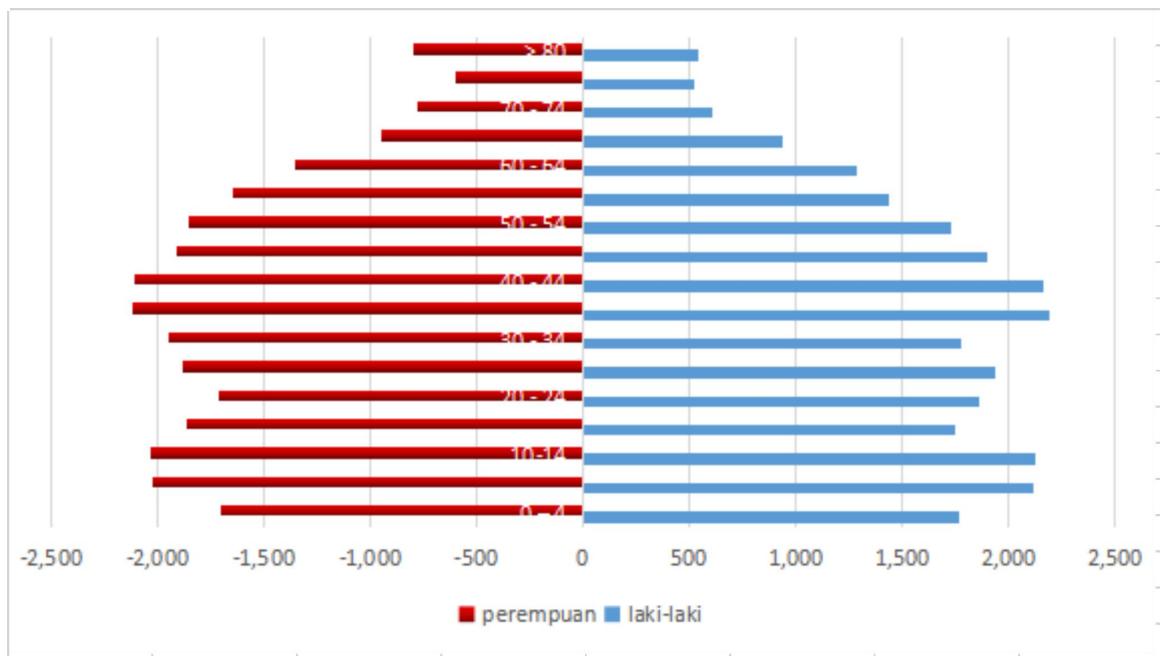
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.5.9 Piramida Penduduk Kecamatan Prambanan

Penduduk Kecamatan Prambanan tahun 2019 mencapai 53.948 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 36.431 jiwa atau 67,53 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 17.517 jiwa atau 32,47 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Prambanan mengalami penurunan.

Piramida Kecamatan Prambanan (Gambar 3.12) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Prambanan didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 35-39 tahun yang mencapai 4.309 jiwa (7,99 persen). Selanjutnya penduduk kelompok umur 40-44 tahun mencapai 4.265 (7,91 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Prambanan mencapai

5.740 jiwa atau 10,64 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.



Gambar 3.12 Piramida Penduduk Kecamatan Prambanan Tahun 2019

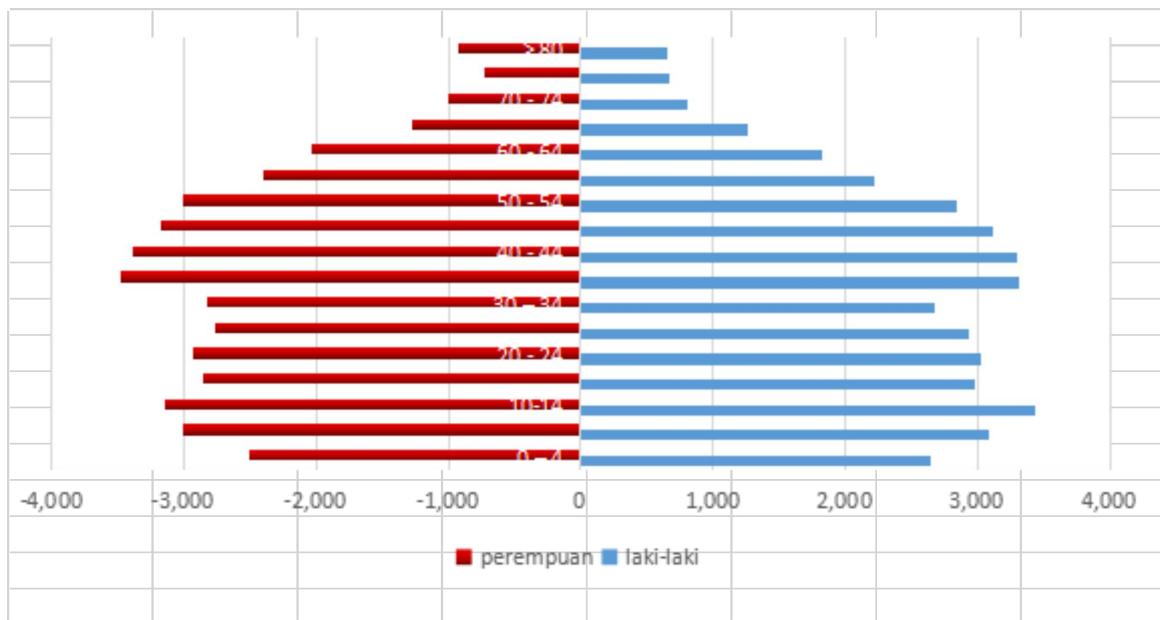
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.5.10 Piramida Penduduk Kecamatan Kalasan

Penduduk Kecamatan Kalasan tahun 2019 mencapai 82.267 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 57.105 jiwa atau 69,41 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 25.162 jiwa atau 30,59 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Kalasan mengalami penurunan.

Piramida Kecamatan Kalasan (Gambar 3.13) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Kalasan didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 35-39 tahun yang mencapai 6.783 jiwa (8,25 persen). Selanjutnya kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 6.693 (8,14 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Kalasan mencapai 7.346 jiwa atau 8,93

persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.



Gambar 3.13 Piramida Penduduk Kecamatan Kalasan Tahun 2019

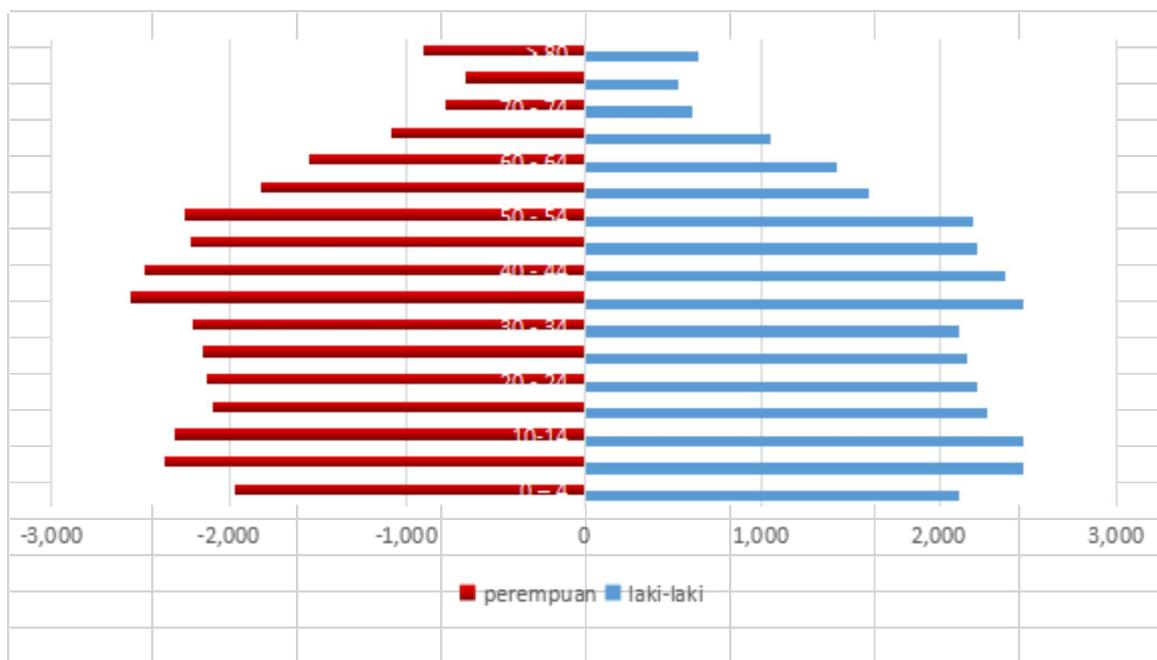
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.5.11 Piramida Penduduk Kecamatan Ngemplak

Penduduk Kecamatan Ngemplak tahun 2019 mencapai 62.437 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 42.471 jiwa atau 68,02 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 19.966 jiwa atau 31,98 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Ngemplak mengalami penurunan.

Piramida Kecamatan Ngemplak (Gambar 3.14) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Ngemplak didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 35-39 tahun yang mencapai 5.030 jiwa (8,06 persen). Selanjutnya kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 4.848 jiwa (7,76 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Ngemplak mencapai

6.269 jiwa atau 10,04 persen, lebih tinggi dibandingkan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.



Gambar 3.14 Piramida Penduduk Kecamatan Ngemplak Tahun 2019

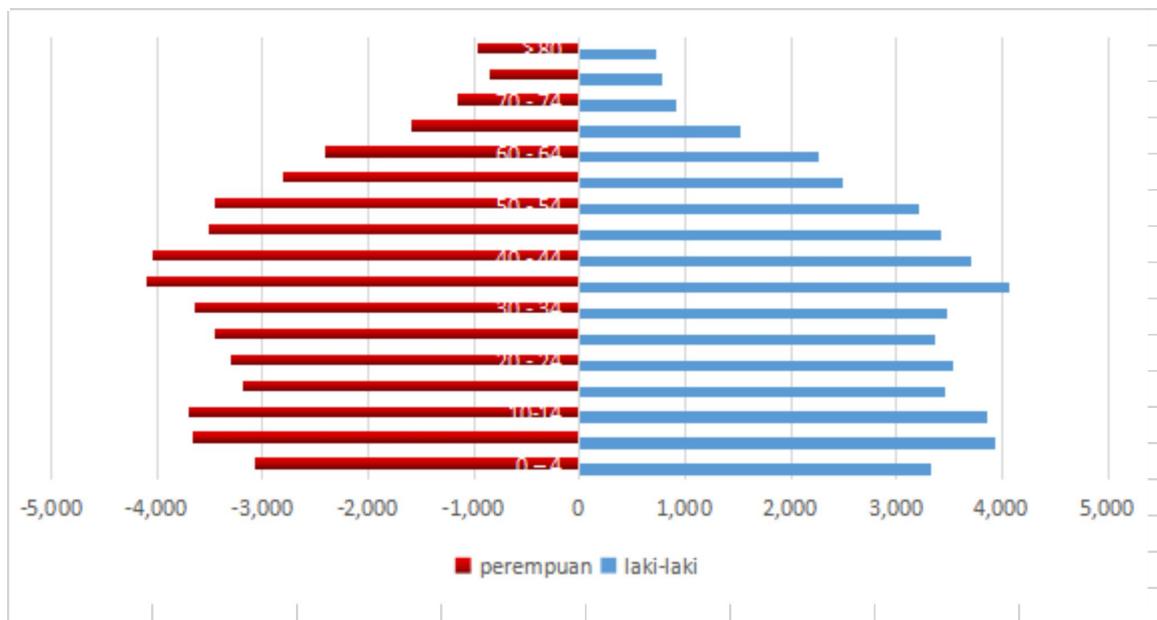
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.5.12 Piramida Penduduk Kecamatan Ngaglik

Penduduk Kecamatan Ngaglik tahun 2019 mencapai 96.996 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 66.916 jiwa atau 68,99 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 30.080 jiwa atau 31,01 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Ngaglik mengalami penurunan.

Piramida Kecamatan Ngaglik (Gambar 3.15) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Ngaglik didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 35-39 tahun yang mencapai 8.161 jiwa (8,41persen). Selanjutnya kelompok usia 40-44 tahun sejumlah 7.756 jiwa (7,99 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Ngaglik mencapai 8.510 jiwa atau 8,77

persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.



Gambar 3.15 Piramida Penduduk Kecamatan Ngaglik Tahun 2019

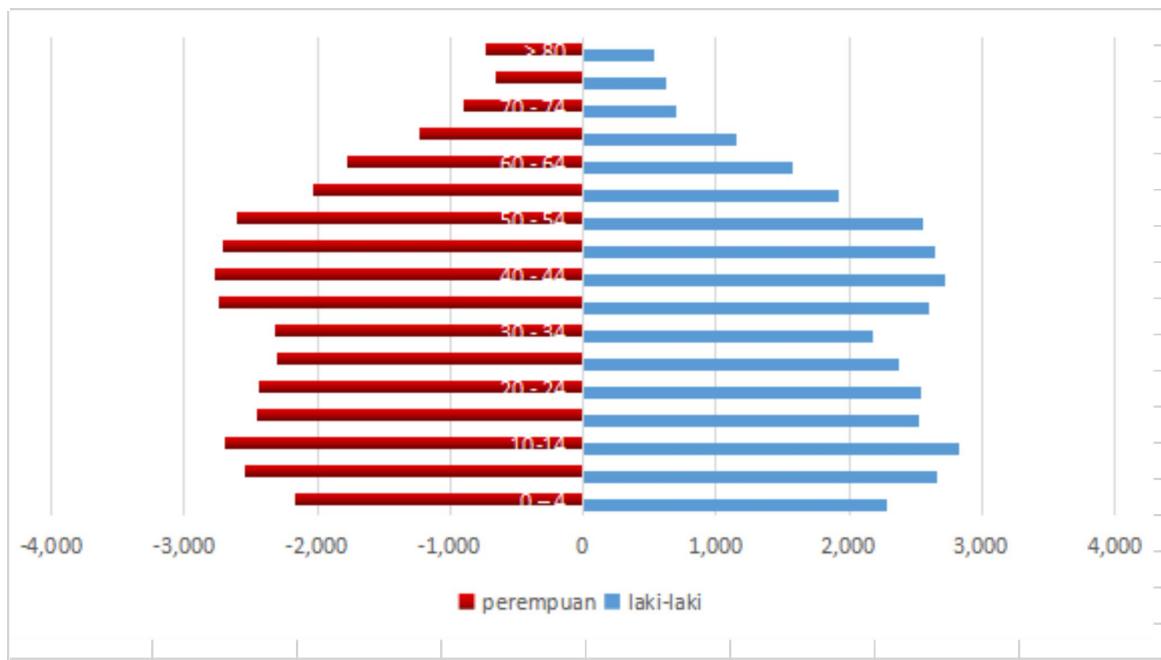
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.5.13 Piramida Penduduk Kecamatan Sleman

Penduduk Kecamatan Sleman tahun 2019 mencapai 69.510 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 47.792 jiwa atau 68,74 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 21.728 jiwa atau 31,20 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Sleman mengalami penurunan.

Piramida Kecamatan Sleman (Gambar 3.16) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Sleman didominasi oleh penduduk usia 0-14 sejumlah 5.529 (7,95 persen). Selanjutnya didominasi usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 sejumlah 5.499 (7,91 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Sleman mencapai 6.533 jiwa atau 9,39 persen, angkanya sedikit lebih

rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.



Gambar 3.16 Piramida Penduduk Kecamatan Sleman Tahun 2019

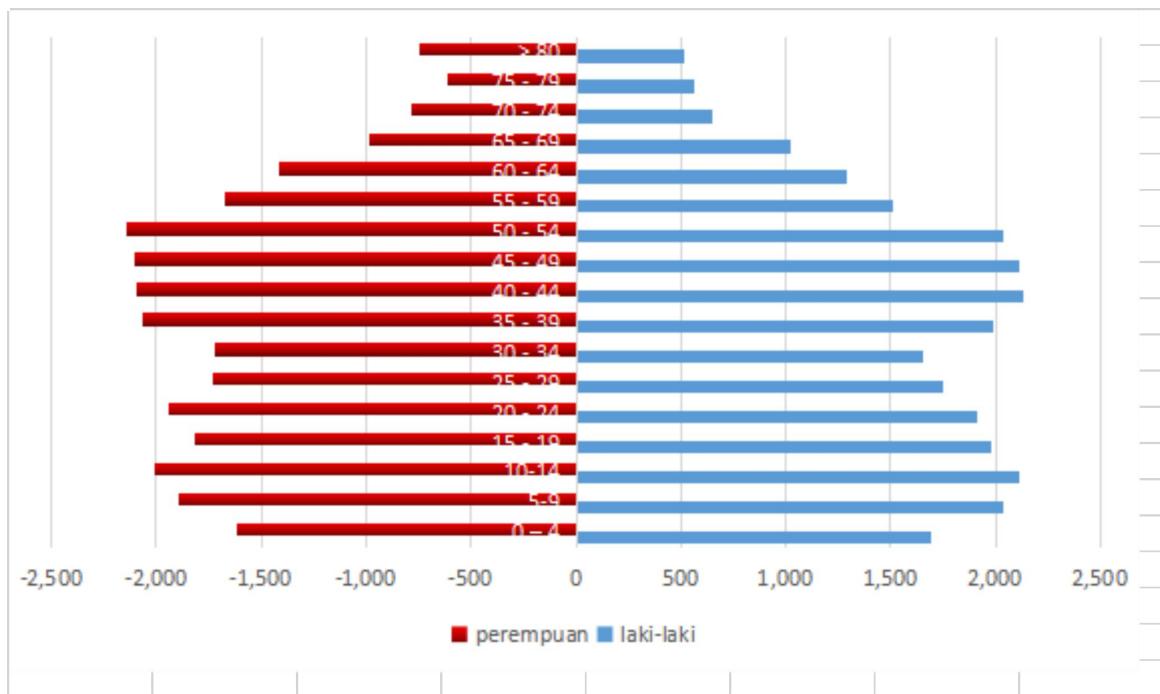
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.5.14 Piramida Penduduk Kecamatan Tempel

Penduduk Kecamatan Tempel tahun 2019 mencapai 54.345 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 37.087 jiwa atau 68,24 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 17.258 jiwa atau 31,76 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Tempel mengalami penurunan.

Piramida Kecamatan Tempel (Gambar 3.17) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Tempel didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 4.226 jiwa (7,78 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 45-49 tahun mencapai 4.216 jiwa (7,76 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Tempel mencapai 5.884

jiwa atau 10,83 persen, angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.



Gambar 3.17 Piramida Penduduk Kecamatan Tempel Tahun 2019

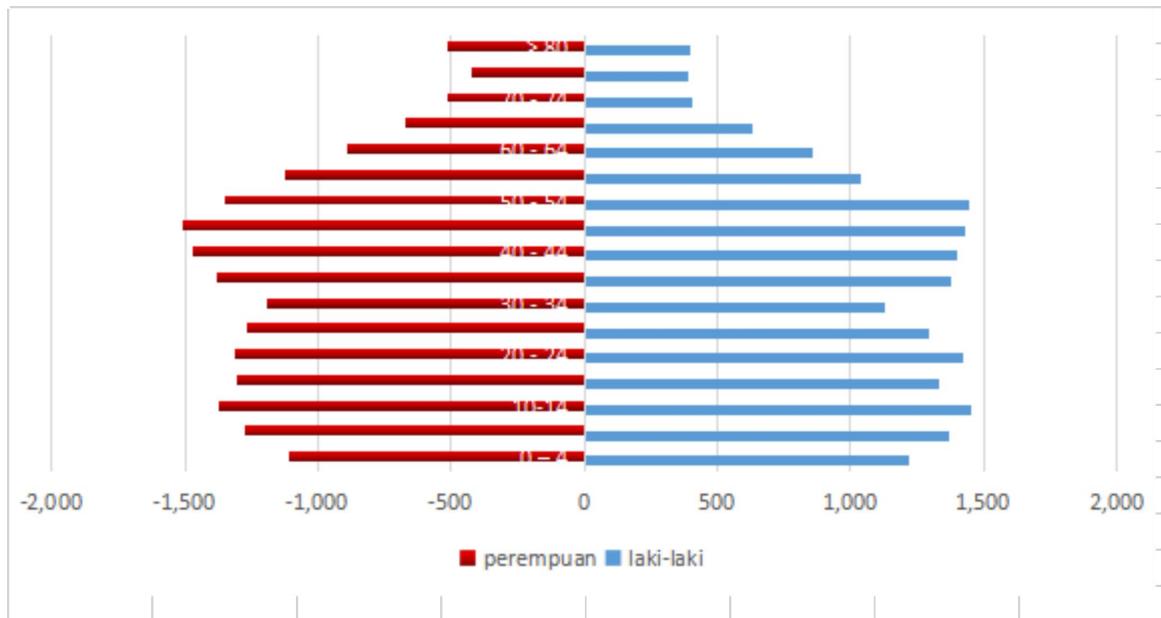
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.5.15 Piramida Penduduk Kecamatan Turi

Penduduk Kecamatan Turi tahun 2019 mencapai 37.274 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 25.527 jiwa atau 68,48 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 11.747 jiwa atau 31,52 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Turi mengalami penurunan.

Piramida Kecamatan Turi (Gambar 3.18) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Turi didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 45-49 yang mencapai 2.933 (7,87 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 2.868 jiwa (7,69

persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Turi mencapai 3.950 jiwa atau 10,59 persen, angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.



Gambar 3.18 Piramida Penduduk Kecamatan Turi Tahun 2019

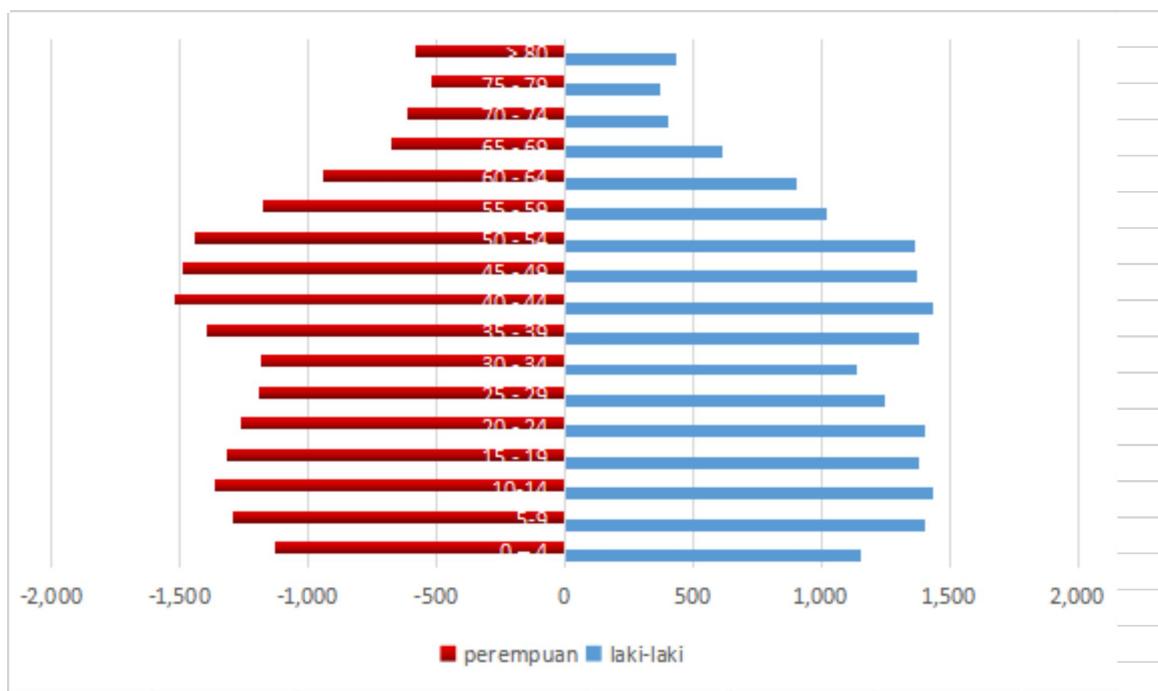
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.5.16 Piramida Penduduk Kecamatan Pakem

Penduduk Kecamatan Pakem tahun 2019 mencapai 37.588 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 25.589 jiwa atau 68,08 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 11.999 jiwa atau 31,92 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Pakem mengalami penurunan.

Piramida Kecamatan Pakem (Gambar 3.19) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Pakem didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 2.958 jiwa (7,87 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 45-49 tahun mencapai 2.866 jiwa (7,62 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Pakem mencapai 4.215 jiwa

atau 11,21 persen, angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.



Gambar 3.19 Piramida Penduduk Kecamatan Pakem Tahun 2019

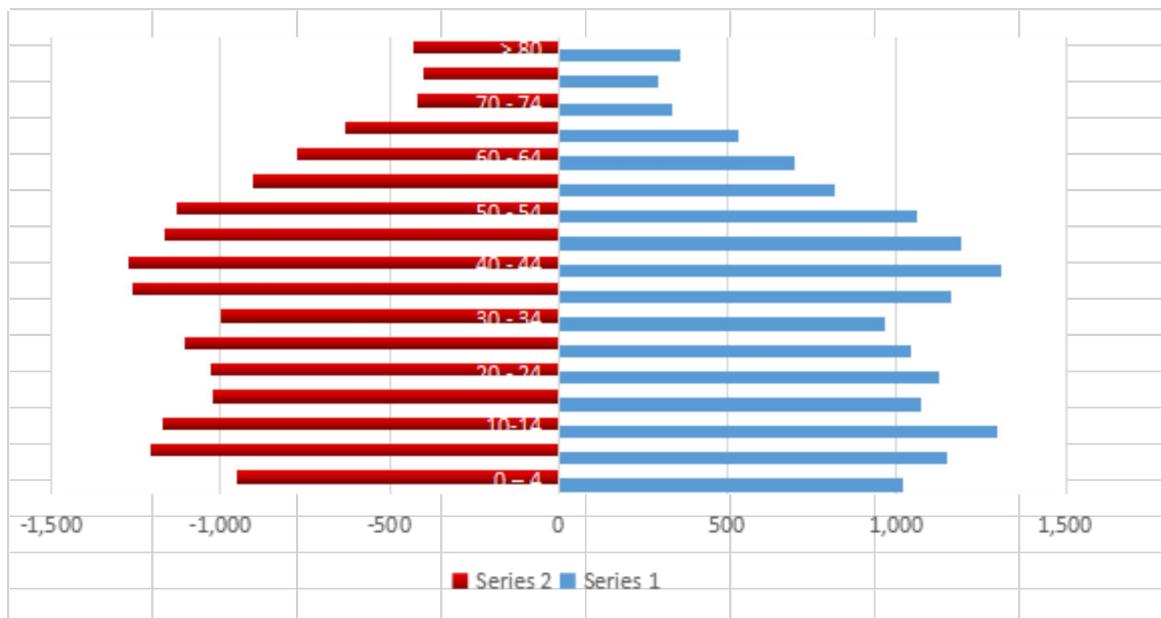
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.5.17 Piramida Penduduk Kecamatan Cangkringan

Penduduk Kecamatan Cangkringan tahun 2019 mencapai 31.309 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 21.106 jiwa atau 67,41 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 10.203 jiwa atau 32,59 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Cangkringan mengalami penurunan.

Piramida Kecamatan Cangkringan (Gambar 3.20) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Cangkringan didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 2.579 jiwa (8,24 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 0-14 tahun mencapai 2.469

(7,89 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Cangkringan mencapai 3.400 jiwa atau 10,86 persen, angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.



Gambar 3.20 Piramida Penduduk Kecamatan Cangkringan Tahun 2019

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.6 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Rasio ketergantungan sangat penting karena mencerminkan jumlah orang yang secara ekonomi tidak aktif per seratus penduduk yang aktif secara ekonomi. Jika informasi mengenai aktivitas ekonomi dari setiap individu tidak tersedia, biasanya digunakan rasio antara penduduk kelompok umur 0-14 dan 65 tahun ke atas terhadap penduduk kelompok umur 15-64 tahun. Rasio ketergantungan secara umum dapat menggambarkan beban tanggungan ekonomi penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (kurang dari 15 tahun) dan terhadap usia 65 tahun ke atas.

Tingginya rasio ketergantungan akan menyita lebih banyak pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk yang bekerja. Keluarga-keluarga yang mempunyai jumlah anak banyak cenderung tidak mampu untuk menabung, akibatnya tingkat penanaman modal akan rendah. Penduduk dengan beban tanggungan anak yang tinggi harus membagi dana investasi yang besar untuk penggunaan yang kurang produktif secara segera, misalnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan dan non makanan dan bukan untuk investasi. Lebih jauh lagi, angka beban

tanggungan yang besar, akan memaksa pemerintah untuk lebih memprioritaskan penyediaan fasilitas sosial yang cukup besar daripada memperhatikan kualitasnya.

Dalam perhitungan rasio ketergantungan, untuk penduduk tua digunakan kelompok umur 65 tahun ke atas. Berdasarkan Tabel 3.6 diketahui angka rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Sleman adalah sebesar 45,44 persen yang menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk kelompok umur 15-64 tahun yang produktif menanggung sekitar 45-46 orang penduduk tidak produktif. Rasio ketergantungan sebesar 37,43 persen ini disumbangkan oleh rasio penduduk muda sebesar 30,70 persen dan rasio penduduk tua sebesar 22,73 persen. Sementara berdasarkan wilayah diketahui rasio ketergantungan paling tinggi pada tahun 2018 adalah Kecamatan Depok yang mencapai 75,77 persen. Sementara wilayah dengan rasio ketergantungan paling rendah di seluruh wilayah Sleman adalah Kecamatan Pakem sebesar 40,83 persen. Fenomena angka rasio ketergantungan di Kabupaten Sleman dalam beberapa tahun ini sangat dinamis, dikarenakan struktur penduduk rata-rata bergeser ke kelompok usia tua. Pada kasus kecamatan Depok rasio ketergantungan yang tinggi disumbang oleh kelompok muda 30,35 dan tua sebesar 45,42. Hal ini menunjukkan struktur penduduk tua di kecamatan Depok.

Gambaran penduduk di Kabupaten Sleman berdasarkan rasio beban ketergantungan ini menunjukkan adanya perkembangan produktivitas sumberdaya manusianya sudah tinggi dan beban penduduk tidak produktif dalam pembangunan semakin rendah. Dengan demikian maka pembangunan dapat terus dilakukan karena penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh usia produktif. Dalam istilah demografi, jika dilihat dari *dependency rationya* maka telah terjadi *the window of opportunity* dimana muaranya adalah terjadinya pembangunan yang tinggi. Pada tahun 2030 diharapkan akan terjadi *window of opportunity* tersebut dengan angka ketergantungan mencapai 45-50 persen. Rasio ketergantungan kabupaten Sleman disbanding tahun kemarin mengalami peningkatan dari 44,91 di tahun 2017 menjadi 53,43 di tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Sleman harus lebih berhati-hati, sebab ada wilayah yang memiliki rasio ketergantungan melebihi 50 persen yakni Kecamatan Moyudan (63,13), kecamatan Minggir (73,77), kecamatan Seyegan (64,76), kecamatan Mlati (65,10), kecamatan Depok (75,77), dan Berbah (66,69).

Tabel 3.6 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Sleman Menurut Kecamatan Tahun 2019

Kecamatan	Rasio Ketergantungan		
	Muda	Tua	Total
Gamping	30.55	12.83	43.38
Godean	30.03	15.96	45.98
Moyudan	28.66	22.30	50.95
Minggir	29.11	22.94	52.05
Seyegan	30.53	16.29	46.83
Mlati	30.85	12.73	43.58
Depok	30.37	12.30	42.67
Berbah	31.64	12.36	44.00
Prambanan	32.33	15.76	48.08
Kalasan	31.20	12.86	44.06
Ngemplak	32.25	14.76	47.01
Ngaglik	32.23	12.72	44.95
Sleman	31.80	13.67	45.47
Tempel	30.67	15.87	46.53
Turi	30.54	15.47	46.02
Pakem	30.42	16.47	46.89
Cangkringan	32.23	16.11	48.34
KABUPATEN SLEMAN	30.91	15.38	45.44

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.1.7 Rasio Kepadatan Penduduk (*Population Density Ratio*)

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun, karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah, baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan. Sedangkan persebaran (distribusi) penduduk adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan. Berdasarkan karakteristik sumberdaya, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi empat kawasan, salah satunya adalah Kawasan Tengah yaitu wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini cepat berkembang, merupakan pusat pendidikan, industri, perdagangan,

dan jasa, sehingga tidak mengherankan jika Kecamatan Depok, Gamping, dan Mlati dan Gamping memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2019 mencapai 1.959,89 jiwa per km^2 dan wilayah paling padat adalah Kecamatan Depok tercatat sebanyak 3.440,37 jiwa per km^2 . Kecamatan Depok merupakan pusat perkembangan Kabupaten Sleman, karena banyaknya perguruan tinggi di Depok sehingga menjadi daya tarik pendatang. Wilayah terpadat kedua adalah Kecamatan Mlati yang mencapai 3.228,72 jiwa per km^2 dan ketiga adalah Kecamatan Gamping yang mencapai 3.198,26 jiwa per km^2 . Sementara itu, wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Cangkringan yang hanya mencapai 652,41 jiwa per km^2 .

Bila dilihat dari luas wilayah, ada empat kecamatan yang memiliki wilayah terluas, yaitu Kecamatan Cangkringan (8,35 persen), Pakem (7,63 persen), Turi (7,5 persen), dan Prambanan (7,19 persen), tetapi kepadatan penduduknya justru terendah. Hal tersebut karena tidak semua wilayah di keempat kecamatan tersebut dapat dijadikan tempat hunian akibat letaknya yang berada di lereng Gunung Merapi, terutama Kecamatan Cangkringan, Pakem, dan Turi. Wilayah tersebut sangat rentan bahaya terkait dengan aktivitas Gunung Merapi yang seharusnya tidak dimanfaatkan sebagai kawasan hunian. Penyebaran penduduk yang kurang merata merupakan salah satu masalah kependudukan yang juga perlu mendapat perhatian. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tabel 3.7 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Persentase Persebaran Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Gamping	29,25	93.549	9,60	3,198.26
2	Godean	26,84	69.949	7,82	2,606.15
3	Moyudan	27,62	33.676	3,66	1,219.26
4	Minggir	27,27	32.585	3,59	1,194.90
5	Seyegan	26,63	50.965	5,74	1,913.82
6	Mlati	28,52	92.083	9,69	3,228.72
7	Depok	35,55	122.305	10,33	3,440.37
8	Berbah	22,99	54.789	7,15	2,383.17
9	Prambanan	41,35	53.948	3,92	1,304.67
10	Kalasan	35,84	82.267	6,89	2,295.40
11	Ngemplak	35,71	62.437	5,25	1,748.45
12	Ngaglik	38,52	96.996	7,56	2,518.07
13	Sleman	31,32	69.510	6,66	2,219.35
14	Tempel	32,49	54.345	5,02	1,672.67
15	Turi	43,09	37.274	2,60	865.03
16	Pakem	43,84	37.588	2,57	857.39
17	Cangkringan	47,99	31.309	1,96	652.41
Kabupaten Sleman		574.82	1.075.575		1,959.89

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.2 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

3.2.1 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan di suatu kabupaten/kota pada waktu tertentu yang disajikan berdasarkan jenis kelamin per kecamatan dalam bentuk tabel. Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan di suatu kabupaten/kota sekaligus kualitas sumberdaya manusia.

Menurut data SIAK, diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sleman sebagian besar pada tingkat pendidikan rendah. Pada tahun

2019 paling banyak penduduk Sleman berpendidikan SMA yang mencapai 341.873 jiwa atau 31,78 persen. Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak kedua adalah tidak memiliki ijazah yang mencapai 179.009 jiwa atau 16,64 persen, Penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yaitu setara dengan Diploma III keatas sampai dengan Strata III masih tercatat sebanyak 157.380 jiwa atau 14,63 persen.

Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019

No.	Kecamatan	Tidak Sekolah	Belum tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Diploma I/II
1	Gamping	16924	9375	13408	12,256	27,142	866
2	Godean	11366	7019	9804	9,257	22,383	631
3	Moyudan	5069	3164	4305	4,155	11,706	507
4	Minggir	5449	3779	4632	3,949	10,339	374
5	Seyegan	8845	5408	7672	7,732	16,752	316
6	Mlati	14607	9877	11595	11,942	28,742	818
7	Depok	19477	10279	10312	12,437	38,113	1,520
8	Berbah	8810	5902	7037	8,462	17,892	477
9	Prambanan	10546	4717	9470	7,876	17,480	219
10	Kalasan	13666	8850	9614	11,187	26,215	825
11	Ngemplak	10269	6401	6361	7,767	20,727	525
12	Ngaglik	16487	9054	9292	11,385	29,214	863
13	Sleman	11414	6810	8165	10,798	23,217	588
14	Tempel	9053	6447	8151	8,637	17,018	475
15	Turi	6266	3764	5633	5,442	12,368	354
16	Pakem	5920	3807	4879	4,914	12,838	411
17	Cangkringan	4841	3340	6295	4,495	9,727	235
KABUPATEN SLEMAN		179009	107993	136625	142,691	341,873	10,004

Lanjutan Tabel 3.9

No.	Kecamatan	Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	Diploma IV/Strata I	Strata II	Strata III	Total
1.	Gamping	3,096	9,159	1,167	156	93,549
2.	Godean	2,157	6,559	675	98	69,949
3.	Moyudan	1,091	3,445	215	19	33,676
4.	Minggir	1,000	2,893	153	17	32,585
5.	Seyegan	1,136	2,875	217	12	50,965
6.	Mlati	3,048	9,939	1,322	193	92,083
7.	Depok	5,988	20,151	3,449	579	122,305
8.	Berbah	1,510	4,259	398	42	54,789
9.	Prambanan	942	2,504	182	12	53,948
10.	Kalasan	2,783	7,935	1,020	172	82,267
11.	Ngemplak	2,079	7,055	1,046	207	62,437
12.	Ngaglik	4,148	13,798	2,268	487	96,996
13.	Sleman	2,208	5,703	559	48	69,510
14.	Tempel	1,251	3,077	225	11	54,345
15.	Turi	871	2,403	164	9	37,274
16.	Pakem	1,333	3,210	252	24	37,588
17.	Cangkringan	596	1,644	129	7	31,309
KABUPATEN SLEMAN		35,237	106,609	13,441	2,093	1,075,575

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

Tabel 3.10 Jumlah Penduduk Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019

Ijazah tertinggi	Jenis Kelamin				Total	
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Tidak mempunyai ijazah	86.403	16.21	92.606	17.06	179.009	16.64
Belum tamat SD	52.556	9.86	55.437	10.22	107.993	10.04
SD/MI	61.309	11.51	75.316	13.88	136.625	12.70
SMP/Mts	71.671	13.45	71.020	13.09	142.691	13.27
SMA/SMK/MA	180.471	33.87	161.402	29.74	341.873	31.79
DI/DII	4.118	0.77	5.886	1.08	10.004	0.93
DIII/Akademi	15.21	2.85	20.027	3.69	35.237	3.28
DIV/S1	51.934	9.75	54.675	10.07	106.609	9.91
S2	7.720	1.45	5.721	1.05	13.441	1.25
S3	1.488	0.28	605	0.11	2.093	0.19
Jumlah	532.88	100	542.695	100	1075.575	100

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

Seperti telah diuraikan diatas, bahwa penduduk Sleman berdasarkan ijazah yang dimiliki paling banyak adalah SMA/sederajat. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, diketahui penduduk dengan ijazah SMA/sederajat tersebut lebih tinggi laki-laki dibanding perempuan. Pada tahun 2019 tercatat laki-laki dengan ijazah SMA/sederajat sebanyak 180.471 jiwa atau 33,87 persen, sedangkan perempuan sebanyak 161.402 jiwa atau 29,74 persen. Mayoritas perbandingan laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan di semua tingkatan sekolah kecuali tingkat SMP, SMA, S2 dan S3.

3.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama/kepercayaan di suatu kabupaten/kota pada waktu tertentu yang disajikan

per kecamatan dalam bentuk tabel. Dari tabel tersebut akan diketahui karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

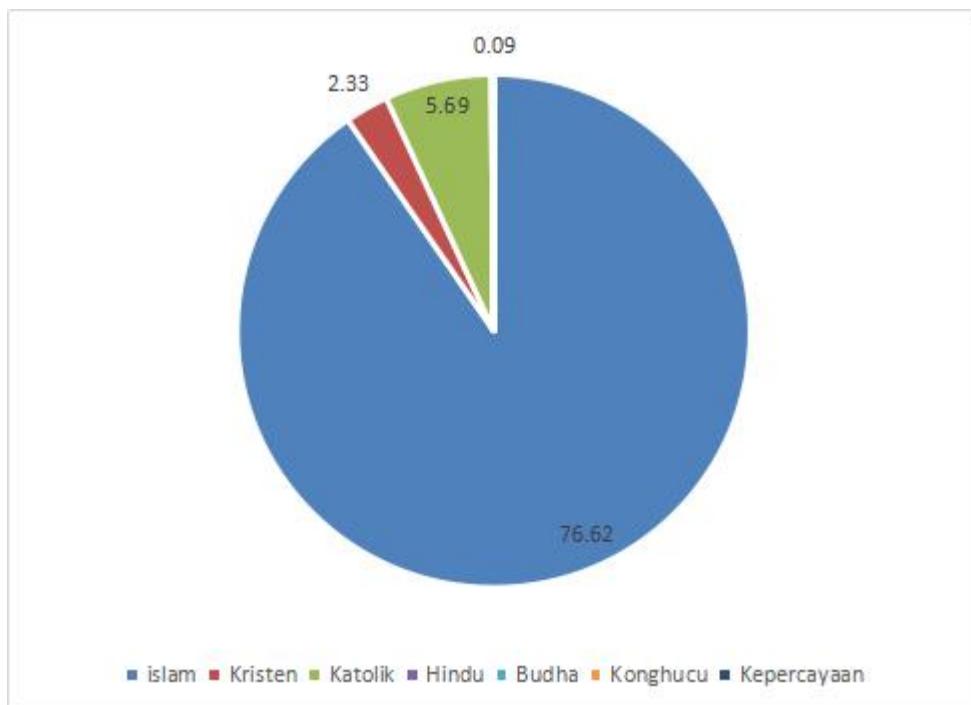
Penduduk Sleman berdasarkan agama dan kepercayaan menurut wilayah tempat tinggal dari data SIAK diketahui paling banyak tinggal di Kecamatan Depok. Mulai dari Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghuchu paling banyak berdomisili di Kecamatan Depok. Penduduk yang beragama Islam yang tinggal di Kecamatan Depok pada tahun 2019 tercatat sebanyak 103.391 jiwa atau 12,55 persen dari total penduduk Sleman yang beragama Islam. Berikutnya adalah penduduk yang beragama Katolik yang tinggal di Kecamatan Depok pada tahun 2019 sebanyak 10.840 jiwa atau 17,71 persen dari total penduduk Sleman yang beragama Katolik.

Penduduk yang beragama Kristen yang tinggal di Kecamatan Depok tahun 2019 tercatat sebanyak 7.543 jiwa atau 30,06 persen dari total penduduk yang beragama Kristen di Sleman. Sementara penduduk yang beragama Hindu paling banyak juga tinggal di Kecamatan Depok yakni mencapai 292 jiwa atau 28,63 persen dari total penduduk Sleman yang beragama Hindu. Penduduk dengan agama Budha yang tinggal di Kecamatan Depok sebanyak 214 jiwa atau 39,93 persen dari total penduduk yang beragama Budha. Khonghuchu yang telah diakui oleh pemerintah sebagai salah satu agama di Indonesia paling banyak tinggal di Kecamatan Depok yakni sebesar 13 jiwa atau 27,08 persen. Penduduk dengan aliran kepercayaan terbanyak juga tinggal di Kecamatan Depok yakni 12 orang atau 50 persen dari total 24 orang penganut Kepercayaan di Kabupaten Sleman.

Tabel 3.11 Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan yang Dianut Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019

Kecamatan	Agama/Kepercayaan																				
	Islam			Kristen			Katholik			Hindu			Budha			Khonghucu			Kepercayaan		
	L	P	Jml	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
Gamping	42,056	42,225	84,281	1,816	1,961	3,777	2,584	2,713	5,297	47	34	81	55	55	110	2	1	3	-	-	-
Godean	31,752	31,937	63,689	1,383	1,480	2,863	1,637	1,667	3,304	17	17	34	24	26	50	7	2	9	-	-	-
Moyudan	14,418	14,669	29,087	232	236	468	2,015	2,096	4,111	4	4	8	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Minggir	12,524	13,162	25,686	332	361	693	2,991	3,210	6,201	2	2	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Seyegan	24,427	24,880	49,307	163	182	345	585	624	1,209	42	53	95	6	3	9	-	-	-	-	-	-
Mlati	40,879	41,308	82,187	1,503	1,587	3,090	3,330	3,224	6,554	59	66	125	62	54	116	5	6	11	-	-	-
Depok	51,279	52,112	103,391	3,680	3,863	7,543	5,248	5,592	10,840	148	144	292	112	102	214	8	5	13	5	7	12
Berbah	24,965	25,410	50,375	864	921	1,785	1,238	1,338	2,576	20	23	43	7	3	10	-	-	-	-	-	-
Prambanan	25,184	25,853	51,037	223	241	464	1,224	1,193	2,417	12	9	21	3	4	7	2	-	2	-	-	-
Kalasan	36,270	36,836	73,106	1,398	1,411	2,809	3,069	3,118	6,187	71	57	128	16	17	33	3	-	3	-	1	1
Ngemplak	28,408	28,793	57,201	851	949	1,800	1,596	1,704	3,300	60	56	116	10	7	17	-	2	2	1	-	1
Ngaglik	43,021	43,857	86,878	1,577	1,654	3,231	3,320	3,301	6,621	78	77	155	56	44	100	6	2	8	1	2	3
Sleman	31,944	32,594	64,538	606	578	1,184	1,853	1,900	3,753	8	4	12	5	12	17	2	3	5	1	-	1
Tempel	26,442	26,869	53,311	100	106	206	408	404	812	-	2	2	5	5	10	2	-	2	-	2	2
Turi	17,431	17,445	34,876	87	88	175	1,083	1,133	2,216	1	2	3	-	-	-	-	-	-	2	2	4
Pakem	15,974	16,459	32,433	539	539	1,078	1,961	2,108	4,069	5	2	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Cangkringan	15,153	15,589	30,742	108	113	221	157	179	336	6	3	9	-	-	-	1	-	1	-	-	-
KABUPATEN SLEMAN	408,319	415,836	824,155	12,263	12,829	25,092	30,078	31,124	61,202	516	504	1,020	284	252	536	30	18	48	10	14	24

Berdasarkan data SIAK diketahui penduduk Sleman menurut agama dan kepercayaan dianut tahun 2019 paling banyak adalah Islam yang mencapai 824.155 jiwa atau 76,62 persen. Urutan kedua terbanyak adalah Katolik yang mencapai 61.202 jiwa atau 5,69 persen dan berikutnya adalah Kristen sebanyak 25.092 jiwa atau 2,33 persen. Berikutnya adalah Hindu sebanyak 1.020 jiwa atau 0,09 persen, Khonghuchu sebanyak 48 jiwa atau 0,004 persen, Budha mencapai 536 jiwa atau 0,05 persen, dan penganut Kepercayaan 24 jiwa atau 0,002 persen.



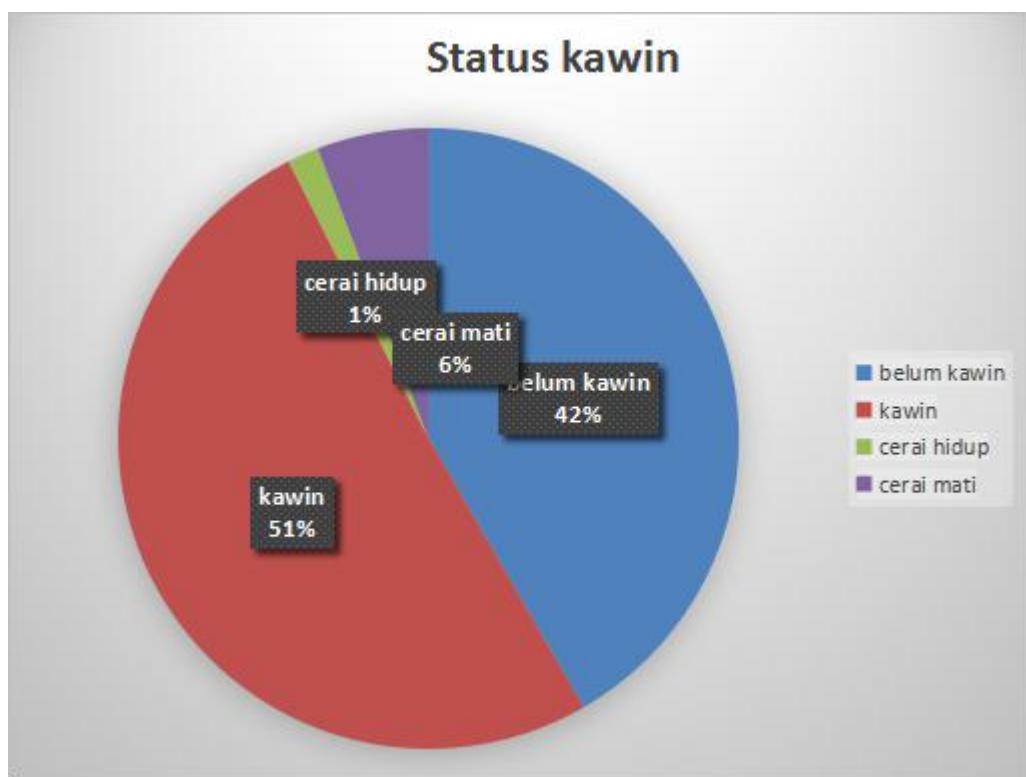
Gambar 3.21 Persentase Penduduk Sleman Menurut Agama/Kepercayaan yang Dianut Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.2.3 Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin

Perkawinan merupakan langkah awal pembentukan suatu keluarga atau rumah tangga. Oleh karena itu status perkawinan ini penting untuk dianalisis sebab dari perkawinan ini akan merubah perilaku demografi yaitu dengan adanya kelahiran. Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas

keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, umur perkawinan pertama, dan lama kawin akan berguna untuk melakukan estimasi angka kelahiran yang akan terjadi. Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidaksiapan orangtua untuk pengasuhan anak serta kurang matangnya perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga. Indikator perkawinan ini, berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga berencana atau pembangunan keluarga.



Gambar 3.22 Persentase Penduduk Sleman Menurut Status Perkawinan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

Berdasarkan status perkawinan penduduk Sleman menurut data SIAK diketahui paling banyak adalah berstatus kawin yakni mencapai 543.638 jiwa atau 50,54 persen di tahun 2019. Urutan kedua penduduk berdasarkan status

perkawinan adalah belum kawin yang mencapai 445.253 jiwa atau sekitar 41,40 persen dan selanjutnya adalah penduduk yang berstatus cerai mati sebanyak 62.192 jiwa atau 5,78 persen. Sementara penduduk dengan status cerai hidup sebanyak 17.287 jiwa atau 1,61 persen. Status perkawinan penduduk Sleman berdasarkan lokasi tempat tinggal, diketahui paling banyak tinggal di Kecamatan Depok, baik yang berstatus kawin, belum kawin, cerai hidup, maupun cerai mati.

Tabel 3.12 Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin Berdasarkan Kecamatan Menurut Data SIAK Tahun 2019

Kecamatan	Status Perkawinan				
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
Gamping	39,375	47,709	1,454	5,011	93,549
Godean	28,528	36,337	1,090	3,994	69,949
Moyudan	13,185	17,511	395	2,585	33,676
Minggir	12,645	17,098	393	2,449	32,585
Seyegan	20,471	26,517	822	3,155	50,965
Mlati	38,619	46,916	1,633	4,915	92,083
Depok	52,922	60,893	2,204	6,286	122,305
Berbah	22,690	28,011	956	3,132	54,789
Prambanan	21,188	28,588	820	3,352	53,948
Kalasan	34,530	41,781	1,390	4,566	82,267
Ngemplak	26,072	31,785	961	3,619	62,437
Ngaglik	41,614	48,941	1,552	4,889	96,996
Sleman	29,087	28,209	1,097	3,912	69,510
Tempel	21,786	28,209	909	3,441	54,345
Turi	15,101	19,321	523	2,329	37,274
Pakem	15,342	19,056	609	2,581	37,588
Cangkringan	12,098	16,756	479	1,976	31,309
KABUPATEN SLEMAN	445,253	543,638	17,287	62,192	1,075,575

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

Status perkawinan penduduk Sleman berdasarkan kelompok umur yang belum kawin pada umur di bawah 15 tahun mencapai 227.291 jiwa atau 21,36 persen dari total penduduk. Mereka umumnya bersekolah maupun masih balita sehingga sebagian besar statusnya belum menikah. Sementara itu, penduduk dengan status perkawinan cerai hidup paling tinggi terjadi pada kelompok umur 40-44 tahun sebanyak 2.467 jiwa atau 15,37 persen dari penduduk berstatus cerai hidup, terbanyak kedua pada kelompok umur 35-39 tahun yang mencapai 2.385 jiwa atau 14,86 persen, dan terbanyak ketiga pada kelompok umur 45-49 tahun sebesar 2.358 jiwa atau 14,69 persen, dari total penduduk dengan status cerai hidup.

Tabel 3.13 Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2019

NO.	KELOMPOK UMUR	BLM KAWIN			KAWIN			CERAI HIDUP			CERAI MATI			JUMLAH		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	0 - 4	34,746	32,630	67,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,746	32,630	67,376
2	5 - 9	41,148	39,042	80,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,148	39,042	80,190
3	10 - 14	42,175	39,842	82,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,175	39,842	82,017
4	15 - 19	37,230	35,331	72,561	131	433	564	2	3	5	0	2	2	37,363	35,769	73,132
5	20 - 24	35,249	29,336	64,585	2,819	6,983	9,802	62	165	227	1	7	8	38,131	36,491	74,622
6	25 - 29	21,986	12,220	34,206	14,780	24,031	38,811	280	599	879	16	71	87	37,060	36,921	73,981
7	30 - 34	9,917	3,854	13,771	25,421	32,333	57,754	597	942	1,539	41	187	228	35,974	37,316	73,290
8	35 - 39	6,819	2,525	9,344	35,313	39,304	74,617	1,235	1,427	2,662	138	429	567	43,505	43,685	87,190
9	40 - 44	4,442	2,326	6,768	36,500	38,033	74,533	1,162	1,659	2,821	227	965	1,192	42,331	42,983	85,314
10	45 - 49	3,009	2,145	5,154	35,353	34,906	70,259	950	1,554	2,504	386	1,722	2,108	39,698	40,327	80,025
11	50 - 54	1,849	1,903	3,752	34,009	32,688	66,697	806	1,376	2,182	614	3,212	3,826	37,278	39,179	76,457
12	55 - 59	1,044	1,433	2,477	27,065	25,343	52,408	517	1,131	1,648	867	4,735	5,602	29,493	32,642	62,135
13	60 - 64	601	1,048	1,649	23,248	19,007	42,255	327	920	1,247	1,324	6,495	7,819	25,500	27,470	52,970
14	65 - 69	514	553	1,067	16,164	11,133	27,297	183	557	740	1,463	6,930	8,393	18,324	19,173	37,497
15	70 - 74	382	351	733	9,500	6,214	15,714	94	314	408	1,504	7,249	8,753	11,480	14,128	25,608
16	75 - 79	376	200	576	7,601	3,697	11,298	72	254	326	1,903	7,059	8,962	9,952	11,210	21,162
17	≥ 80	310	146	456	6,334	2,500	8,834	63	242	305	3,271	10,167	13,438	9,978	13,055	23,033
JUMLAH		241,797	204,885	446,682	274,238	276,407	533,037	6,350	11,143	17,493	12,084	47,930	59,327	534,469	540,365	1,074,834

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.3 Keluarga

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.

Keluarga dapat dibagi menjadi 2 (dua) tipe, yaitu:

- Keluarga inti (*nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.
- Keluarga luas (*extended family*), adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orangtua, mertua maupun kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

3.3.1 Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga besar menjadi keluarga kecil.

Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Sleman pada tahun 2019 adalah 2,94 orang, artinya rata-rata jumlah anggota keluarga kurang lebih terdiri dari tiga orang dan ini dapat dikategorikan sebagai keluarga inti. Rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak tiga orang ini, merata di setiap kecamatan di Kabupaten Sleman. Berdasarkan wilayah diketahui bahwa kecamatan paling banyak rata-rata anggota keluarganya adalah Kecamatan Ngaglik yang mencapai 3,03 jiwa. Sementara rata-

rata anggota keluarga paling kecil adalah Kecamatan Minggir dan Moyudan yang mencapai 2,75 jiwa dan 2,76 jiwa.

Tabel 3.14 Jumlah Penduduk, Jumlah Kepala Keluarga, dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Thun 2019

Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga		
	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga
Gamping	31,524	93.549	2.97
Godean	23,919	69.949	2.92
Moyudan	12,196	33.676	2.76
Minggir	11,830	32.585	2.75
Seyegan	17,865	50.965	2.85
Mlati	30,946	92.083	2.98
Depok	40,606	122.305	3.01
Berbah	18,559	54.789	2.95
Prambanan	18,897	53.948	2.85
Kalasan	27,761	82.267	2.96
Ngemplak	20,996	62.437	2.97
Ngaglik	31,982	96.996	3.03
Sleman	23,679	69.51	2.94
Tempel	18,955	54.345	2.87
Turi	12,619	37.274	2.95
Pakem	13,074	37.588	2.88
Cangkringan	10,952	31.309	2.86
KABUPATEN SLEMAN	366,360	1.075.575	2.94

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.3.2 Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga (SHDK)

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga, seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orangtua dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama, seperti: pembantu rumah tangga.

Data SIAK 2019 memperlihatkan jumlah total penduduk Sleman tahun 2019 mencapai 1.075.575 jiwa dan terdiri dari 366.360 KK. Jika dilihat dari status hubungan dengan kepala keluarga, tampak bahwa paling banyak berstatus sebagai

anak, yakni 424.910 jiwa atau 39,51 persen. Selanjutnya adalah status sebagai kepala keluarga, yaitu sebesar 366.360 KK atau 34,06 persen, dan ketiga adalah status istri yang mencapai 256.064 atau 23,81 persen. Kepala keluarga umumnya dipegang oleh suami, tetapi di Kabupaten Sleman terdapat 73.496 KK perempuan atau 13,54 persen perempuan yang menjadi kepala keluarga.

Tabel 3.15 Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Tahun 2019

Status Hubungan dengan Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penduduk (jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Persen
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen		
Kepala keluarga	292,864	54.96	73,496	13.54	366,360	34.06
Suami	79	0.01	-	- .00	79	0.01
Isteri	-	- .00	256,064	47.18	256,064	23.81
Anak	227,188	42.63	197,722	36.43	424,910	39.51
Menantu	297	0.06	477	0.09	774	0.07
Cucu	5,401	1.01	4,582	0.84	9,983	0.93
Orangtua	366	0.07	2,639	0.49	3,005	0.28
Mertua	136	0.03	1,094	0.20	1,230	0.11
Famili lain	5,577	1.05	5,501	1.01	11,078	1.03
Pembantu	10	0.00	65	0.01	75	0.01
Lainnya	962	0.18	1,055	0.19	2,017	0.19
KABUPATEN SLEMAN	532,880	100	542,695	100	1,075,575	100

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.3.3 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Informasi tentang kelompok umur dari kepala keluarga dan anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan dan lain-lain. Tabel 3.16, menunjukkan bahwa proporsi kepala keluarga tertinggi berada pada kelompok umur 50-54 tahun yaitu 40.340 KK atau 11,6 persen.

Tabel 3.16 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur Tahun 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin					
	Laki-laki	Persen	Perempuan	Persen	Total	Persen
15-19	216	0.08	110	0.16	326	0.09
20-24	3,327	1.20	740	1.06	4,067	1.17
25-29	14,667	5.27	1,456	2.08	16,123	4.63
30-34	24,739	8.90	2,090	2.99	26,829	7.71
35-39	34,316	12.34	3,107	4.45	37,423	10.76
40-44	35,685	12.83	4,096	5.86	39,781	11.43
45-49	34,789	12.51	4,945	7.08	39,734	11.42
50-54	33,780	12.15	6,560	9.39	40,340	11.60
55-59	27,310	9.82	7,425	10.63	34,735	9.98
60-64	23,872	8.59	8,436	12.08	32,308	9.29
65-69	17,005	6.12	7,613	10.90	24,618	7.08
70-74	10,382	3.73	7,287	10.43	17,669	5.08
75 – 79	8,981	3.23	6,770	9.69	15,751	4.53
>80	8,993	3.23	9,204	13.18	18,197	5.23
	278,062	100	69,839	100	347,901	100

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

Untuk kepala keluarga usia 15-19 tahun paling sedikit yaitu 326 jiwa atau 0,09 persen dan semakin membesar di kelompok umur berikutnya. Hal ini menjadi indikasi perubahan kualitas keluarga dengan usia kepala keluarga yang matang.

3.3.4 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat *partiarchi* yang memposisikan laki-laki sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, membahas kepala keluarga perempuan menjadi sangat menarik. Di satu sisi munculnya kepala

keluarga perempuan merupakan indikator kemiskinan, karena absennya laki-laki sebagai pencari nafkah. Tetapi di sisi lain dapat pula dipahami bahwa munculnya kepala rumah tangga perempuan merupakan indikasi masuknya perempuan ke sektor publik atau pergeseran dari fungsi reproduksi ke produksi.

Tabel 3.17 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2019

Kecamatan	Laki	Persen	Perempuan	Persen	Jumlah	Persen
Gamping	25,349	8.66	6,175	8.40	31,524	8.60
Godean	19,275	6.58	4,644	6.32	23,919	6.53
Moyudan	9,474	3.23	2,722	3.70	12,196	3.33
Minggir	9,129	3.12	2,701	3.68	11,830	3.23
Seyegan	14,196	4.85	3,669	4.99	17,865	4.88
Mlati	24,868	8.49	6,078	8.27	30,946	8.45
Depok	32,183	10.99	8,423	11.46	40,606	11.08
BERbah	14,915	5.09	3,644	4.96	18,559	5.07
Prambanan	15,184	5.18	3,713	5.05	18,897	5.16
Kalasan	22,325	7.62	5,436	7.40	27,761	7.58
Ngemplak	16,855	5.76	4,141	5.63	20,996	5.73
Ngaglik	25,780	8.80	6,202	8.44	31,982	8.73
Sleman	18,851	6.44	4,828	6.57	23,679	6.46
TEmpel	15,146	5.17	3,809	5.18	18,955	5.17
Turi	10,259	3.50	2,360	3.21	12,619	3.44
Pakem	10,185	3.48	2,889	3.93	13,074	3.57
Cangkringan	8,890	3.04	2,062	2.81	10,952	2.99
Jumlah	292,864	100	73,496	100	366,360	100

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga. Hal ini menyebabkan mereka pada umumnya menyandang jabatan sebagai kepala keluarga. Namun dalam beberapa dekade ini terlihat adanya peningkatan jumlah perempuan yang menyandang jabatan kepala keluarga tersebut. Namun sering kali terjadi meskipun menjabat sebagai kepala keluarga, justru perempuan menanggung beban untuk menanggung seluruh kebutuhan keluarga. Hal semacam ini sering terjadi pada kepala keluarga perempuan lansia. Beratnya beban untuk mencukupi kebutuhan hidup dan

tanggung jawab terhadap berbagai hal atau masalah dalam keluarga menyebabkan perempuan menjadi pihak yang sangat rentan terjebak dalam kemiskinan.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, jumlah kepala keluarga paling banyak di Kabupaten Sleman tahun 2019 menurut jenis kelamin adalah laki-laki, yaitu sebanyak 292.864 jiwa (80,59 persen) dan perempuan sebesar 73.496 jiwa (20,06 persen). Apabila dibandingkan antarwilayah di Kabupaten Sleman, kecamatan yang paling banyak kepala keluarga perempuannya dibandingkan dengan wilayah lain adalah Kecamatan Depok yang mencapai 8.423 KK atau 11,46 persen dan terendah adalah Kecamatan Cangkringan, yaitu sebesar 2,81 persen atau 2.062 KK.

Berdasarkan data tentang kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa laki-laki masih tetap dominan sebagai kepala keluarga dan hal ini tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya budaya yang menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pengambilan keputusan dalam keluarga dan sumber utama pencari nafkah utama, laki-laki masih dominan. Namun posisi laki-laki sebagai kepala keluarga lambat laun mulai digantikan perannya oleh perempuan. Data menunjukkan jumlah perempuan sebagai kepala keluarga mengalami peningkatan yang cukup pesat.

3.3.5 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggungjawab sebagai kepala keluarga, baik secara ekonomi, sosial maupun psikologis. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status perkawinan dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai, baik hidup maupun mati.

Total kepala keluarga di Kabupaten Sleman berdasarkan data SIAK 2019 mencapai 366.360 KK. Kepala keluarga menurut status perkawinan paling banyak adalah kawin, yaitu 76,5 persen atau 280.266 KK. Berikutnya adalah cerai mati sebanyak 15,78 persen atau 57.805 KK dan ketiga adalah belum kawin sebanyak

13.773 KK atau 3,76 persen. Hal yang menarik dari data tersebut adalah adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin dan jumlahnya cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dijadikan sebagai kepala keluarga bukan hanya didasarkan pada status perkawinannya, tetapi lebih kepada kemampuan dan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga.

Tabel 3.18 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Kawin dan Kecamatan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019

Kecamatan	Belum Menikah	Menikah	Cerai Hidup	Cerai Mati	TOTAL
Gamping	1,204	24,406	1,266	4,648	31,524
Godean	858	18,512	905	3,644	23,919
Moyudan	529	8,926	312	2,429	12,196
Minggir	482	8,697	315	2,336	11,830
Seyegan	594	13,600	698	2,973	17,865
Mlati	1,231	23,736	1,397	4,582	30,946
Depok	2,435	30,690	1,796	5,685	40,606
Berbah	563	14,250	806	2,940	18,559
Prambanan	405	14,565	697	3,230	18,897
Kalasan	983	21,335	1,207	4,236	27,761
Ngemplak	717	16,174	793	3,312	20,996
Ngaglik	1,312	24,884	1,334	4,452	31,982
Sleman	801	18,112	956	3,810	23,679
Tempel	551	14,382	756	3,266	18,955
Turi	369	9,750	407	2,093	12,619
Pakem	453	9,783	504	2,334	13,074
Cangkringan	286	8,464	367	1,835	10,952
Jumlah	13,773	280,266	14,516	57,805	366,360

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

3.3.6 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia, serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga. Untuk itu, jenjang

pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Tabel 3.19 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2019

Kecamatan	Tidak Sekolah	Belum tamat SD/MI	Tamat SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	Diploma I/II	Akademi/Diploma III	Diploma IV/Strata I	Strata II	Strata III	Total
Gamping	1,188	1,146	5,999	4,596	11,752	368	1,374	4,294	690	117	31,524
Godean	856	1,066	4,642	3,496	9,207	278	924	2,975	398	77	23,919
Moyudan	546	541	2,223	1,381	5,139	246	487	1,495	127	11	12,196
Minggir	862	835	2,214	1,508	4,521	175	410	1,221	73	11	11,830
Seyegan	969	999	3,929	2,814	7,196	145	428	1,259	121	5	17,865
Mlati	721	1,268	5,016	4,448	12,272	320	1,301	4,689	771	140	30,946
Depok	659	804	4,413	4,042	15,450	630	2,712	9,431	2,034	431	40,606
Berbah	625	595	3,371	2,977	7,935	217	639	1,916	256	28	18,559
Prambanan	1,983	186	4,719	2,860	7,438	84	399	1,111	108	9	18,897
Kalasan	1,199	1,013	3,968	4,078	11,415	375	1,281	3,667	619	146	27,761
Ngemplak	898	784	2,986	2,659	8,590	213	889	3,202	615	160	20,996
Ngaglik	851	896	3,944	3,541	12,331	349	1,837	6,514	1,345	374	31,982
Sleman	908	679	3,832	3,844	10,203	262	963	2,609	35	35	23,679
Tempel	857	1,192	4,017	3,359	7,364	210	470	1,346	132	8	18,955
Turi	656	398	2,835	2,093	5,001	166	373	1,005	88	4	12,619
Pakem	389	574	2,390	1,668	5,642	185	628	1,432	147	19	13,074
Cangkringan	437	389	3,093	1,740	4,229	106	218	669	67	4	10,952
Kab Sleman	14,604	13,365	63,591	51,104	145,685	4,329	15,333	48,835	7,626	1,579	366,360

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

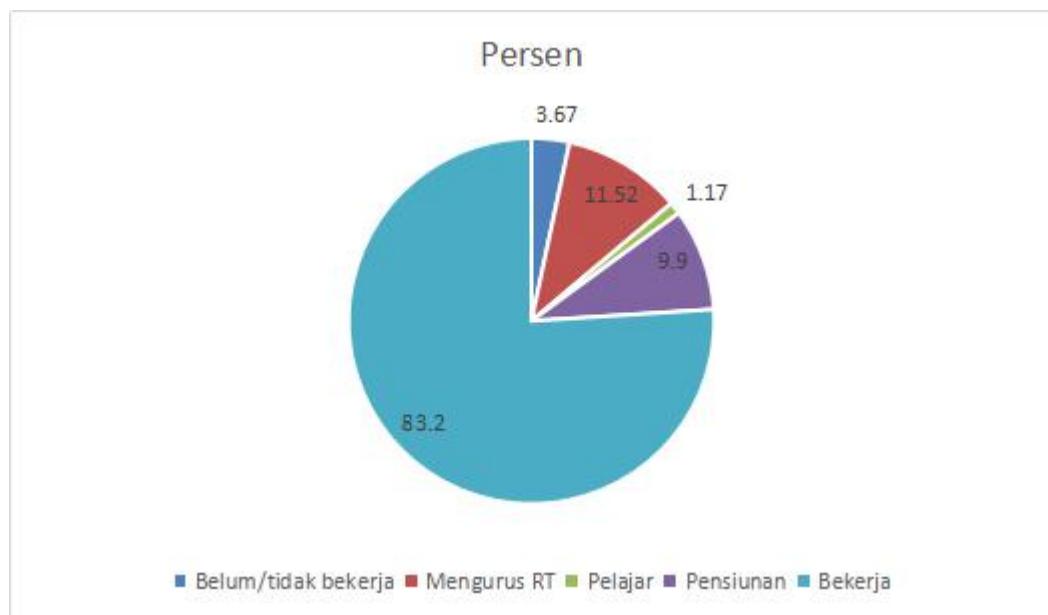
Data SIAK 2019 memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga di Kabupaten Sleman tergolong rendah. Tingkat pendidikan kepala keluarga dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu pendidikan rendah (dibawah SMA), pendidikan menengah (SMA), dan pendidikan tinggi yaitu dari Diploma sampai dengan S3. Data menunjukkan paling banyak kepala keluarga di Kabupaten Sleman berpendidikan menengah, yakni mencapai 196.789 jiwa atau 53,71 persen.

3.3.7 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Bekerja

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota, serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap

potensi ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Gambar 3.23 memperlihatkan persentase kepala keluarga berdasarkan status bekerja. Paling banyak kepala keluarga di Kabupaten Sleman adalah bekerja, tahun 2016 sebanyak 83,7 persen. Selain kepala keluarga yang berstatus bekerja, terdapat juga kepala keluarga yang status tidak bekerja yang terdiri dari tidak bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga.

Data SIAK tahun 2019 diketahui kepala keluarga yang statusnya tidak bekerja besarnya mencapai 26,26 persen yang terdiri atas pensiunan (9,9 persen), mengurus rumah tangga (11,52 persen), belum bekerja (3,67 persen), dan statusnya pelajar (1,17 persen). Ada hal yang menarik terkait dengan status pekerjaan kepala rumah tangga yang tidak bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari harus ditanggung oleh anggota keluarga lainnya yang bekerja.



Gambar 3.23 Persentase Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja Tahun 2019

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

Tabel 3.20 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Bekerja dan Kecamatan Tahun 2019

Kecamatan	Tidak/Belum Bekerja	Bekerja	Pelajar	Pensiunan	Mengurus RT
Gamping	825	26,485	246	1,775	2,193
Godean	668	20,144	98	1,402	1,607
Moyudan	357	9,554	34	1,215	1,036
Minggir	353	9,537	40	933	967
Seyegan	605	14,998	58	875	1,329
Mlati	638	25,692	298	1,795	2,523
Depok	691	32,088	666	3,406	3,755
Berbah	500	15,629	89	984	1,357
Prambanan	426	16,903	54	750	764
Kalasan	591	22,945	187	1,740	2,298
Ngemplak	484	17,490	168	1,458	1,396
Ngaglik	461	26,171	419	2,489	2,442
Sleman	687	19,820	125	1,357	1,690
Tempel	518	16,187	69	867	1,314
Turi	213	11,078	41	677	610
Pakem	186	10,895	81	950	962
Cangkringan	182	9,858	27	463	422
Jumlah	8,385	305,474	2,700	23,136	26,665

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

BAB IV

KUALITAS PENDUDUK

Penduduk memiliki peranan yang sangat strategis dalam proses pembangunan suatu wilayah. Penduduk merupakan subyek pelaksana utama sekaligus obyek penerima manfaat terbesar dari proses pembangunan. Dinamika kependudukan senantiasa berkembang dan sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan. Demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Jumlah penduduk yang besar yang diikuti oleh peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia akan menjadi modal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk besar yang tidak diikuti oleh peningkatan kualitas modal manusia hanya akan menjadi beban dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Kuantitas penduduk seperti jumlah dan pertumbuhan penduduk, kepadatan dan persebaran penduduk, komposisi penduduk menurut usia, jenis kelamin, pendidikan, status, dan lainnya telah dibahas dalam bab sebelumnya. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pengendalian kuantitas penduduk namun juga harus mengedepankan aspek kualitas penduduk sebagai tujuan utama pembangunan kependudukan. Dengan kata lain, kebijakan pembangunan kependudukan yang terarah dan terencana senantiasa berupaya melakukan pengendalian jumlah dan perkembangan penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penertiban dokumen kependudukan. Harapan akhir adalah tercipta penduduk yang berkualitas dan tersebar secara merata di seluruh wilayah serta mampu menikmati hasil-hasil pembangunan secara berkeadilan.

UNDP 1994 mendefinisikan pembangunan sebagai proses yang meningkatkan kesempatan orang untuk memilih, atau sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasi yang

paling manusiawi. Tujuan tersebut menurut Amartya Sen ketika paradigma pembangunan memberi peran kepada individu bukan sebagai obyek melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumberdaya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupan. Pembentukan kemampuan manusia seperti yang diharapkan ini tercermin dalam kesehatan, pengetahuan, dan keahlian yang meningkat, kemampuan untuk bekerja, menikmati hidup, dan aktif dalam kegiatan kebudayaan, sosial dan politik. Secara eksplisit kebijakan pembangunan manusia tersebut tertuang dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

4.1. Kesehatan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan SDG's adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (*tobacco control*), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Secara nasional MDG's yang dicapai pada tahun 2015 masih menyisakan persoalan yaitu permasalahan yang belum tuntas ditangani, seperti upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), pengendalian penyakit HIV/AIDS, dan malaria, terdapat hal-hal baru yang menjadi perhatiannya. Hal-hal tersebut, di antaranya yakni kematian akibat penyakit tidak menular (PTM); penyalahgunaan narkotika dan alkohol; kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas; asuransi kesehatan umum; dan kontaminasi dan polusi air, udara, dan tanah; serta penanganan krisis

dan kegawatdaruratan. Bagaimana dengan Kabupaten Sleman yang memiliki indikator pembangunan manusia angka harapan hidup tertinggi di Indonesia.

4.1.1. Angka Kematian Bayi

Kematian atau mortalitas adalah salah satu dari tiga komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk. Dua komponen proses demografi lainnya adalah kelahiran (fertilitas), dan mobilitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk di suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut (Bagus, 2008). Mati ialah peristiwa hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Dengan demikian keadaan mati selalu didahului oleh keadaan hidup. Mati tidak pernah ada kalau tidak ada kehidupan. Sedangkan hidup selalu dimulai dengan lahir hidup (*live birth*).

Angka atau tingkat kematian bayi merupakan ukuran kematian yang mengacu pada jumlah bayi yang meninggal dari bayi yang lahir hidup. Bayi lahir hidup yang dimasud adalah janin yang keluar dari rahim ibu dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan meskipun hanya sekejap. Bayi didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 0 tahun atau belum mencapai ulang tahun yang bertama.

Berdasarkan tabel berikut terlihat angka kematian bayi di Kabupaten Sleman sangat rendah yaitu 4 orang per 1.000 kelahiran hidup. Beberapa kecamatan di Kabupaten Sleman terlaporkan tidak memiliki kasus kematian bayi. Kecamatan Cangkringan, Prambanan dan Minggir merupakan tiga kecamatan dengan angka kematian bayi tertinggi di Kabupaten Sleman itupun nilai angka kematian bayi masih jauh dibawah nasional yang menyentuk angka 11 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian bayi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan kematian bayi perempuan. Meskipun angka kematian bayi di Kabupaten Sleman dan disetiap kecamatan relatif rendah, namun merujuk tujuan kesehatan SDG's adalah kesehatan bagi semua umur, maka kondisi ini perlu

mendapatkan perhatian. Angka kematian bayi di Kabupaten Sleman lebih disebabkan karena BBLR. Posisi di Kabupaten Sleman sudah mencapai "hardrock" atau angka kematian yang sangat kecil sehingga sulit untuk diturunkan karena dipengaruhi oleh faktor yang sangat sulit dikendalikan yaitu faktor genetik. Namun demikian upaya cakupan pelayanan kesehatan yang disertai dengan peningkatan mutu pelayanan, sistem rujukan yang optimal, serta peningkatkan kompetensi sumberdaya manusia pelayanan neonatal dan bayi harus tetap dilakukan dalam upaya menekan angka kematian bayi.

Tabel 4.1. Distribusi Angka Kematian Bayi menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Hidup			Jumlah Kematian Bayi			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	TOTAL
1.	Gamping	638	623	1261	4	5	9	6,27	8,03	7,14
2.	Godean	431	407	838	1	-	1	2,32	-	1,19
3.	Moyudan	167	164	331	-	-	-	-	-	-
4.	Minggir	209	194	403	1	2	3	4,78	10,31	7,44
5.	Seyegan	403	329	732	5	-	5	12,41	-	6,83
6.	Mlati	607	579	1186	2	-	2	3,29	-	1,69
7.	Depok	750	741	1491	3	1	4	4,00	1,35	2,68
8.	Berbah	291	457	748	-	-	-	-	-	-
9.	Prambanan	347	369	716	4	2	6	11,53	5,42	8,38
10.	Kalasan	469	397	866	-	2	2	-	5,04	2,31
11.	Ngemplak	420	385	805	2	3	5	4,76	7,79	6,21
12.	Ngaglik	573	654	1227	3	1	4	5,24	1,53	3,26
13.	Sleman	458	470	928	2	1	3	4,37	2,13	3,23
14.	Tempel	308	319	627	2	-	2	6,49	-	3,19
15.	Turi	226	236	462	1	1	2	4,42	4,24	4,33
16.	Pakem	217	224	441	3	-	3	13,82	-	6,80
17.	Cangkringan	195	205	400	2	2	4	10,26	9,76	10,00
KABUPATEN SLEMAN		6709	6753	13462	35	20	55	5,22	2,96	4,09

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri,

Angka kematian bayi dalam pembahasan ini dibedakan menjadi dua yaitu angka kematian neonatal dan angka kematian post neonatal. Angka kematian neonatal merupakan kematian bayi sebelum berumur satu bulan tetapi kurang dari satu tahun, sedangkan yang dimaksud dengan kematian lepas baru lahir atau *post neo natal death* merupakan kematian bayi setelah berumur satu bulan tetapi kurang dari satu tahun;

**Tabel 4.2. Distribusi Kematian Neonatal menurut Kecamatan
Di Kabupaten Sleman Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Hidup			Jumlah Kematian Neo-natal			Angka Kematian Neo Natal
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1.	Gamping	638	623	1.261	3	3	6	4,76
2.	Godean	431	407	838	1	0	1	1,19
3.	Moyudan	167	164	331	0	0	0	0
4.	Minggir	209	194	403	1	1	2	4,96
5.	Seyegan	403	329	732	4	0	4	5,46
6.	Mlati	607	579	1.186	2	0	2	1,69
7.	Depok	750	741	1.491	3	1	4	2,68
8.	Berbah	291	457	748	0	0	0	0
9.	Prambanan	347	369	716	2	2	4	5,59
10.	Kalasan	469	397	866	0	2	2	2,31
11.	Ngemplak	420	385	805	1	2	3	3,73
12.	Ngaglik	573	654	1.227	3	1	4	3,26
13.	Sleman	458	470	928	2	1	3	3,23
14.	Tempel	308	319	627	1	0	1	1,59
15.	Turi	226	236	462	1	1	2	4,33
16.	Pakem	217	224	441	3	0	3	6,80

17.	Cangkringan	195	205	400	0	2	2	5,00
KABUPATEN SLEMAN		6.709	6.753	13.462	27	16	43	3.19

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

Kematian neonatal pada umumnya dikarenakan asfiksia atau kondisi yang terjadi ketika bayi kekurangan oksigen sebelum, selama, dan setelah proses persalinan. Tanpa asupan oksigen yang cukup, jaringan dan organ tubuh bayi akan mengalami kerusakan. Bayi yang mengalami asfiksia bisa mengalami sianosis atau kondisi kuku, biru, dan bibir tampak kebiruan. Kondisi ini membutuhkan penanganan medis segera, karena semakin lama bayi tidak mendapatkan cukup oksigen, akan semakin besar pula risikonya mengalami kerusakan pada organ, seperti paru-paru, jantung, otak, dan ginjal. Penting bagi ibu hamil untuk rutin menjalani pemeriksaan kehamilan dengan USG agar kondisi kesehatan janin dapat terpantau dengan baik. mengkonsumsi makanan bernutrisi selama hamil sangat dianjurkan untuk meminimalkan resiko tersebut.

Tabel 4.3. Distribusi Kematian Post-Neonatal menurut Kecamatan Di Kabupaten Sleman Tahun 2019

No.	Kecamatan	Kelahiran Hidup			Kematian Post-Neonatal			Post-Neonatal
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1.	Gamping	638	623	1,261	1	2	3	2,38
2.	Godean	431	407	838	0	0	0	0
3.	Moyudan	167	164	331	0	0	0	0
4.	Minggir	209	194	403	0	1	1	2,48
5.	Seyegan	403	329	732	1	0	1	1,37
6.	Mlati	607	579	1,186	0	0	0	0
7.	Depok	750	741	1,491	0	0	0	0
8.	Berbah	291	457	748	0	0	0	0

9.	Prambanan	347	369	716	2	0	2	2,79
10.	Kalasan	469	397	866	0	0	0	0
11.	Ngemplak	420	385	805	1	1	2	2,48
12.	Ngaglik	573	654	1,227	0	0	0	0
13.	Sleman	458	470	928	0	0	0	0
14.	Tempel	308	319	627	1	0	1	1,59
15.	Turi	226	236	462	0	0	0	0
16.	Pakem	217	224	441	0	0	0	0
17.	Cangkringan	195	205	400	2	0	2	5,00
KABUPATEN SLEMAN		6.709	6.753	13.462	8	4	12	0.89

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

Berdasarkan tabel 4.2. dan 4.3. terlihat bahwa angka kematian bayi lebih banyak terjadi pada umur dibawah 1 bulan. Menurut Mosley dan Chan, angka kematian bayi dipengaruhi oleh faktor endogen yaitu biomedical dan faktor eksogen yaitu sosial ekonomi termasuk faktor ibu yaitu umur ibu waktu melahirkan, jarak antar anak dan paritas. Lingkungan baik udara, air, dan makanan menjadi mediator penyebab IMR. Kekurangan gizi (kalori, protein, vitamin dan mineral).

4.1.2. Angka Kematian Anak dan Balita

Peraturan perundangan No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kesempatan anak Indonesia untuk hidup sehat, tumbuh, dan berkembang secara optimal menjadi semakin terbuka. Dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial.

Tabel 4.4. menggambarkan bahwa anak-anak di Kabupaten memiliki derajat kesehatan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari 10.000 anak yang ada (1-5 tahun) hanya terdapat 8-9 anak yang mengalami kematian. Beberapa wilayah kecamatan tidak memiliki angka kematian anak, namun masih ada beberapa

kecamatan yang memiliki angka kematian anak melebihi angka kematian anak kabupaten. Jika merujuk pada amanah pembangunan keberlanjutan bidang kesehatan, upaya meningkatkan derajat kesehatan anak masih perlu diusahakan meskipun sangat susah untuk menurunkan akibat angka yang sudah rendah.

**Tabel 4.4. Distribusi Angka Kematian Anak menurut Kecamatan
Di Kabupaten Sleman Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Penduduk Usia 0-4 Tahun Semester I Tahun 2018*			Kematian Anak (Usia 1-<5 Tahun)			Angka Kematian Anak
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1.	Gamping	3,016	2,922	5,938	0	2	2	0.34
2.	Godean	2,127	2,040	4,167	0	0	0	-
3.	Moyudan	1,016	864	1,880	0	1	1	0.53
4.	Minggir	901	921	1,822	1	2	3	1.65
5.	Seyegan	1,630	1,522	3,152	4	0	4	1.27
6.	Mlati	3,042	2,784	5,826	1	5	6	0
7.	Depok	3,882	3,684	7,566	0	4	4	0.53
8.	Berbah	1,798	1,726	3,524	0	0	0	-
9.	Prambanan	1,740	1,678	3,418	3	3	6	1.76
10.	Kalasan	2,587	2,514	5,101	2	3	5	0.98
11.	Ngemplak	2,077	1,984	4,061	6	4	10	2.46
12.	Ngaglik	3,316	3,128	6,444	2	1	3	0.47
13.	Sleman	2,289	2,129	4,418	3	0	3	0.68
14.	Tempel	1,689	1,617	3,306	2	1	3	0.91
15.	Turi	1,214	1,098	2,312	2	0	2	0.87
16.	Pakem	1,164	1,137	2,301	3	1	4	1.74
17.	Cangkringan	994	928	1,922	2	2	4	2.08
KABUPATEN SLEMAN		34,482	32,676	67,158	31	29	60	0.89

Berbeda dengan angka kematian anak, angka kematian balita terlihat lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena angka kematian balita mengikutkan kelompok 0 tahun dalam perhitungannya. Sementara itu diketahui bahwa angka kematian 0 tahun atau angka kematian bayi mendominasi dalam perhitungan angka kematian balita. Artinya kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman dapat memfokuskan pada faktor endogen atau biomedical meskipun tetap memperhatikan faktor eksogen yaitu sosial ekonomi, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan kependudukan.

**Tabel 4.5. Distribusi Angka Kematian Balita menurut Kecamatan
Di Kabupaten Sleman Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Penduduk 0-4 Tahun			Kematian Balita			Angka Kematian Balita
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1.	Gamping	3.009	2.947	5.956	4	7	11	184,69
2.	Godean	2.119	2.04	4.159	1	0	1	24,04
3.	Moyudan	975	881	1.856	0	0	0	0,00
4.	Minggir	879	906	1.785	1	2	3	168,07
5.	Seyegan	1.616	1.527	3.143	5	0	5	159,08
6.	Mlati	3.035	2.778	5.813	3	0	3	51,61
7.	Depok	3.93	3.791	7.721	3	1	4	51,81
8.	Berbah	1.815	1.693	3.508	1	0	1	28,51
9.	Prambanan	1.767	1.707	3.474	4	2	6	172,71
10.	Kalasan	2.606	2.481	5.087	0	2	2	39,32
11.	Ngemplak	2.093	2.005	4.098	2	3	5	122,01
12.	Ngaglik	3.331	3.112	6.443	3	1	4	62,08
13.	Sleman	2.298	2.121	4.419	2	1	3	67,89
14.	Tempel	1.679	1.62	3.299	2	0	2	60,62
15.	Turi	1.214	1.095	2.309	2	1	3	129,93
16.	Pakem	1.167	1.131	2.298	3	0	3	130,55
17.	Cangkringan	987	955	1.942	2	3	5	257,47
KABUPATEN SLEMAN		2.873	2.772	67	38	23	61	90,63

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Sinkronisasi dan koordinasi program-program antarinstansi dan antara pemerintah dan swasta dan lembaga swadaya yang melibatkan peran aktif masyarakat perlu ditingkatkan. Dengan memperhatikan beragamnya faktor-faktor yang penyebab kematian bayi, anak dan balita, maka kontribusi berbagai sektor dalam mendukung upaya mencapai derajat kesehatan anak sangat diperlukan. Kontribusi ini harus diformulasikan sebagai kebijakan kesehatan anak yang menyeluruh dengan strategi-strategi khusus bagi berbagai tingkat penyedia pelayanan dan berbagai grup sasaran.

4.1.3. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu adalah kematian selama kehamilan dalam waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, disebabkan oleh kehamilan itu sendiri atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Masalah-masalah yang menjadi penyebab angka kematian ibu menurut WHO, yaitu pendarahan postpartum (setelah melahirkan). Pendarahan secara berlebihan setelah melahirkan yang menyebabkan ibu kehilangan banyak darah. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar, penyebab yang kedua adalah hipertensi. Perawatan dan pemeriksaan prenatal bisa mendekripsi dan menangani masalah, seperti halnya tekanan darah tinggi dan protein dalam urine. Ibu tanpa perawatan yang tepat, akan berkembang menjadi preeklampsia yang menyebabkan kematian jika sudah terlampaui parah. Gangguan hipertensi menjadi salah satu penyebab tertinggi kematian ibu terkait dengan kehamilan. Penyebab yang ketiga adalah infeksi. Wanita bisa mengalami infeksi akibat aborsi yang tidak aman, persalinan yang tidak sehat, ataupun persalinan yang sangat lama. Selain itu, kurangnya pemahaman dan informasi mengenai cara membersihkan area kewanitaan ataupun perawatan tubuh setelah melahirkan, dapat membuat ibu berisiko terkena infeksi. Jika infeksi ini tidak mendapat penanganan yang tepat maka kematian ibu bisa saja terjadi.

Tabel 4.6. menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Sleman sangat rendah yaitu 5 sampai 6 orang setiap 10.000 ibu yang melakukan persalinan. Beberapa kecamatan di Kabupaten tidak memiliki kasus angka kematian ibu karena melahirkan, namun kecamatan yang memiliki kasus kematian ibu terbaca per 1000 ibu yang melakukan persalinan.

Kecamatan Cangkringan memiliki kasus 1 orang ibu yang mengalami kematian ibu karena melahirkan atau terdapat 2 sampai 3 ibu setiap 1000 ibu yang melakukan persalinan. Angka tersebut sangatlah rendah, namun tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan adalah *zero accident*. Secara keseluruhan dalam penjabaran tentang angka kematian, dapat disimpulkan bahwa derajat kesehatan penduduk Kabupaten Sleman sangatlah baik.

Upaya yang harus dilakukan adalah mempertahankan angka yang sudah terlalu rendah dan diusahakan mencapai titik nol. Visi Kemenkes adalah mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong akan terwujud dengan memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan dan meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan.

Tabel 4.6. Distribusi Angka Kematian Ibu menurut Kecamatan Di Kabupaten Sleman Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Hidup			Jumlah Kematian Ibu				Angka Kematian Ibu
		L	P	Jumlah	Hamil	Bersalin	Nifas	Jumlah	
1.	Gamping	638	623	1.261	0	0	2	2	1,59
2.	Godean	431	407	838	0	0	0	0	0
3.	Moyudan	167	164	331	0	0	0	0	0
4.	Minggir	209	194	403	0	0	0	0	0
5.	Seyegan	403	329	732	0	0	0	0	0
6.	Mlati	607	579	1.186	0	0	0	0	0
7.	Depok	750	741	1.491	0	1	1	2	1,34
8.	Berbah	291	457	748	0	0	0	0	0
9.	Prambanan	347	369	716	1	0	0	1	1,40
10.	Kalasan	469	397	866	0	0	0	0	0
11.	Ngemplak	420	385	805	0	0	0	0	0
12.	Ngaglik	573	654	1.227	2	0	0	2	1,63
13.	Sleman	458	470	928	0	0	0	0	0
14.	Tempel	308	319	627	0	0	0	0	0
15.	Turi	226	236	462	0	0	0	0	0
16.	Pakem	217	224	441	0	0	0	0	0
17.	Cangkringan	195	205	400	0	0	1	1	2,50
KABUPATEN SLEMAN		6.709	6.753	13.462	3	1	4	8	0,59

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

4.1.2 Fertilitas

Fertilitas merupakan salah satu proses demografi yang akan mempengaruhi jumlah dan pertumbuhan penduduk. Fertilitas sama dengan kelahiran hidup (*livebirth*), yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda-tanda kehidupan misalnya berteriak, bernafas, jantung berdenyut, dan sebagainya. Fertilitas secara teoritis dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Freedman dengan pendekatan sosiologis melihat fertilitas tergantung pada norma tentang variabel antara dan nilai anak untuk keluarga. Beberapa peneliti melihat fertilitas sebagai fungsi ekonomi kehadiran anak dengan membandingkan antara biaya dan manfaat.

Fertilitas dalam kajian ini dihitung berdasarkan data registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. Perhitungan fertilitas yang paling mendasar adalah angka kelahiran kasar. Berdasarkan tabel berikut ini menunjukkan bahwa setiap 1000 penduduk di Kabupaten Sleman terdapat 9 sampai 10 kelahiran. Angka kelahiran kasar tertinggi di Kecamatan Cangkringan, Sleman, dan Mlati.

Tabel 4.7. Distribusi Parameter Kelahiran di Kabupaten Sleman Tahun 2019

Kecamatan	CBR	TFR	GFR	CWR
Gamping	8,79	1,11	52,65	24,51
Godean	8,99	1,13	48,07	23,83
Moyudan	8,85	1,11	41,36	23,52
Minggir	7,86	0,98	52,65	23,03
Seyegan	8,89	1,12	57,98	24,78
Mlati	10,08	1,28	50,20	24,61
Depok	9,16	1,16	46,41	23,46
Berbah	9,49	1,20	52,36	24,40
Prambanan	9,97	1,27	52,86	25,60
Kalasan	9,19	1,16	40,45	24,02
Ngemplak	9,47	1,20	50,92	25,79
Ngaglik	9,51	1,20	48,58	25,34
Sleman	10,50	1,34	52,27	25,10
Tempel	9,83	1,25	46,48	24,57
Turi	9,93	1,26	49,01	24,68
Pakem	8,73	1,10	47,06	24,36
Cangkringan	11,34	1,46	50,88	25,14
Jumlah	9,44	1,20	49,20	24,56

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2019

Berdasarkan angka kelahiran kasar dengan menggunakan Formula Bouge dapat dihitung angka kelahiran total yang menggambarkan jumlah anak yang dimiliki seorang perempuan selama masa reproduksinya yaitu 15-49 tahun. Angka total fertilitas di Kabupaten Sleman pun sudah sangat rendah dibawah 2,1. Hal ini menandakan kebijakan kependudukan lebih baik diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk sebagai variabel tidak langsung kuantitas penduduk.

Rendahnya angka fertilitas ini juga terlihat dari angka kelahiran umum atau sering disebut dengan GFR (Gross Fertility Rate). GFR merupakan jumlah kelahiran per 1000 perempuan umur 15-49 tahun. Berdasarkan tabel parameter fertilitas terlihat bahwa setiap 1000 perempuan umur 15-49 tahun terdapat 49 kelahiran hidup. Distribusi GFR tidak pernah diatas 60 dan dibawah 40.

Ukuran fertilitas yang lain adalah rasio anak dengan jumlah perempuan 15-49 tahun. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa setiap 100 perempuan umur 15-49 tahun terdapat 24 atau 25 anak. Rasio anak dan perempuan umur 15-49 tahun terendah di Kecamatan Minggir yaitu sebesar 23.

Berdasarkan Tabel 4.7 tingkat fertilitas di Kabupaten Sleman sudah sangat rendah meskipun dibeberapa kecamatan terdapat nilai diatas kabupaten. Tingkat fertilitas di Kabupaten Sleman juga berada pada titik yang sangat rendah sehingga upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mempertahankan nilai tersebut, dan seandainya memungkinkan ditingkatkan menjadi 2,1 untuk total fertilitasnya. Kebijakan mempertahankan nilai fertilitas lebih sulit dibandingkan dengan upaya menurunkannya karena fertilitas sangat dipengaruhi oleh faktor individu.

4.1.3. Keluarga Berencana

Fertilitas meskipun sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, lingkungan dan kebijakan, namun salah satu variabel yang berhubungan langsung adalah keluarga berencana. Persepsi atau norma masyarakat tentang keluarga berencana sangat mempengaruhi keputusan pasangan suami isteri dalam memutuskan menggunakan kontrasepsi. Kontrasepsi menurut teori Davis dan Blake merupakan salah satu variabel antara sosial ekonomi dalam pengaruhnya terhadap fertilitas.

Salah satu parameter keluarga berencana yaitu kesertaan KB atau disebut juga dengan prevalensi kontrasepsi. Ukuran ini didapatkan dari membandingkan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi dengan PUS secara keseluruhan. Pasangan usia subur didapatkan

dari pasangan suami isteri, dengan umur isteri antara 15-49 tahun. Berdasarkan tabel 4.8. terlihat bahwa prevalensi kontrasepsi di Kabupaten sudah sangat tinggi yaitu sebesar 77 persen yang berarti setiap 100 PUS maka 77 diantaranya menggunakan salah satu metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi yang dimaksud adalah metode kontrasepsi modern baik yang bersifat jangka panjang maupun tidak.

Kecamatan Minggir dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Sleman memiliki angka prevalensi terendah yaitu 70 persen. Namun tingkat fertilitas di Kecamatan Minggir sudah sangat rendah sehingga seyogyanya kebijakan kependudukan tidak diarahkan pada peningkatan peserta KB aktif namun lebih pada peningkatan kualitas metode kontrasepsi yang digunakan seperti pada penggunaan metode kontrasepsi mantap. Kebijakan ini juga relevan untuk wilayah kecamatan lain yang sudah memiliki tingkat prevalensi kontrasepsi tinggi.

Tabel 4.8. Parameter Keluarga Berencana menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2019

No.	Kecamatan	Peserta Aktif (PA) terhadap PUS	PA pemerintah	PA Swasta	Unmet Need terhadap PUS bukan Akseptor	Unmet Need terhadap PUS
1	GAMPING	78,92	32,18	67,82	-	7,54
2	GODEAN	76,63	28,51	71,49	-	9,66
3	MOYUDAN	76,76	32,52	67,48	28,13	6,68
4	MINGGIR	70,34	37,21	62,79	-	7,56
5	SEYEGAN	77,99	34,21	65,79	38,65	8,51
6	MLATI	75,88	38	62,00	-	9,47
7	DEPOK	76,48	25,58	74,42	-	8,47
8	BERBAH	77,25	31,07	68,93	-	7,54
9	PRAMBANAN	75,29	25,62	74,38	41,34	10,31
10	KALASAN	76,67	35,14	64,86	-	10,27
11	NGEMPLAK	76,55	44,68	55,32	48,35	8,40
12	NGAGLIK	76,74	28,63	71,37	-	6,38
13	SLEMAN	74,64	36,58	63,42	51,75	12,88
14	TEMPEL	78,06	31,31	68,69	36,64	7,20
15	TURI	78,11	38,57	61,43	46,41	9,27

16	PAKEM	77,02	37,34	62,66	47,41	10,42
17	CANGKRINGAN	79,03	52,78	47,22	45,08	8,77
	JUMLAH	76,74	33,55	66,45	43,84	8,82

Sumber: Dinas P3AP2KB Sleman, 2019

Tabel 4.8. diatas menjelaskan aspek yang menarik karena masyarakat Sleman lebih memilih pelayanan swasta untuk memenuhi kebutuhan kontrasepsi dibandingkan dengan pelayanan pemerintah. Sebanyak 66 persen PUS menggunakan pelayanan swasta untuk memenuhi kebutuhan kontrasepsinya, bahkan di Kecamatan Depok, Prambanan, dan Godean berada diatas 70 persen. Terdapat dua kecamatan dengan persentase dibawah 60 yaitu Kecamatan Cangkringan dan Ngemplak.

Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Bukannya pelayanan swasta berbayar dan lebih mahal? Apakah kontrasepsi sudah menjadi kebutuhan sehingga masyarakat rela mengeluarkan uang untuk mendapatkan alat kontrasepsi yang dibutuhkan? Apakah alat kontrasepsi swasta lebih nyaman dan aman? Beberapa pertanyaan ini patut dilontarkan karena di Kabupaten Sleman masih dijumpai keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan serta tingkat keparahan kemiskinan pun juga masih ada.

Jika kenyamanan dan keamanan menjadi alasan PUS menggunakan pelayanan swasta, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas alat kontrasepsi yang diberikan pada masyarakat. Kusumaningrum (2009) menyatakan pengetahuan tentang alat kontrasepsi mempengaruhi pemilihan terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang akan digunakan. Angriani (2019) lebih lanjut menyatakan alasan pemilihan alat kontrasepsi adalah manfaat, kenyamanan, kemudahan, dan biaya.

Kekhawatiran kegagalan atau efek samping suatu jenis kontrasepsi menyebabkan pasangan usia subur tidak berkeinginan menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka tidak menginginkan kehamilan. Kondisi seperti inilah yang disebut dengan *unmet need* atau kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi. *Unmet need* dapat disebabkan karena ketersediaan alat kontrasepsi tidak sesuai dengan yang diinginkan sehingga masyarakat tidak

berkeinginan menggunakan alat kontrasepsi atau alat kontrasepsi tersedia namun masyarakat khawatir akan efek samping alat kontrasepsi.

“*Unmet Need*” atau kebutuhan KB yang tidak terpenuhi dapat digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh pelayanan program KB telah memenuhi keperluan mereka yang membutuhkan. Angka *unmet need* merupakan persentase wanita kawin yang sedang tidak memakai alat/cara KB dan tidak ingin punya anak lagi atau ingin menunda kelahiran berikutnya. Wanita yang memerlukan alat/cara KB untuk menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan alat/cara KB (*unmet need for spacing*) mencakup wanita hamil yang kandungannya tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*) pada waktu itu, wanita yang belum mulai haid setelah melahirkan anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*) pada waktu itu, dan wanita yang tidak sedang hamil atau sudah mulai haid setelah melahirkan yang tidak menggunakan alat/cara KB dan ingin menunda kelahiran anak berikutnya dua tahun atau lebih. Wanita yang memerlukan KB untuk membatasi kelahiran (*unmet need for limiting*) mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan, wanita yang belum haid setelah melahirkan anak yang tidak diinginkan, dan wanita yang tidak hamil dan sudah mulai haid tetapi tidak memakai alat/cara KB namun tidak ingin anak lagi.

Terdapat tiga pendekatan dalam pengukuran kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi ini yaitu pendekatan istri, suami, dan pasangan. Pendekatan yang selama ini digunakan adalah pendekatan istri. Dalam konsep tersebut, perempuan menikah yang masih dalam usia subur, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi dikatakan terpenuhi kebutuhannya, padahal perempuan tersebut sudah tidak ingin mempunyai anak lagi, atau bermaksud mengatur jarak kelahiran. Dalam perkembangannya pendekatan yang digunakan untuk mengukur kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi adalah pendekatan suami pendekatan pasangan. Dalam konsep ini memandang kebutuhan kontrasepsi tidak terbatas pada perempuan saja, namun menyertakan persoalan penggunaan kontrasepsi pada laki-laki, dan pada pasangan usia

subur. Pendekatan pasangan mengukur kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi pada keduanya, baik suami maupun istri.

Pasangan usia subur dengan kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi ini selanjutnya menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam suatu wilayah. Untuk itu, wilayah tersebut akan berusaha untuk menurunkan angka kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi ini. Upaya penurunan angka kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi ini merupakan strategi yang cocok sebagai upaya pencapaian program keluarga berencana. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang termasuk angka kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi di suatu daerah, maka angka kelahiran dengan kehamilan pada waktu yang tidak diinginkan di daerah tersebut dapat dipastikan menjadi tinggi. Sehingga menyebabkan tingginya angka aborsi, dan angka kematian ibu (Ashford, 2003).

Unmet need Kabupaten Sleman 8,9 terendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Yogyakarta. Namun demikian jumlah yang tidak ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi dibandingkan dengan PUS yang tidak menggunakan kontrasepsi cukup besar yakni mencapai 43 persen, bahkan di Kecamatan mencapai 51 persen.

Fenomena *unmet need* KB bersifat multidimensial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan. Salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping. Oleh sebab itu, gerakan meniadakan *unmet need* KB harus mempertimbangkan berbagai faktor tersebut. Setidaknya, akses tempat pelayanan KB harus menjangkau ke seluruh PUS sasaran dan kualitas pelayanannya harus sesuai dengan harapan masyarakat.

Hal penting lainnya yang tidak bisa diabaikan adalah memperkuat advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB. Kegiatan advokasi KIE KB yang melibatkan Penyuluh KB dan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) maupun kader kesehatan lainnya selain harus menjangkau seluruh *unmet need* KB, juga harus mampu menjawab berbagai kegalauan PUS yang

belum ber-KB karena alasan agama, tradisi dan budaya. Termasuk mampu meyakinkan mereka bahwa menggunakan kontrasepsi modern itu sangat bermanfaat bagi keluarga dalam perencanaan masa depannya untuk mencapai keluarga berkualitas (bahagia dan sejahtera).

4.1.4. Pernikahan, Talak, Rujuk

Perkawinan menurut Undang-Undang adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri, bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pemerintah pada tahun 2019 mengeluarkan peraturan memperbaiki syarat pernikahan. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperbarui dengan Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia wali nikah dapat dibagi menjadi 2, yaitu wali nasab dan wali hakim.

1. Wali nasab yaitu nasab adalah wali nikah dari pengantin perempuan yang berasal dari keluarganya. Wali nasab bisa bapak kandung, saudara kandung, saudara yang satu bapak, keponakan kandung, keponakan yang satu bapak, saudara kandung dari bapak atau paman, saudara sebapak dari bapak (paman), sepupu dari saudara laki-laki bapak sekandung atau saudara laki-laki sebapak, dan seterusnya keatas dan kebawah.
2. Wali hakim, adalah wali nikah yang mewakilkan keluarga karena alasan tertentu yang tidak berasal dari keluarga, dalam hal ini dari pihak yang berwenang mengurus pernikahan yaitu kementerian agama. Dengan syarat pengantin wanita sama sekali tidak memiliki wali nasab atau dalam kondisi wali nasab tidak dapat hadir karena jauh, sedang haji atau berada dalam tempat yang tidak bisa ditemui.

Berdasarkan Tabel 4.9. terlihat bahwa 93 persen pernikahan di Kabupaten Sleman menggunakan wali nasab. Terdapat satu kecamatan dengan pernikahan wali nasab sebesar 89 persen. Dalam bahasa Arab, nasab berarti keturunan atau kerabat, yaitu pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Nasab adalah pertalian

kekeluargaan yang didasarkan pada akad perkawinan yang sah. Dalam ajaran fikih Islam, seorang anak berasab kepada ayahnya.

Berdasarkan Tabel 4.9 juga terlihat bahwa kasus poligami di Kabupaten Sleman cukup tinggi. Pada tahun 2019 dari 27 pernikahan yang tercatat secara Islam ada 11 pernikahan poligami. Catatan kasus poligami antara 3-4 terjadi di Kecamatan Gamping, Pakem, dan Depok. Meski melegalkan poligami, pada dasarnya hukum perkawinan Indonesia mendukung monogami. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-undang perkawinan (UUP) tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa seorang pria hanya boleh beristri satu dan sebaliknya.

Tabel 4.9 menjelaskan persoalan sosial yang perlu diperhatikan dalam masyarakat yakni pernikahan dibawah umur. Undang-Undang Perkawinan baru dalam merevisi UUP tahun 1974 salah satunya tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas). Artinya pernikahan yang dilakukan dibawah umur 19 tahun masuk dalam kategori pernikahan anak, dan seandainya tetap diselenggarakan karena suatu hal harus melalui jalur dispensasi menikah yang disahkan oleh kantor pengadilan.

Sebanyak 77 persen pernikahan usia dini terjadi karena umur laki-laki masih dibawah umur. Sementara itu 16 persen pernikahan dini karena umur perempuan masih dibawah umur dan sebanyak 8 persen pelanggaran keduanya. Undang-undang perkawinan merevisi umur minimal pernikahan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun membuka peluang semakin meningkatnya kasus pernikahan di bawah umur.

Pemerintah tidak hanya bertanggungjawab mensosialisasikan undang-undang pernikahan baru, namun lebih mengarahkan dampak negatif dari pernikahan dibawah umur. Ancaman kesehatan, ketahanan keluarga dan guncangan ekonomi perlu selalu disampaikan kepada remaja agar melakukan perencanaan matang dalam menentukan biduk rumah tangga.

Tabel 4.9. Distribusi Pernikahan, Wali Nikah, Cerai, dan Rujuk menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2019

No.	KECAMATAN	Wali		Nikah		Dibawah Umur			Cerai	Rujuk
		Nasab	Hakim	Campur	Poligami	L	P	L+P		
1	GAMPING	501	40	0	4	6	0	4	0	0
2	GODEAN	401	37	1	0	6	0	0	0	0
3	MOYUDAN	158	18	0	0	1	0	0	0	0
4	MINGGIR	161	10	0	0	0	1	0	0	0
5	SEYEGAN	277	27	0	0	2	2	0	0	0
6	MLATI	566	29	2	1	5	4	0	0	0
7	DEPOK	837	67	4	3	8	2	1	0	0
8	BERBAH	317	27	1	0	8	2	1	0	0
9	PRAMBANAN	329	21	0	1	6	0	0	1	0
10	KALASAN	521	54	1	0	4	0	1	0	0
11	NGEMPLAK	369	19	0	1	5	0	0	0	0
12	NGAGLIK	543	40	4	0	4	0	0	7	0
13	SLEMAN	458	41	1	0	0	2	0	0	0
14	TEMPEL	318	16	0	0	1	0	0	0	0
15	TURI	259	21	1	0	7	0	0	0	1
16	PAKEM	226	29	0	4	1	1	0	0	0
17	CANGKRINGAN	194	15	1	1	5	0	0	0	0
	SLEMAN	6435	511	16	15	69	14	7	8	1

Sumber: Kantor Kementerian Agama Sleman

4.1.5. Pendidikan

Investasi dapat dilakukan bukan saja pada fisik, tetapi juga pada bidang non fisik. Investasi fisik meliputi bangunan pabrik dan perumahan

karyawan, mesin-mesin dan peralatan, serta persediaan (bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi). Investasi non fisik meliputi pendidikan, pelatihan, migrasi, pemeliharaan kesehatan dan lapangan kerja. Investasi non fisik dikenal dengan investasi sumber daya manusia adalah sejumlah dana yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi. Investasi yang demikian disebut dengan *human capital*. Istilah modal manusia (*human capital*) ini dikenal sejak tiga puluh tahun lalu ketika Gary S. Becker, seorang penerima Nobel di bidang ekonomi membuat sebuah buku yang berjudul *Human*. Setelah itu Theodore W. Schultz dan ekonom lain mulai membahas dampak investasi sumber daya manusia bagi pertumbuhan ekonomi.

Parameter yang dapat digunakan untuk mengukur derajat pendidikan suatu wilayah adalah angka partisipasi kasar atau sering disingkat dengan APK. Angka partisipasi kasar dihitung dengan membandingkan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada jenjang pendidikan tertentu. Contoh angka partisipasi kasar sekolah dasar merupakan perbandingan antara siswa sekolah dasar dengan jumlah penduduk umur 7-12 tahun pada suatu wilayah tertentu. Angka partisipasi kasar dapat melebihi 100 karena jumlah siswa jenjang pendidikan tertentu melebih jumlah penduduk pada jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar pada jenjang sekolah dasar, laki-laki lebih baik dari pada perempuan. Tidak semua perempuan umur 7-12 tahun di Kabupaten Sleman menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Kondisi APK SD yang paling jelek adalah Kecamatan Minggir dengan nilai 83, artinya dari 100 penduduk usia 7-12 tahun di Kecamatan Minggir yang sedang menempuh pendidikan sekolah dasar hanya 83 orang.

Kondisi pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan pertama sedikit lebih baik. Secara umum penduduk umur 13-15 tahun di Kabupaten Sleman telah menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan pertama. Kondisi ini terjadi baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian untuk Kecamatan Cangkringan, Seyegan, Berbah dan Kalasan angka partisipasi kasar SMP

belum mencapai 100 dan dibawah 90.

Kondisi Tabel 4.10 ini menunjukkan kualitas pendidikan dasar di Sleman, utamanya yang terjadi dibeberapa kecamatan perlu mendapatkan perhatian. Sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama merupakan pendidikan dasar yang seharusnya terentaskan untuk Yogyakarta yang memiliki predikat sebagai Kota Pelajar. Amanah pendidikan telah dicanangkan sejak tahun 1994 dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan pada tahun 2006 tekanan tersebut diperkuat dengan diterbitkan Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa pendidikan termasuk dalam urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Berdasarkan PP tersebut maka Pendidikan termasuk urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar.

Tabel 4.10. Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2019

No.	Kecamatan	APK SD			APK SMP		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	BERBAH	93,44	82,91	111,94	78,29	90,75	84,38
2	CANGKRINGAN	94,28	91,3	92,82	71,45	61,3	66,54
3	DEPOK	115,14	114,7	113,16	107,05	100,96	104,09
4	GAMPING	102,38	95,96	96,05	97,07	95,01	96,06
5	GODEAN	95,83	98,03	96,45	92,4	108,64	100,27
6	KALASAN	100,94	101,42	100,19	82,35	86,71	84,37
7	MINGGIR	84,39	85,48	83,27	119,94	126,59	123,09
8	MLATI	94,87	94,22	94,18	100,19	97,08	98,69
9	MOYUDAN	100,63	96,75	96,06	151,4	156,14	153,68
10	NGAGLIK	93,79	93,14	91,01	112,66	119,23	115,82
11	NGEMPLAK	94,29	90,53	92,31	96,4	96,2	96,31
12	PAKEM	108,4	104,82	104,71	179,02	167,3	173,15
13	PRAMBANAN	116,37	109,03	112,1	168,83	182,27	175,53
14	SEYEGAN	92,85	89,59	90,52	77,98	70,84	74,49
15	SLEMAN	118,92	115,78	116,77	125,17	122,68	123,96
16	TEMPEL	101,02	96,74	97,6	110,26	107,77	109,06
17	TURI	93,93	91,67	91,9	113,99	101,68	108,04
Jumlah		101,37	98,83	100,04	107,38	108,5	107,92

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2019

Bappenas (2009) menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka partisipasi kasar adalah kemiskinan. Pengaruh kemiskinan terhadap APK adalah negatif, artinya semakin penduduk terjebak dalam kemiskinan maka angka partisipasi kasarnya rendah. Kemiskinan menyebabkan beberapa anak tidak mampu mengakses sekolah karena tidak memiliki waktu cukup untuk belajar karena tekanan ekonomi. Biaya pendidikan dasar

dengan adanya regulasi Wajar 9 tahun menjadi tanggung jawab pemerintah atau tidak berbayar. Aksesibilitas fasilitas pendidikan bisa juga dipengaruhi oleh derajat kesehatan anak sehingga mereka tidak memungkinkan untuk sekolah. Beberapa faktor ini harus diurai satu persatu sehingga akan terumuskan kebijakan pendidikan yang tepat.

Indikator pendidikan lain adalah minat baca. Pendidikan formal sebagai indikator kualitas pendidikan, namun minat baca yang tinggi mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga mampu menguasai dunia. Minat baca yang dimaksud dalam kajian ini adalah minat membaca buku bukan membaca pengetahuan yang ada dalam media sosial. Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perpusatakaan di Kabupaten Sleman, pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang luar biasa. Dari 100 masyarakat Sleman sebanyak 57 orang memiliki minat baca. Kondisi ini sangat bagus mengingat membaca adalah jendela dunia.

Perpustakaan yang representatif dan didukung dengan koleksi buku yang lengkap, telah memotivasi para pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum untuk memanfaatkan perpustakaan yang ada di Sleman. Kabupaten Sleman memiliki 873 perpustakaan dengan koleksi buku yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah mencapai 34.815 judul buku dengan jumlah eksemplar sebanyak 62.847 eksemplar. Pemerintah Kabupaten Sleman telah memiliki 5 armada keliling yang menjangkau 60 lokasi layanan. Selain itu, terdapat juga kantong-kantong perpustakaan yang dikelola oleh desa dan masyarakat setempat. Hingga saat ini Kabupaten Sleman memiliki kantong perpustakaan di 18 lokasi. Pemerintah Kabupaten Sleman juga membentuk rintisan desa gemar membaca di 8 lokasi. Keberadaan perpustakaan desa inilah yang hendaknya dapat terus dikembangkan baik melalui penataan manajemen pengelolaan perpustakaan desa, maupun melalui pencanangan berbagai inovasi yang tujuannya adalah menumbuhkembangkan minat baca serta optimal.

4.1.6. Ketenagakerjaan

Sumber daya manusia atau juga sering disebut sebagai *human capital* memiliki dua peran baik sebagai tujuan pembangunan maupun sebagai input pembangunan. Sebagai input pembangunan, kualitas tenaga kerja menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja menjadi faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas-aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia atau tenaga juga menjadi salah satu fokus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY tahun 2020. Tujuannya adalah penyiapan dan ketersediaan SDM atau tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing yang dapat memenuhi permintaan dunia usaha baik di tingkat lokal, nasional hingga pasar global dapat mendukung ketercapaian program pembangunan di pusat maupun di daerah. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara sinergis oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya melalui pendidikan, latihan dan pemagangan. Menurut ILO (*International Labor Organization*) membagi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dibagi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang tidak bekerja inilah yang disebut pengangguran terbuka.

Tabel 4.11 Distribusi Ketenagakerjaan menurut Kecamatan Di Kabupaten Sleman Tahun 2019

	% Bekerja	Setengah Pengangguran	% pengangguran	TPAK
Depok	97,42	22,39	2,58	76,60
Mlati	96,21	30,04	3,79	75,88
Sleman	96,14	44,05	3,86	72,15
Gamping	97,23	33,77	2,77	75,68
Turi	97,67	23,71	2,33	77,77
Tempel	97,55	35,06	2,45	73,14
Seyegan	93,37	34,63	6,63	72,96
Minggir	96,09	30,95	3,91	79,37
Moyudan	97,02	31,03	2,98	73,15
Godean	94,80	36,86	5,20	72,22

Kalasan	96,37	27,62	3,63	82,52
Prambanan	96,52	24,99	3,48	73,19
Berbah	95,69	28,40	4,31	75,37
Ngaglik	95,16	36,72	4,84	72,32
Pakem	97,48	34,39	2,52	72,33
Cangkringan	96,01	28,14	3,99	70,07
Ngemplak	96,25	40,13	3,75	70,19
Kabupaten Sleman	96,31	31,74	3,69	74,68

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Sleman, 2019

Tabel 4.11 menunjukkan 96 persen angkatan kerja telah bekerja, artinya 4 persen penduduk menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Tingginya persentase angkatan kerja yang bekerja ini terjadi disemua kecamatan, yakni diatas 90 persen. Kecamatan Seyegan merupakan satu-satunya kecamatan yang memiliki persentase dibawah 95 persen. Kondisi ketenagakerjaan yang sangat baik, karena semua angkatan kerja terserap dalam lapangan pekerjaan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana kualitas pekerja? Apakah mendapatkan upah yang layak?

Salah satu indikator ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas tenaga kerja adalah setengah penganggur. Setengah penganggur dapat dilihat melalui 3 aspek yaitu pendidikan, upah dan jam kerja. Pada pembahasan ini setengah penganggur dilihat dari jam kerja yakni dibawah 35 jam per minggu. Berdasarkan tabel 4.11 terlihat 32 persen pekerja bekerja dibawah 35 jam per minggu. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 32 dari 100 pekerja belum termanfaatkan secara optimal. Kecamatan Sleman dan Ngemplak memiliki sekitar 40 persen pekerja setengah penganggur, sementara itu banyak juga kecamatan yang memiliki angka setengah penganggur dibawah 30 persen. Optimalisasi waktu kerja perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Ukuran ketenagakerjaan lain adalah tingkat partisipasi angkatan kerja atau disebut juga dengan TPAK. TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi barang dan

jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

Tabel 4.11 menunjukkan diantara 100 penduduk usia kerja terdapat 75 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja atau dengan kata lain diantara 100 orang penduduk yang berumur 15 tahun keatas, sebanyak 75 orang yang masuk dalam kelompok angkatan kerja atau 25 orang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang sekolah, ibu rumah tangga, pensiun, dan orang yang mengalami keterbatasan atau cacat. Tabel tersebut juga menjelaskan dari 75 persen tersebut sebanyak 96 persen terserap sebagai pekerja.

Tabel 4.12. Distribusi Lapangan Pekerjaan menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2019

Kecamatan	Pertanian	Manufaktur	Jasa
Depok	5,94	18,03	76,03
Mlati	13,54	21,57	64,89
Sleman	24,50	25,38	50,13
Gamping	15,33	20,52	64,15
Turi	48,83	12,40	38,77
Tempel	29,88	21,99	48,13
Seyegan	11,06	8,39	80,55
Minggir	41,07	17,46	41,47
Moyudan	32,71	13,21	54,08
Godean	17,57	17,92	64,51
Kalasan	13,10	21,68	65,22
Prambanan	26,65	33,31	40,04
Berbah	26,14	20,85	53,01
Ngaglik	18,25	17,95	63,80
Pakem	24,26	15,00	60,74
Cangkringan	29,58	24,81	45,61
Ngemplak	29,90	18,94	51,16
Kabupaten Sleman	21,34	20,26	58,40

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Sleman, 2019

Tabel 4.12. menggambarkan sektor jasa di Kabupaten Sleman memiliki daya tampung melebihi sektor yang lain. Sekitar 58 persen pekerja di Kabupaten Sleman berada pada sektor jasa, dan sekitar 21 persen yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor jasa meliputi perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan dan komunikasi, jasa keuangan,

persewaan dan perusahaan serta sektor jasa lainnya. Kabupaten Sleman sebagai pusat pertumbuhan perguruan tinggi baik negeri dan swasta telah membuka sektor jasa ikutan yang melayani kebutuhan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi di Kabupaten Sleman bergantung pada sektor jasa.

Besarnya kontribusi sektor jasa saat ini tidak lain adalah wujud dari transformasi ekonomi Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Perekonomian nasional yang awalnya ditopang oleh sektor primer (pertanian dan pertambangan) beralih ke sektor sekunder (industri manufaktur), lalu mulai beralih ke sektor tersier (jasa). Sedangkan untuk Kabupaten Sleman langsung mengalami lonjakan dari sektor primer ke sektor tersier. Secara teori fungsi sektor jasa adalah sebagai penghubung antara berbagai sektor dan konsumen maupun modal. Sekitar 34% dari total output sektor jasa di Indonesia digunakan untuk input antara pada sebuah aktivitas produksi dan kontribusi sektor jasa terhadap total input antara mencapai 16% (Indonesia Services Dialogue, 2018). Selanjutnya transformasi menuju sektor jasa dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor jasa secara langsung dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja sebuah negara. Rasio upah terhadap produktivitas pada sektor jasa di Indonesia mencapai angka 40%, lebih tinggi dibandingkan dengan sektor manufaktur yang di bawah 20% dan sektor pertanian yang sebesar 30% (Tadjoeddin & Chowdhury, 2018).

Terdapat 21 persen pekerja di Kabupaten Sleman masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian, bahkan di Kecamatan Turi dan Minggir masih sebesar 40 persen. Sektor pertanian di Kabupaten Sleman perlu mendapatkan perhatian serius mengingat Kabupaten Sleman sebagai kota jasa yang notabene konversi lahan dari sektor pertanian ke non pertanian sebagai sebuah tuntutan. Lahan bagi petani merupakan modal untuk meningkatkan kesejahteraan. Otto Soemarwoto dalam kajian menyatakan bahwa petani untuk hidup layak paling tidak harus memiliki

0,25 Ha lahan pertanian. Penelitian ini memang belum memperhatikan intensifikasi lahan. Permasalahan muncul ketika berhubungan dengan biaya dan kemampuan. Pengolahan lahan pertanian plus jelas membutuhkan ketrampilan dan kemampuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal selain biaya tambahan.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan petani mulai dari regulasi pembatasan konversi lahan pertanian, pertanian mina padi, tumpang sari, optimalisasi pemanfaatan lahan kering dengan tanaman pangan berkelanjutan. hingga proses pemasaran produk dengan satu tujuan kesejahteraan petani. Semua kebijakan ini memiliki satu muara yaitu peningkatan kesejahteraan petani.

4.1.7. Dokumen Kependudukan

UNSD (*United Nation fo Statistics Document*) menyebutkan definisi dari pencatatan sipil atau *civil registration* adalah upaya perekaman secara universal, kontinu, permanen, dan wajib bagi setiap kejadian penting melalui kebijakan dan peraturan yang berlaku di setiap negara. Ruang lingkup kejadian penting sebagaimana dimaksud sebelumnya terdiri atas pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, adopsi, dan kematian. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjalankan fungsi pengelolaan suatu negara. Keberadaan proses pencatatan terhadap kejadian-kejadian penting tersebut sebelumnya secara internasional telah disebut dalam suatu terminologi, yaitu CRVS (*Civil Registration and Vital Statistics*).

Fungsi dari keberadaan CRVS ini, di antaranya, adalah sebagai alat pengamanan dan pengakuan terhadap identitas penduduk, petunjuk adanya hubungan kekeluargaan, status kewarganegaraan, serta beberapa hak ikut lainnya, seperti perlindungan sosial dan warisan. Jika fungsi tersebut telah terlaksana, maka setiap individu penduduk akan lebih mudah mengakses berbagai macam fasilitas negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Akan tetapi, pada kondisi tertentu, seperti saat bencana atau saat kondisi krisis ekonomi maupun sosial melanda suatu wilayah, kepemilikan

status sipil tiap individu penduduk akan menjadi rentan. Oleh karena itu, saat ini pengembangan CRVS juga dikaitkan dengan teknologi yang membuat sistem pencatatan dan perekaman itu menjadi efisien dan secara cepat menjangkau setiap elemen objek pencatatan dalam kondisi apa pun.

Data dari CRVS memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan data dari sensus penduduk dan survei rumah tangga yang selama ini selalu diandalkan dalam setiap perencanaan pembangunan. Di antara keunggulan itu adalah data CRVS dapat menggambarkan dinamika kependudukan, terutama dari sisi *time framing* dan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, misalnya di bidang kesehatan. Data dari CRVS ini juga mampu mencegah ketidakadilan terhadap akses pelayanan. Selain itu, cakupan data CRVS bersifat menyeluruh sejak dari unit administrasi paling rendah sampai dengan tingkat nasional. Keunggulan CRVS juga dapat dikaitkan dengan proses pendataan yang lebih mengutamakan akurasi dengan bekerja sama atau memberdayakan para pemangku kepentingan di tingkat lokal atau di tingkat bawah untuk proses perekaman. Dengan cara ini, maka tingkat akurasi data yang dihasilkan oleh CRVS diharapkan lebih tinggi karena melibatkan pemangku lokal. Akan tetapi, jika pemangku lokal di masyarakat tidak melakukan proses perekaman data dengan baik, maka kualitas data tersebut akan terpengaruh juga. Oleh karena itu, proses pemantauan atau *monitoring* sampai level terbawah perlu dan harus dilakukan.

CRVS ini memiliki beberapa komponen perekaman data penting kependudukan, yaitu pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, serta pencatatan perkawinan dan perceraian. Pencatatan kelahiran yang berfungsi untuk mengidentifikasi jumlah penduduk yang membutuhkan pelayanan kesehatan, baik untuk ibu maupun anak. Selain itu, pencatatan ini dapat pula digunakan untuk merancang pembangunan di masa depan terkait dengan berkembangnya generasi penerus dalam suatu negara.

Pencatatan kematian berfungsi untuk menyediakan status hukum dari suatu keluarga, misalnya yang berhubungan dengan hak-hak yang dipindahkan kepada individu keluarganya pasca kematian. Selain itu, pencatatan kematian

ini juga berfungsi untuk mengetahui penyebab kematian (*causes of death/COD*) yang sangat erat hubungannya dengan perencanaan pembangunan kesehatan. Beberapa penyebab kematian yang telah diketahui kemudian dapat menjadi materi evaluasi terhadap arah penyediaan fasilitas kesehatan serta beberapa program pembangunan.

Pencatatan yang lain adalah pencatatan perkawinan dan perceraian. Pencatatan ini, khususnya yang terkait perceraian, berfungsi untuk memastikan hak-hak perempuan dalam mengakses fasilitas penghidupan, khususnya properti (rumah atau tempat tinggal). Di samping itu, pencatatan ini juga dapat membantu pencatatan status anak dalam upaya memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di suatu negara untuk tumbuh kembangnya anak tersebut.

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan Hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi biodata, KK, KTP, surat kependudukan dan akta pencatatan sipil. Akta kelahiran sebagai salah satu dokumen kependudukan yang memiliki manfaat antara lain sebagai wujud pengakuan negara atas status identitas individu, status kependudukan dan status kewarganegaraan; sebagai dasar pembentukan NIK dan persyaratan pembuatan KTP dan KK, Sebagai dasar legalitas penentuan hubungan ahli waris; dan sebagai syarat pengurusan aspek lain seperti pendaftaran Pendidikan mulai dari tingkat dini (TK) sampai perguruan tinggi, sebagai dokumen persyaratan melamar pekerjaan, termasuk menjadi PNS, Anggota TNI dan POLRI, dan sebagai dokumen penting dalam keemigrasian.

Tabel berikut ini menggambarkan bahwa 47 persen dari penduduk di Kabupaten Sleman belum memiliki akta kelahiran, bahkan dibeberapa kecamatan penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran hingga diatas 50 persen. Tingginya penduduk yang belum memiliki akta kelahiran ini disebabkan kelompok umur tua yang pada saat dilahirkan belum ada regulasi terkait pengurusan dokumen kependudukan kelahiran. Kondisi ini terlihat

dari kecilnya jumlah penduduk umur dibawah 18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran yaitu 7 persen.

Tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Sleman masih panjang. Tabel 4.12. menunjukkan bahwa dokumen-dokumen vital banyak yang belum dimiliki oleh masyarakat. Terdapat 71 persen perkawinan belum tercatat, bahkan Kecamatan Gamping hingga mencapai 77 persen. Persentase terendah masyarakat yang belum melakukan pencatatan perkawinan berada di Kecamatan Cangkringan yakni sebesar 57 persen.

Informasi pencatatan perkawinan ini didapatkan dari informasi kartu keluarga. Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah apakah memang penduduk belum mencatatkan perkawinannya karena tidak tahu atau karena kendala program sistem administrasi kependudukan. Harapannya kemungkinan kedua yang terjadi artinya aktualnya masyarakat sudah mencatatkan perkawinannya namun karena perbedaan pengkodean atau penomoran buku nikah sehingga tidak diterima sistem. Jika kemungkinan pertama yang terjadi, dinas kependudukan harus merinci lebih detail siapa yang belum melakukan pencatatan sehingga akan menjadi program kerja kementerian agama.

Tabel 4.12. Distribusi Dokumen Kependudukan menurut Kecamatan

No.	KECAMATAN	Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk		Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia dibawah 18 tahun		Penduduk Status Kawin		Penduduk Status Cerai		Kematian yang Dilaporkan	Akta kematian yang Diterbitkan
		Memiliki	Belum Memiliki	Memiliki	Belum Memiliki	Kawin tercatat	Kawin Belum Tercatat	Memiliki Akta	Belum Memiliki Akta		
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	GAMPING	46.217	47.332	21.735	1.940	21.353	72.196	999	455	503	503
2	GODEAN	35.826	34.123	15.849	1.119	16.579	53.370	400	690	418	418
3	MOYUDAN	20.752	12.924	7.308	253	12.319	21.357	239	156	243	243
4	MINGGIR	20.043	12.542	7.189	202	12.787	19.798	212	181	208	208

5	SEYEGAN	28.720	22.245	12.091	376	18.077	32.888	401	421	312	312
6	MLATI	42.720	49.363	21.081	2.251	20.027	72.056	594	1.039	478	478
7	DEPOK	60.030	62.275	26.917	3.712	31.433	90.872	1.415	789	538	538
8	BERBAH	32.386	22.403	13.694	540	21.571	33.218	572	384	300	300
9	PRAMBANAN	28.312	25.636	13.155	638	18.331	35.617	526	294	280	280
10	KALASAN	38.838	43.429	19.421	1.756	17.449	64.818	748	642	417	417
11	NGEMPLAK	36.966	25.471	15.601	617	23.541	38.896	621	340	324	324
12	NGAGLIK	53.414	43.582	23.345	2.067	33.254	63.742	1.029	523	458	458
13	SLEMAN	37.295	32.215	17.178	905	18.747	50.763	731	366	392	392
14	TEMPEL	29.485	24.860	13.047	491	13.143	41.202	315	594	327	327
15	TURI	21.551	15.723	8.877	350	14.141	23.133	272	251	211	211
16	PAKEM	19.473	18.115	8.884	429	10.375	27.213	387	222	215	215
17	CANGKRINGAN	18.229	13.080	7.807	170	13.500	17.809	329	150	179	179
JUMLAH		570.257	505.318	253.179	17.816	316.627	758.948	9.790	7.497	5.803	5.803

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, 2019

Persoalan dokumen kependudukan yang lain adalah masih rendahnya kepemilikan akta perceraian. Akta perceraian adalah suatu bukti outentik tentang putusnya suatu ikatan perkawinan. Apabila Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka perceraian harus melalui Pengadilan Negeri, yang telah menjadi kekuatan hukum yang pasti, baru dicatatkan/didaftarkan dalam daftar perceraian yang berjalan dan telah diperuntukan untuk itu. Akta Perceraianya merupakan bukti sahnya perceraian yang diperlukan sebagai dasar legalitas putusnya perkawinan dan perubahan status sebagai janda atau duda cerai hidup, pengurusan hak tunjangan anak dari suami istri, harta gono gini, dan perkawinan setelah perceraian.

Tabel diatas menjelaskan bahwa sebanyak 43 persen perceraian di Kabupaten Sleman belum memiliki akta perceraian, bahkan di Kecamatan Tempel, Mlati dan Godean hingga diatas 60 persen. Manfaat akta perceraian bagi masyarakat tidak sebesar manfaat akta kelahiran sehingga masyarakat berusaha memiliki dokumen tersebut. Akta perceraian akan diurus ketika masyarakat hendak melakukan pengurusan hak-hak tunjangan atau pembagian harta. Namun demikian, selain untuk kepentingan tertib

administrasi kependudukan sosialisasi kelengkapan dokumen pada masyarakat atas semua kejadian demografi tetap harus dilakukan.

Persoalan terakhir yang akan dibahas dalam dokumen kependudukan adalah akta kematian. Meskipun akta kematian memiliki manfaat yang cukup banyak yaitu pembuktian kematian secara hukum, pengurusan warisan/hubungan hutang piutang/asuransi, pengurusan pensiun bagi pegawai, pengurusan TASPEN, dan pencairan dana/tabungan di bank namun kepemilikan akte kematian juga tidak sebanyak penduduk yang mengalami kejadian kematian. Meskipun kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman terkait dengan pelayanan akta kematian mencapai 100 persen, artinya semua yang mengajukan permohonan semua terlayani dengan baik, namun dinas masih memiliki pekerjaan rumah. Jumlah pemohon akta kematian tidak sebanyak jumlah penduduk yang terlaporkan mengalami kejadian kematian. Terdapat 32 persen penduduk yang belum mengurus akta kematian meskipun mengalami kejadian.

Salah satu program unggulan untuk tertib akta kematian adalah LUKA DESI (Keluarga Berduka Desa Siaga). LUKA DESI merupakan sebuah inovasi dalam penertiban akta kematian. Kegiatan ini pada awalnya melalui kegiatan Desa Rintisan Tertib Administrasi Kependudukan di Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sleman mengadakan sisir adminduk dengan kegiatan jemput bola akta kelahiran, akta kematian, Kartu Identitas Anak (KIA), rekam data e-ktp, dan Sosialisasi Informasi Data Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman memiliki Program Unggulan IDOLA (Integrasi Dokumen Layanan Administrasi Kependudukan) yang merupakan inovasi pelayanan dokumen kependudukan, dalam hal ini permohonan akta kelahiran bagi kelahiran yang belum terlambat, selain memperoleh akta kelahiran juga memperoleh Kartu Keluarga baru, dimana nama anak sudah masuk didalamnya, sekaligus memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA). Program unggulan lain yang bertujuan memberi pelayanan prima adalah PAMAN TIMIN yaitu inovasi Kabupaten Sleman Tertib Administrasi

Kependudukan. Program ini merupakan pendekatan baru dalam evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tingkat kecamatan dan desa dalam rangka perbaikan pemberian pelayanan kepada masyarakat menuju terwujudnya pelayanan prima.

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

- Tukiran. 2010. *Kependudukan*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- BPS, Bappenas dan UNDP. 2011. *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001 : Menuju Konsensus Baru Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jakarta : BPS, Bappenas dan UNDP.
- Ani Anggriani, Deni Iskandar, Devi Aharyanti. PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia p-ISSN 1693-3591 (Pharmaceutical Journal of Indonesia) e-ISSN 2579-910X Vol.16 No. 02 Desember 2019:315-325315 Analisis Pengetahuan dan Alasan Penggunaan Kontrasepsi Suntik di Masyarakat Panyileukan Bandung
- Kusumaningrum, Radita(2009) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Jenis Kontrasepsi Yang Digunakan Pada Pasangan Usia Subur. Undergraduate thesis, Medical Faculty.
- Evaluasi Pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun. Bappenas. 2009